

## Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2008

Buku Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Tengah dipublikasikan secara triwulanan oleh Kantor Bank Indonesia Semarang, untuk menganalisis perkembangan ekonomi Jawa Tengah secara komprehensif. Isi kajian dalam buku ini mencakup perkembangan ekonomi makro, inflasi, moneter, perbankan, sistem pembayaran, keuangan daerah, dan prospek ekonomi Jawa Tengah. Penerbitan buku ini bertujuan untuk: (1) melaporkan kondisi perkembangan ekonomi dan keuangan di Jawa Tengah kepada Kantor Pusat Bank Indonesia sebagai masukan pengambilan kebijakan, dan (2) menyampaikan informasi kepada *external stakeholders* di daerah mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan terkini.

### Kantor Bank Indonesia Semarang

<i>M. Zaeni Aboe Amin</i>	<i>Pemimpin</i>
<i>Mahdi Mahmudy</i>	<i>Deputi Pemimpin Bidang Ekonomi Moneter</i>
<i>H. Yunnokusumo</i>	<i>Deputi Pemimpin Bidang Perbankan</i>
<i>Herdiana A.W.</i>	<i>Analisis Madya Senior Tim Ekonomi Moneter</i>
<i>Lukdir Gultom</i>	<i>Pengawas Bank Madya Senior</i>
<i>Tri Selo</i>	<i>Kepala Bidang Manajemen Intern</i>

*Softcopy buku ini dapat di-download dari  
DIBI (Data dan Informasi Bisnis Indonesia) di website Bank Indonesia dengan alamat  
<http://www.bi.go.id>*

Halaman Ini sengaja dikosongkan  
*(This page is intentionally blank)*

## Kata Pengantar

Perekonomian Jawa Tengah triwulan II-2008 mengalami pertumbuhan sebesar 6,04% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan I-2008 yang tercatat sebesar 5,49% (yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan perekonomian masih didorong oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Sementara itu dari sisi penawaran, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah adalah sektor industri pengolahan, diikuti sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restaurant (PHR).

Sementara itu, laju inflasi pada triwulan ini mengalami peningkatan dari 7,95% di triwulan I-2008 menjadi 9,01% (yoy) pada triwulan ini. Laju inflasi Jawa Tengah tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi nasional triwulan II-2008 sebesar 10,03% (yoy). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga barang dan jasa di Jawa Tengah dalam triwulan ini mengalami peningkatan yang cukup tajam, setelah adanya kenaikan harga BBM. Meskipun, apabila dibandingkan pergerakan harga barang dan jasa rata-rata nasional relatif masih lebih rendah.

Kinerja perbankan di Jawa Tengah triwulan II-2008 juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibandingkan dengan triwulan I-2008, ditandai dengan pertumbuhan beberapa indikator perbankan yang cukup baik seperti aset, dana pihak ketiga, kredit, dan *Loan to deposit ratio* (LDR). Demikian pula dengan kualitas kredit perbankan yang juga menunjukkan perbaikan, yang ditandai dengan menurunnya rasio *non performing loans* (NPL).

Perkembangan ekonomi dan perbankan daerah yang dinamis, menuntut Bank Indonesia untuk semakin meningkatkan kualitas kajian. Kajian yang dihasilkan oleh Kantor Bank Indonesia Semarang ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kantor Pusat Bank Indonesia dalam pengambilan kebijakan moneter dan perbankan secara nasional, dan diharapkan juga menjadi masukan bagi *external stakeholders* di Jawa Tengah.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, kalangan perbankan, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya di Jawa Tengah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, Agustus 2008  
KANTOR BANK INDONESIA SEMARANG

Ttd

M. Zaeni Aboe Amin  
Pemimpin

Halaman Ini sengaja dikosongkan  
*(This page is intentionally blank)*

## Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI	v	
DAFTAR TABEL	vii	
DAFTAR GRAFIK	viii	
RINGKASAN EKSEKUTIF	1	
<b>BAB 1</b>	<b>PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO</b>	<b>8</b>
1.1	Analisis PDRB dari Sisi Penggunaan	9
	1.1. Konsumsi	9
	1.2. Investasi	13
	1.3. Ekspor Neto	15
1.2	Analisis PDRB dari Sisi Penawaran	17
	2.1. Sektor Pertanian	18
	2.2. Sektor Industri Pengolahan	22
	2.3. Sektor Perdagangan Hotel dan Restauraan	22
	2.4. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	23
	2.5. Sektor Lainnya	24
<b>BOKS</b>	<b><i>Ringkasan Eksekutif Business Climate Survey (BCS) Tahun 2007 di Provinsi Jawa Tengah</i></b>	<b>28</b>
<b>BAB 2</b>	<b>PERKEMBANGAN INFLASI</b>	<b>35</b>
2.1	Faktor-faktor Penyebab Inflasi Tahunan (yoy) di Jawa Tengah	36
2.2	Faktor-Faktor Penyebab Inflasi Empat Kota di Jawa Tengah	39
<b>BAB 3</b>	<b>PERKEMBANGAN PERBANKAN</b>	<b>45</b>
3.1	Fungsi Intermediasi Bank Umum	45
	3.1.1 Penghimpunan Dana Masyarakat	46
	3.1.2 Penyaluran Kredit	49
3.2	Risiko Kredit	51
3.3	Risiko Likuiditas	53
3.4	Risiko Pasar	54
3.5	Perkembangan Bank Umum Yang Berkantor Pusat di Jawa Tengah	55
3.6	Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat	56
3.7	Perkembangan Bank Syariah	57
3.8	Kredit UMKM	59

<b>BOKS</b>	<i>Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Tengah</i>	<b>63</b>
<b>BOKS</b>	<i>Program Fasilitas Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (FPPED) Dan Pengembangan Klaster KBI Semarang</i>	<b>67</b>
<b>BAB 4</b>	<b>KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>73</b>
4.1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	73
4.2	Belanja Daerah	74
4.3	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah	76
<b>BAB 5</b>	<b>SISTEM PEMBAYARAN</b>	<b>77</b>
5.1	Perkembangan Transaksi Pembayaran Non Tunai	77
5.2	Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai	78
5.3	Perkembangan Temuan Uang Palsu	80
<b>BAB 6</b>	<b>KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>	<b>81</b>
6.1	Tingkat Kemiskinan	81
6.2	Ketenagakerjaan	82
<b>BOKS</b>	<i>Ringkasan Eksekutif Survei Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Semarang</i>	<b>85</b>
<b>BAB 7</b>	<b>PROSPEK PEREKONOMIAN</b>	<b>91</b>
<b>BOKS</b>	<i>Hasil Survey Persepsi Pasar Regional KBI Semarang Periode Triwulan II-2008</i>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN DATA</b>		<b>101</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b>		<b>107</b>



## Daftar Tabel

TABEL 1.1	Pertumbuhan dan Kontribusi Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Menurut Jenis Penggunaan (YOY, Persen)	9
TABEL 1.2	Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Menurut Kelompok HS 2 Provinsi Jawa Tengah (USD Ribu)	16
TABEL 1.3	Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Menurut Klasifikasi HS 2 Provinsi Jawa Tengah (USD Ribu)	17
TABEL 1.4	Perkembangan PDRB Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha (YOY)	18
TABEL 1.5	Perkembangan dan Perkiraan Produksi Padi di Jawa Tengah	20
TABEL 1.6	Perkembangan Kegiatan Bank	24
TABEL 2.1	Laju Inflasi Jawa Tengah Bulanan dan Tahunan Menurut Kelompok Barang dan Jasa (Persen)	38
TABEL 2.2	Laju Inflasi Tahunan Empat Kota Di Jawa Tengah Menurut Kelompok Barang dan Jasa (Persen)	43
TABEL 3.1	Perkembangan Indikator Perbankan Di Provinsi Jawa Tengah (Bank Umum & BPR)	45
TABEL 3.2	Penyaluran Kredit Modal Kerja Bank Umum Per Sektor Ekonomi	50
TABEL 3.3	Rasio NPLs Per Sektor Ekonomi	52
TABEL 3.4	Rasio NPLs Jenis Kredit Modal Kerja Per Sektor Ekonomi	52
TABEL 3.5	Perkembangan Bank Umum Yang Berkantor Pusat Di Jawa Tengah	55
TABEL 3.6	Perkembangan Beberapa Indikator BPR di Jawa Tengah	56
TABEL 3.7	Perkembangan Indikator Perbankan Syariah di Provinsi Jawa Tengah	58
TABEL 4.1	Realisasi APBD Semester I-2007 & I-2008 A	73
TABEL 4.2	Realisasi APBD Semester I-2007 & I-2008 B	75
TABEL 4.3	Perkembangan Pendapat Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2006-2008	76
TABEL 5.1	Perkembangan Perputaran Kliring dan RTGS di Jawa Tengah	77
TABEL 6.1	Angka Kemiskinan Penduduk (Ribu Orang)	81
TABEL 6.2	Penduduk Usia Kerja di Jawa Tengah Menurut Keegiatannya	82
TABEL 6.3	Jumlah Pencari Kerja di Jawa Tengah	83
TABEL 7.1	Estimasi Laju Inflasi Jawa Tengah Hingga Akhir Tahun 2008 Menurut Kelompok Barang dan Jasa (YOY, Persen)	95

## Daftar Grafik

GRAFIK 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Secara Tahunan	8
GRAFIK 1.2	Indeks Riil Penjualan Kelompok Komoditas Perumahan Bahan Bakar	10
GRAFIK 1.3	Indeks Riil Penjualan Kelompok Komoditas Peralatan Pendidikan, Rekreasi, Olahraga	10
GRAFIK 1.4	Penjualan Listrik PLN di Wilayah Jawa Tengah	10
GRAFIK 1.5	Perkiraan Produksi Pertamina Di Jawa Tengah	10
GRAFIK 1.6	Perkembangan Indeks Kepercayaan Konsumen	11
GRAFIK 1.7	Perkembangan Indeks Ekspektasi Konsumen	11
GRAFIK 1.8	Perkembangan Kredit dan NPL jenis kredit konsumsi Bank Umum di Wilayah Jawa Tengah	12
GRAFIK 1.9	Realisasi Belanja APBD Provinsi Jawa Tengah	12
GRAFIK 1.10	Perkembangan Deposito dan Giro Pemerintah Daerah Jawa Tengah	12
GRAFIK 1.11	Penjualan Semen di Jawa Tengah	13
GRAFIK 1.12	Perkembangan Impor Barang Modal	14
GRAFIK 1.13	Perkembangan Impor Barang Modal Utama	14
GRAFIK 1.14	Perkembangan Kredit dan NPL Jenis Kredit investasi Bank Umum di Jawa Tengah	15
GRAFIK 1.15	Perkembangan Ekspor Jawa Tengah	16
GRAFIK 1.16	Perkembangan Impor Jawa Tengah	16
GRAFIK 1.17	Perkiraan Perkembangan Produksi Tabama di Jawa Tengah	19
GRAFIK 1.18	Indeks Produksi Industri Pengolahan Minyak di Jawa Tengah	21
GRAFIK 1.19	Perkembangan Ekspor Produk Kayu dan Furnitur di Jawa Tengah	21
GRAFIK 1.20	Perkembangan Ekspor TPT di Jawa Tengah	21
GRAFIK 1.21	Perkembangan Penyaluran Kredit Sektor Industri Oleh Bank Umum di Jawa Tengah	22
GRAFIK 1.22	Perkembangan Penumpang Kereta Api Tujuan Jawa Tengah	23
GRAFIK 1.23	Penyaluran Kredit Sektor PHR oleh Bank Umum di Jawa Tengah	23
GRAFIK 1.24	Perkembangan Penyaluran Kredit sektor Jasa oleh Bank Umum di Jawa Tengah	24
GRAFIK 1.25	Perkembangan Penyaluran Kredit Sektor Pengangkutan dan Komunikasi oleh Bank Umum di Jawa Tengah	25
GRAFIK 1.26	Perkembangan Penyaluran Kredit Sektor Bangunan oleh Bank Umum di Jawa Tengah	26



GRAFIK 1.27	Indeks Produksi air Bersih di Wilayah Jawa Tengah	27
GRAFIK 1.28	Penyaluran Kredit Sektor Listrik, Gas dan Air oleh Bank Umum di Wilayah Jawa Tengah	27
GRAFIK 2.1.	Perkembangan Inflasi Tahunan (YoY) Jawa Tengah dan Nasional	36
GRAFIK 2.2	Perkembangan Inflasi Jawa Tengah Secara Bulanan (MtM) dan Tahunan	36
GRAFIK 2.3.	Perkembangan Harga Beberapa Komoditas Strategis Hasil Survey Pemantauan Harga (SPH)Mingguan di Kota Semarang	40
GRAFIK 2.4.	Perkembangan Ekspektasi Inflasi Hasil Survei Konsumen Dan Inflasi Aktual di Jawa Tengah	41
GRAFIK 2.5.	Perkembangan Inflasi Tahunan (YoY) Empat Kota di Jawa Tengah	42
GRAFIK 3.1.	Perkembangan Aset Bank Umum	46
GRAFIK 3.2.	Perkembangan Aset Bank Umum Menurut Kelompok Bank	46
GRAFIK 3.3.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum	47
GRAFIK 3.4.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum menurut Kelompok Bank	47
GRAFIK 3.5.	Perkembangan Suku Bunga Simpanan Perbankan Bank Umum	47
GRAFIK 3.6.	Perkembangan Komposisi Kepemilikan Dana Pihak Ketiga Bank Umum	47
GRAFIK 3.7.	Perkembangan Kredit Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan	49
GRAFIK 3.8.	Perkembangan Kredit Bank Umum Menurut Kelompok Bank	49
GRAFIK 3.9.	Perkembangan Kredit Bank Umum dan Rasio NPLs	51
GRAFIK 3.10.	Perkembangan Nominal NPLs Kredit Berdasar Jenis Penggunaan	51
GRAFIK 3.11.	Komposisi DPK Bank Umum Triwulan II-2008	53
GRAFIK 3.12.	Perkembangan Kredit UMKM dan Total Kredit	59
GRAFIK 3.13.	Perkembangan Kredit UMKM Menurut Jenis Penggunaan	59
GRAFIK 3.14.	Komposisi Kredit UMKM Berdasar Sektor Ekonomi Triwulan II-2008	60
GRAFIK 3.15.	Perkembangan Kredit UMKM berdasarkan Skala Usaha	60
GRAFIK 5.1	Aliran Kas Masuk dan Keluar KBI se-Jawa Tengah	78
GRAFIK 5.2	Rasio PTTB Terhadap Cash Inflow di Jawa Tengah	79
GRAFIK 5.3	Temuan UPAL yang Masuk ke KBI se-Jawa Tengah	80
GRAFIK 7.1	Perkembangan Aktivitas Usaha Berdasarkan Hasil SKDU dan Pertumbuhan Ekonomi Aktual (QtQ)	92
GRAFIK 7.2	Perkiraan Inflasi Hasil SKDU dan Laju Inflasi IHK Tahunan Aktual (YoY)	94

GRAFIK 7.3	Perkiraan Hasil Inflasi Hasil Survei Konsumen Dan Laju Inflasi IHK Aktual	94
GRAFIK 7.4	Ekspektasi Masyarakat Enam Bulan Ke Depan Berdasarkan Survey Konsumen	94
GRAFIK 7.5	Ekspektasi Pedagang Untuk Enam Bulan Ke Depan Berdasarkan Survey Penjualan Eceran	95



# Ringkasan Eksekutif

## A. GAMBARAN UMUM

*Perekonomian Jawa Tengah triwulan ini mengalami pertumbuhan yang sedikit meningkat, diiringi dengan tekanan inflasi yang juga meningkat*

Perekonomian Jawa Tengah selama triwulan II-2008 mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu tekanan inflasi cenderung meningkat yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak, serta tekanan di sisi permintaan dan *supply* bahan makanan. Kinerja perbankan (bank umum dan BPR) di Jawa Tengah triwulan ini menunjukkan kinerja yang meningkat dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya. Sebagian besar indikator utama kinerja perbankan mengalami perbaikan dibandingkan posisi Juni 2007, sebagaimana tercermin dari meningkatnya total aset, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun, dan penyaluran kredit. Kondisi uang kartal yang dikelola oleh Kantor Bank Indonesia (KBI) se-Jawa Tengah pada triwulan laporan masih menunjukkan *net inflow*, dengan peningkatan jumlah *inflow* sementara *outflow* mengalami penurunan. Pada triwulan III-2008 diperkirakan perekonomian akan mengalami perlambatan dengan pertumbuhan PDRB pada kisaran 5,3%-5,8% (yoy).

## B. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

*Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2008 tumbuh 6,04% (yoy)*

Secara tahunan pada triwulan II-2008<sup>1</sup>, perekonomian Jawa Tengah diperkirakan tumbuh 6,04% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan II-2007 sebesar 5,85% dan pertumbuhan triwulan I-2008 sebesar 5,49%.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan perekonomian masih didorong oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Investasi masih relatif belum menunjukkan perkembangan yang berarti, sementara itu perdagangan internasional ditandai dengan penurunan nilai ekspor dan impor.

Konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2008 diperkirakan

<sup>1</sup> Berdasarkan PDRB harga konstan 2000

*Konsumsi rumah tangga memberikan sumbangan terbesar pada pertumbuhan ekonomi triwulan ini*

masih tumbuh sebesar 5,21% dan memberikan kontribusi sebesar 3,31% terhadap pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah. Masa liburan dan tahun ajaran baru merupakan salah satu pendorong peningkatan konsumsi rumah tangga.

Konsumsi pemerintah diperkirakan mencatat pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 12,34%. Pertumbuhan tersebut diperkirakan disebabkan realisasi belanja yang cukup besar, yang dipergunakan selain untuk kegiatan rutin juga untuk keperluan pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur di akhir triwulan II-2008.

Pertumbuhan investasi yang tercermin dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada triwulan II-2008 diperkirakan mencapai 6,18%(yoy), mengalami peningkatan apabila dibandingkan posisi triwulan II-2007 sebesar 5,71%. Pertumbuhan investasi ini diperkirakan berasal dari sektor properti, konstruksi dan mesin industri. Pertumbuhan ekspor<sup>2</sup> pada PDRB Jawa Tengah triwulan II-2008 mencatat pertumbuhan sebesar 1,21% (yoy), sedangkan impor mengalami kontraksi sebesar -6,44% (yoy). Berdasarkan data ekspor dan impor yang diolah dari Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter (DSM) Bank Indonesia, kinerja ekspor non migas Jawa Tengah pada April-Mei meningkat sebesar 12,97% (yoy), didorong pula oleh peningkatan harga komoditas di tingkat internasional yang mengalami peningkatan. Sementara dari sisi volume ekspor, hanya terjadi peningkatan sebesar 0,06% pada posisi April-Mei 2008.

*Nilai ekspor dan impor menunjukkan peningkatan karena adanya kenaikan harga komoditas di tingkat internasional*

Sementara itu nilai impor non migas pada posisi April-Mei 2008 meningkat sebesar 38,77% dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya disebabkan pula terutama oleh peningkatan harga komoditas barang impor, karena apabila dilihat dari sisi volume justru terjadi penurunan volume impor sebesar -0.06%.

Dari sisi penawaran, Berdasarkan kontribusi terhadap pertumbuhan, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah pada triwulan ini adalah sektor industri pengolahan sebesar 1,68%, diikuti sektor pertanian

*Dari sisi sektoral, sektor*

<sup>2</sup> Pengertian ekspor dan impor dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar propinsi

*industri, PHR dan pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan..*

sebesar 1,25% dan sektor perdagangan, hotel dan restaurant (PHR) sebesar 1,21%. Sementara itu berdasarkan tingkat pertumbuhannya, pertumbuhan tertinggi adalah sektor jasa sebesar 8,80%, sektor keuangan sebesar 8,20%, serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,67%.

Walaupun mengalami tekanan akibat kenaikan harga BBM industri yang telah berlangsung selama beberapa waktu, pada triwulan II-2008 sektor industri pengolahan di Jawa Tengah diperkirakan tetap mengalami pertumbuhan sebesar 5,32%. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh pertumbuhan sektor industri migas, akibat kenaikan harga produk migas. Sementara itu industri non migas tumbuh relatif moderat.

Sektor perdagangan, hotel dan restaurant diperkirakan tumbuh sebesar 5,77% (yoy), walaupun terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun lalu, namun secara umum pertumbuhan sektor PHR di Jawa Tengah relatif stabil di atas angka 5% (yoy). Situasi sosial politik dan keamanan di wilayah Jawa Tengah relatif stabil, termasuk ketika dilaksanakan even Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, sehingga mendorong terciptanya iklim bisnis yang kondusif

Sektor jasa-jasa diperkirakan tumbuh sebesar 8,80% (yoy), dan merupakan sektor dengan pertumbuhan yang terbesar. Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan sub sektor jasa pemerintah karena realisasi belanja pemerintah yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan realisasi belanja ini diantaranya untuk kegiatan PILKADA dan kegiatan rutin lainnya.

### **C. PERKEMBANGAN INFLASI**

Berdasarkan hitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, laju inflasi Jawa Tengah dalam triwulan II-2008 tercatat sebesar 9,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2008 sebesar 7,95%. Laju inflasi Jawa Tengah tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi nasional triwulan II-2008 sebesar

*Tekanan inflasi tahunan di Jawa Tengah pada triwulan II-2008 lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya*

10,03% (yoy). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga barang dan jasa di Jawa Tengah dalam triwulan ini mengalami peningkatan yang cukup tajam, setelah adanya kenaikan harga BBM. Meskipun, apabila dibandingkan pergerakan harga barang dan jasa rata-rata nasional relatif masih lebih rendah.

Beberapa kelompok barang yang menjadi pemicu utama inflasi tahunan Jawa Tengah triwulan ini terutama adalah kelompok bahan makanan, kelompok perumahan, dan kelompok transportasi. Hal ini disebabkan tingginya laju inflasi bulanan ketiga kelompok komoditas tersebut di bulan Juni 2008, yaitu masing-masing sebesar 2,31%, 2,62% dan 8,72% (mtm).

#### **D. PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN**

Kinerja perbankan (Bank Umum dan BPR) di Provinsi Jawa Tengah pada triwulan II-2008 mengalami perkembangan yang positif. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya indikator-indikator utama kinerja perbankan yaitu total aset, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun, dan kredit yang diberikan, *Loan to Deposits Ratio* (LDR) serta peningkatan kualitas kredit.

*Kinerja perbankan Jawa Tengah menunjukkan perkembangan positif*

Aset bank umum di Jawa Tengah meningkat sebesar Rp11.379 miliar (14,14%) menjadi Rp91.822 miliar., sementara itu DPK yang berhasil dihimpun bank umum di Jawa Tengah pada triwulan II-2008 tumbuh sebesar 12,92% (yoy) menjadi Rp73.706 miliar, dan penyaluran kredit tumbuh sebesar 279% (yoy) menjadi Rp71.397 miliar. Dengan demikian LDR meningkat dari 80,82% menjadi 90,65%. Dari sisi kualitas kredit, terjadi peningkatan kualitas kredit yang tercermin dari penurunan rasio *Non Performing Loans (NPL)* dari 5,73% pada triwulan I-2007 menjadi 2,80% pada triwulan II-2008.

Total aset BPR pada triwulan II-2008 tercatat sebesar Rp7.278miliar, meningkat sebesar 21,25% (yoy). Sedangkan DPK yang dihimpun oleh BPR di Jawa Tengah tercatat sebesar Rp5.054 miliar,

meningkat 18,72% dibandingkan triwulan II-2007. Kredit yang disalurkan oleh BPR pada triwulan II-2008 tumbuh sebesar 22,74% (yoy) menjadi Rp5.991 miliar, sehingga LDR mengalami peningkatan dari 114,65% pada triwulan II-2007 menjadi 118,52% pada triwulan II-2008.

Penyaluran kredit UMKM pada triwulan II-2008 mengalami peningkatan sebesar 27,19% dibandingkan triwulan I-2007 sehingga menjadi Rp57.145 miliar, dengan proporsi sebesar 80,04% dari total kredit perbankan (bank umum dan BPR) di Jawa Tengah.

Kegiatan pembayaran non tunai antarbank melalui *sistem kliring* pada triwulan II-2008 tercatat sebesar Rp22.290 milyar. atau tumbuh 6,44% (yoy), namun jumlah transaksi kliring selama triwulan II-2008 hanya tercatat sebesar 713.927 lembar atau mengalami penurunan sebesar -6,73% (yoy). Sementara itu untuk penyelesaian transaksi non tunai melalui *RTGS* mengalami pertumbuhan 6,72% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar Rp24.546 miliar.

Aliran uang masuk ke kas Bank Indonesia yang berasal dari setoran bank umum di Jawa Tengah selama triwulan II-2008 tercatat sebesar Rp3.125 miliar atau menurun 83,73% dari triwulan I-2008. Sementara itu, *cash outflow* dari kas Bank Indonesia Semarang tercatat sebesar Rp2.263 miliar atau meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 378,4% dari triwulan sebelumnya. Adapun jumlah jumlah PTTB di KBI se-Jawa Tengah tercatat sebesar Rp2.717 miliar, mengalami sedikit penurunan sebesar -8% dibandingkan triwulan I-2008.

*Cash outflow  
meningkat sementara  
cash inflow mengalami  
penurunan*

Sementara itu, jumlah temuan uang rupiah palsu (UPAL) yang tercatat di Kantor Bank Indonesia se Jawa Tengah dalam dalam triwulan II-2008 tercatat sebanyak 2.831 lembar atau mengalami sedikit penurunan dibandingkan triwulan yang lalu sebanyak 2.947 lembar.

*Jumlah temuan UPAL  
menurun dibanding  
triwulan sebelumnya*

## **E. PROSPEK PEREKONOMIAN**

Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan III-2008 diperkirakan akan melambat dibandingkan triwulan II-2008, akibat dampak

*Perekonomian pada triwulan III-2008 diperkirakan akan mengalami perlambatan*

kenaikan harga BBM. Diperkirakan perekonomian Jawa Tengah akan tumbuh dalam kisaran 5,3%-5,8% (yoy) pada triwulan III-2008. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2008 di Jateng akan didorong oleh sektor perdagangan, hotel dan restaurant (PHR), sektor industri pengolahan, sektor jasa-jasa dan sektor pertanian.

Di sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih didorong oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga ini masih disebabkan oleh peningkatan kebutuhan memasuki bulan puasa dan menjelang hari raya Idul Fitri. Sementara itu konsumsi pemerintah diperkirakan akan meningkat disebabkan siklus anggaran telah memasuki semester kedua

*Tekanan Inflasi tahunan diperkirakan meningkat*

Tekanan inflasi tahunan yang mulai meningkat pasca kenaikan harga BBM pada bulan Mei 2008 yang lalu diperkirakan akan meningkatkan tekanan laju inflasi hingga *double digit* pada triwulan III-2008 hingga akhir tahun 2008. Faktor pemicu inflasi triwulan mendatang diperkirakan karena inflasi komoditas *administered prices* dan *volatile foods*, khususnya di kelompok transportasi, kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, dan kelompok perumahan. Selain karena masih adanya dampak kenaikan harga BBM, hal tersebut juga seiring dengan naiknya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pada bulan puasa dan sekaligus menjelang hari raya lebaran di triwulan III-2008.

Sementara itu, sumbangan dari faktor moneter diperkirakan tidak terlalu signifikan sejalan dengan cukup stabilnya kurs rupiah dalam kisaran ideal antara Rp9.000,00 s.d. Rp9.300,00 per USD. Namun, tekanan dari ekspektasi masyarakat diperkirakan mengalami peningkatan hingga akhir tahun. Hal tersebut sejalan dengan hasil Survei Penjualan Eceran maupun Survei Konsumen yang dilakukan Kantor Bank Indonesia Semarang pada triwulan ini. Berdasarkan Hasil Survei Penjualan Eceran, responden mengekspektasikan bahwa harga di tingkat pedagang pada triwulan III-2008 mendatang akan meningkat rata-rata 21%. Sementara dari hasil Survei Konsumen, sebagian besar juga mengekspektasikan terjadinya kenaikan harga



barang/jasa.

Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), ekspektasi masyarakat terhadap laju inflasi pada triwulan mendatang diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan II-2008 yaitu sekitar 11-12%. Berdasarkan hasil Survei Konsumen (SK), ekspektasi masyarakat terhadap inflasi triwulan mendatang juga mengalami peningkatan dibandingkan triwulan II-2008. Dengan melihat beberapa faktor tersebut, inflasi Jawa Tengah pada triwulan III-2008 diperkirakan akan berada dalam kisaran 10,5%-11,5% (yoy).

*Inflasi triwulan II-2008  
diperkirakan berada  
dalam kisaran 6,5 –  
7,0% (yoy)*



Halaman Ini sengaja dikosongkan  
*(This page is intentionally blank)*



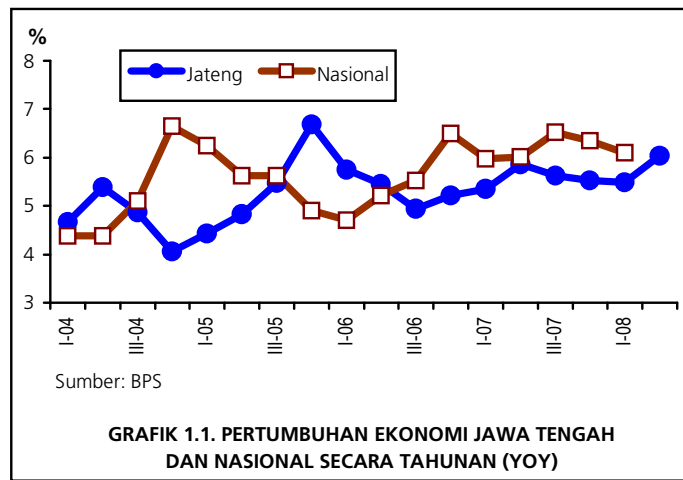
# Bab 1

## Perkembangan Ekonomi Makro

**Perekonomian Jawa Tengah tetap mengalami pertumbuhan walaupun dibayangi oleh tingginya inflasi pasca kenaikan harga BBM** . Secara tahunan pada triwulan II-2008<sup>3</sup>, perekonomian Jawa Tengah diperkirakan tumbuh 6,04% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan II-2007 sebesar 5,85% dan pertumbuhan triwulan I-2008 sebesar 5,49%.

**Dari sisi permintaan**, pertumbuhan perekonomian masih didorong oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Investasi masih relatif belum menunjukkan perkembangan yang berarti, sementara itu perdagangan internasional ditandai dengan penurunan nilai ekspor dan impor.

**Dari sisi penawaran**, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian diperkirakan menjadi penopang utama pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah dalam triwulan laporan ini. Sektor lain yang diperkirakan tumbuh cukup signifikan adalah sektor jasa, sektor perdagangan, hotel dan restaurant, dan sektor bangunan.



**GRAFIK 1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA TENGAH DAN NASIONAL SECARA TAHUNAN (YOY)**

<sup>3</sup> Berdasarkan PDRB harga konstan 2000

Peningkatan harga minyak di pasar internasional menyebabkan peningkatan kegiatan industri migas di Jawa Tengah, selain itu kegiatan PILKADA selama triwulan II-2008 mendorong pula berkembangnya sektor jasa. Hal tersebut menyebabkan perekonomian Jawa Tengah memiliki trend yang berbeda dibandingkan trend perlambatan perekonomian nasional sebagai dampak kenaikan harga BBM.

## 1. Analisis PDRB dari Sisi Penggunaan

Perekonomian Jawa Tengah triwulan II-2008 diperkirakan tumbuh sebesar 6,04%. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut diperkirakan disebabkan oleh kebutuhan biaya pendidikan dan masa liburan di akhir triwulan II-2008.

**TABEL 1.1**  
**PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PERTUMBUHAN PDRB JAWA TENGAH**  
**MENURUT JENIS PENGGUNAAN (YOY, PERSEN)**

No	Lapangan Usaha	I-06	I-07	II-07	III-07	IV-07	I-08*)	II-08**)
<b>Pertumbuhan Year on Year</b>								
1	Kons. Rumah Tangga	4.85%	4.53%	5.05%	5.63%	5.29%	5.13%	5.21%
	a. Makanan	3.25%	1.91%	2.31%	3.28%	2.92%	2.37%	2.43%
	b. Non Makanan	7.42%	8.54%	9.25%	9.18%	8.74%	9.11%	9.19%
2	Kons. LNP	-2.10%	6.24%	7.05%	5.84%	3.01%	2.65%	2.12%
3	Kons. Pemerintah	15.96%	6.69%	8.84%	13.48%	19.83%	14.71%	12.34%
4	P M T B	11.65%	5.86%	5.71%	5.56%	5.56%	6.18%	6.18%
5	Ekspor Neto	-19.95%	11.74%	-208.44%	-75.00%	-983.91%	14.37%	501.01%
	a. Ekspor	21.03%	2.59%	1.03%	6.26%	12.68%	9.87%	1.27%
	b. Impor	35.81%	0.65%	-6.53%	16.75%	-12.89%	8.81%	-6.44%
	<b>PDRB</b>	<b>5.78%</b>	<b>5.37%</b>	<b>5.86%</b>	<b>5.63%</b>	<b>5.53%</b>	<b>5.49%</b>	<b>6.04%</b>

Sumber : KBI Semarang dan BPS Propinsi Jawa Tengah (data PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000)

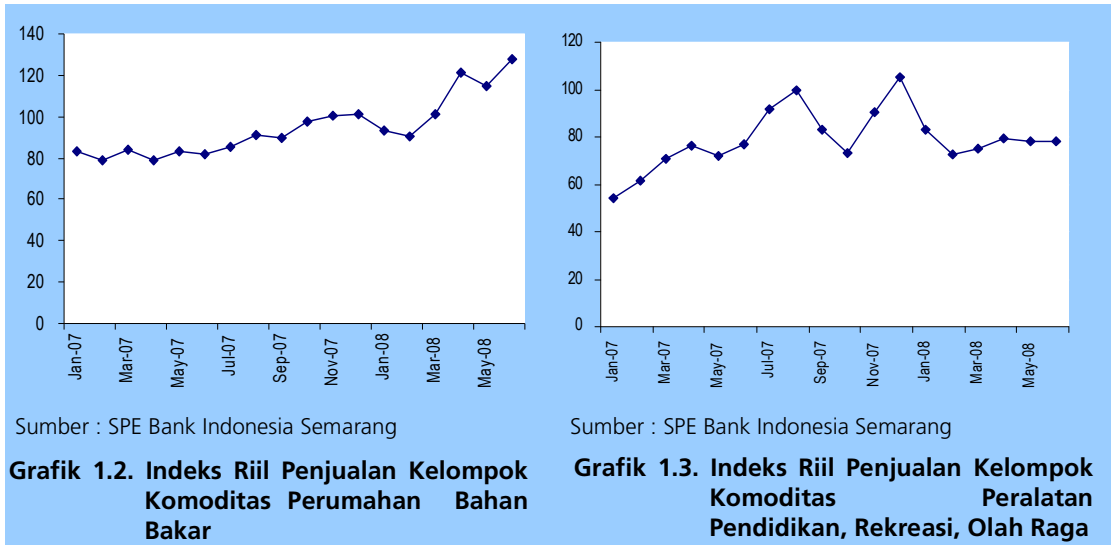
Keterangan : \*) angka sementara

\*\* \*) angka sangat sementara (poyeksi KBI Semarang)

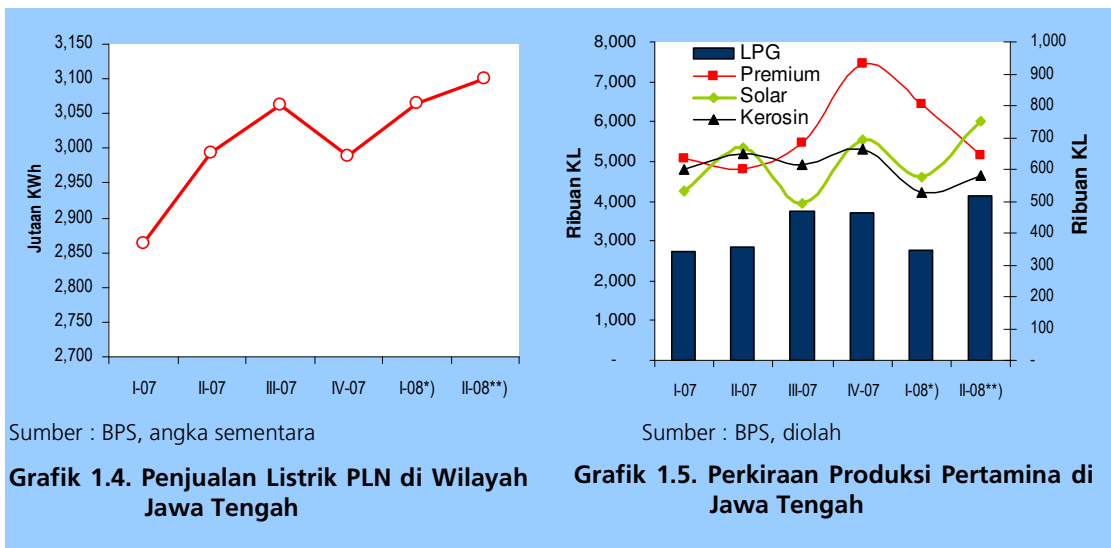
### 1.1. Konsumsi

**Konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2008 diperkirakan masih tumbuh sebesar 5,21% dan memberikan kontribusi sebesar 3,31% terhadap pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah.** Masa liburan dan tahun ajaran baru merupakan salah satu pendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Kenaikan harga BBM diperkirakan juga menyebabkan masyarakat meningkatkan kegiatan

konsumsinya, terutama sebelum kenaikan harga BBM diberlakukan, dengan motif berjaga-jaga. Peningkatan konsumsi rumah tangga diantaranya antara lain tercermin dari hasil Survey Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan Kantor Bank Indonesia Semarang, dimana untuk kelompok komoditas Perumahan dan Bahan Bakar serta kelompok komoditas peralatan pendidikan, rekreasi dan olahraga menunjukkan adanya peningkatan.

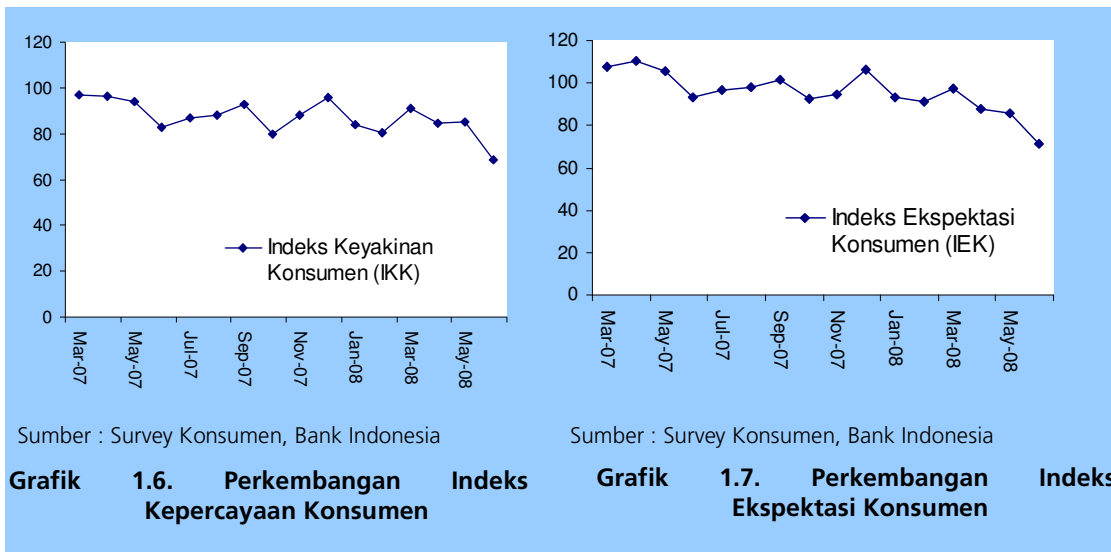


Indikator lain dari peningkatan konsumsi masyarakat tercermin pula dari penjualan listrik oleh PLN Wilayah Jawa Tengah serta perkiraan produksi bahan bakar minyak Pertamina yang menunjukkan adanya trend peningkatan di triwulan II-2008.

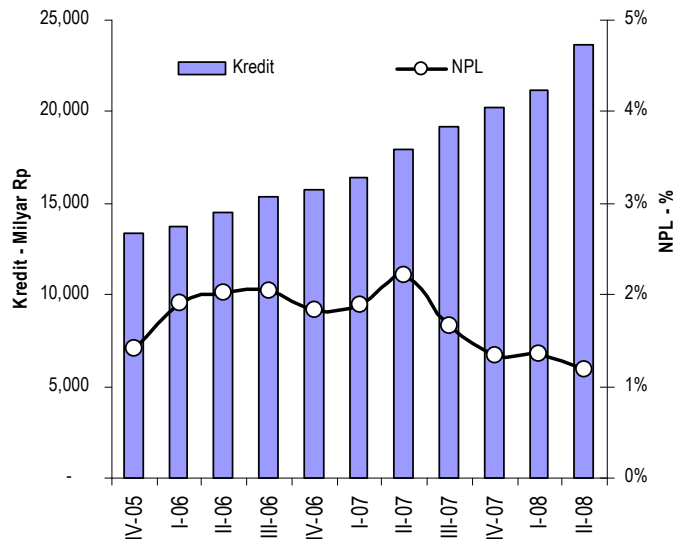


Namun demikian hasil Survey Konsumen yang dilakukan KBI Semarang

menunjukkan bahwa Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) mengalami penurunan tajam pada akhir triwulan kedua. Hal tersebut disebabkan oleh pesimisme masyarakat akibat rencana kenaikan harga BBM yang akhirnya ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah pada bulan Mei 2008. Sehingga peningkatan konsumsi yang terjadi pada triwulan kedua tersebut selain memang didorong oleh kebutuhan yang harus dipenuhi (misal kebutuhan pendidikan dan lain-lain), juga dipengaruhi oleh sifat emosional masyarakat untuk mengkonsumsi beberapa jenis komoditas dan mengantisipasi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Hal tersebut juga merupakan salah satu pendorong peningkatan harga beberapa komoditas di masyarakat sebelum kenaikan harga bahan bakar minyak resmi ditetapkan. Hasil survey juga menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi pesimis terhadap kondisi perekonomian 6 bulan ke depan yang tercermin dari turunnya Indeks Ekspektasi Konsumen. Pesimisme tersebut dapat memberikan indikasi perlambatan perekonomian karena masyarakat mengurangi kegiatan konsumsi, atau lebih mengutamakan kegiatan konsumsinya pada kebutuhan pokok.



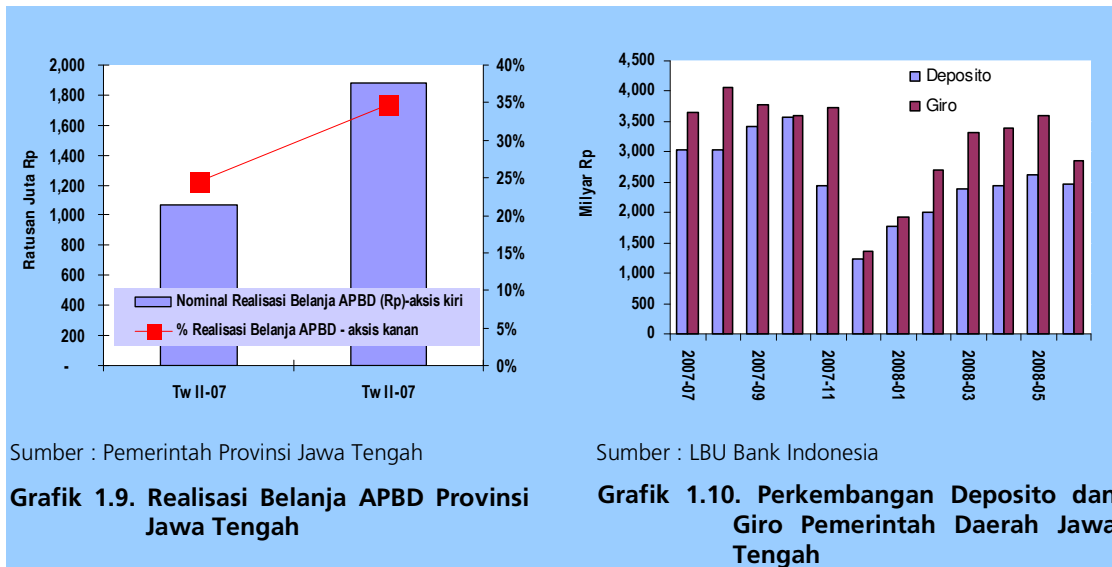
**Dari sisi pembiayaan, peningkatan konsumsi rumah tangga antara lain didukung oleh penyaluran kredit konsumsi bank umum di Jawa Tengah.** Posisi *outstanding* kredit konsumsi bank umum triwulan II-2008 sebesar Rp23,69 trilyun, atau mengalami peningkatan sebesar 31,84% dibandingkan posisi yang sama tahun lalu. Demikian pula rasio NPL juga menunjukkan trend perbaikan pada posisi 1,19%, lebih kecil dibanding posisi triwulan II-2007 sebesar 2,21%.



Sumber : Bank Indonesia

**Grafik 1.8. Perkembangan Kredit dan NPL Jenis Kredit Konsumsi Bank Umum di Wilayah Jawa Tengah**

Konsumsi pemerintah diperkirakan mencatat pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sebesar **12,34%**. Pertumbuhan tersebut diperkirakan disebabkan realisasi belanja yang cukup besar, yang dipergunakan selain untuk kegiatan rutin juga untuk keperluan pembiayaan Pemilihan Gubernur Kepala Daerah di akhir triwulan II-2008.



Sumber : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Sumber : LBU Bank Indonesia

**Grafik 1.9. Realisasi Belanja APBD Provinsi Jawa Tengah**

**Grafik 1.10. Perkembangan Deposito dan Giro Pemerintah Daerah Jawa Tengah**

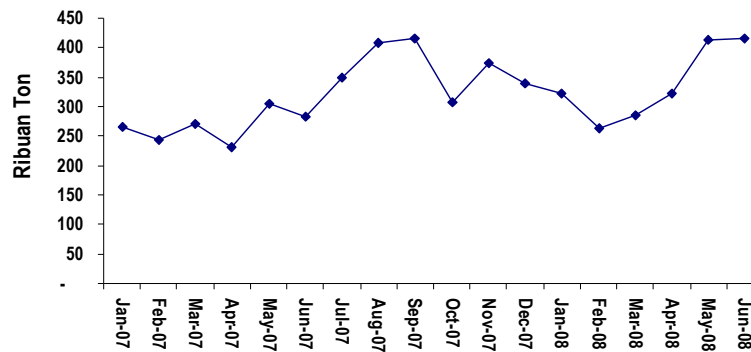
Untuk melihat perkembangan konsumsi pemerintah, prompt indikator yang dapat digunakan adalah belanja APBD Kabupaten/Kota di wilayah Jawa

**Tengah.** Belanja pemerintah daerah ini merupakan salah satu stimulus perekonomian daerah yang cukup signifikan. Sampai dengan triwulan II-2008, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar Rp1,88 trilyun atau 34,79% dari rencana belanja yang ditetapkan. Posisi ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi belanja pada triwulan II-2007 yang tercatat sebesar Rp1,07 trilyun atau 24,51% dari rencana yang ditetapkan.

**Posisi Deposito dan Giro milik pemerintah daerah yang disimpan di perbankan Jawa Tengah menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan di akhir triwulan II-2008.** Hal tersebut merupakan salah satu prompt indikator yang dapat mengindikasikan adanya realisasi belanja pemerintah daerah pada triwulan ini.

## 1.2. Investasi

Pertumbuhan investasi tercermin dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada triwulan II-2008 diperkirakan mencapai 6,18% (yoy), mengalami peningkatan apabila dibandingkan posisi triwulan II-2007 sebesar 5,71%. Pertumbuhan investasi ini diperkirakan berasal dari sektor properti, konstruksi dan mesin industri .

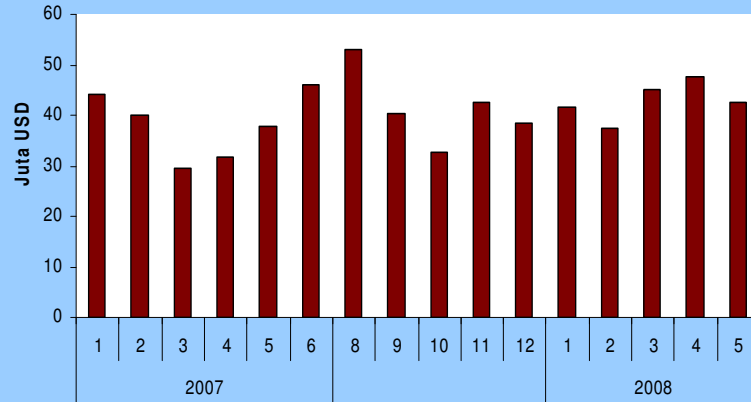


Sumber : Asosiasi Semen Indonesia

**Grafik 1.11. Penjualan Semen di Jawa Tengah**

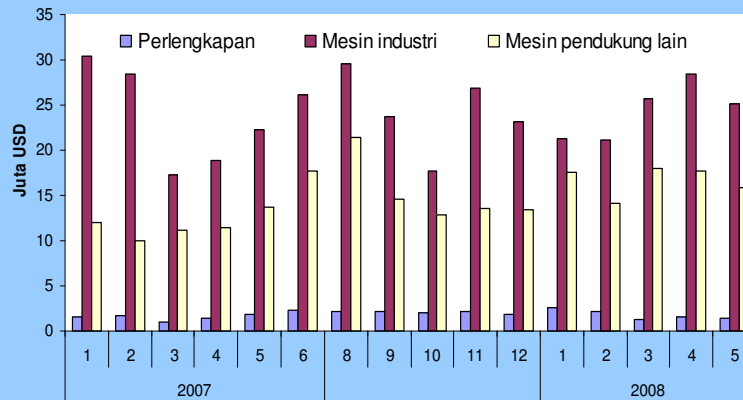
**Prompt indikator perkembangan investasi sektor properti dan konstruksi tercermin dari perkembangan penjualan semen di wilayah Jawa Tengah yang menunjukkan trend peningkatan dibandingkan posisi yang sama tahun lalu.** Pertumbuhan penjualan semen ini menjadi indikator pembangunan properti baru atau investasi baru di sektor bangunan di wilayah Jawa Tengah.





Sumber : SEKDA KBI Semarang

**Grafik 1.12. Perkembangan Impor Barang Modal**

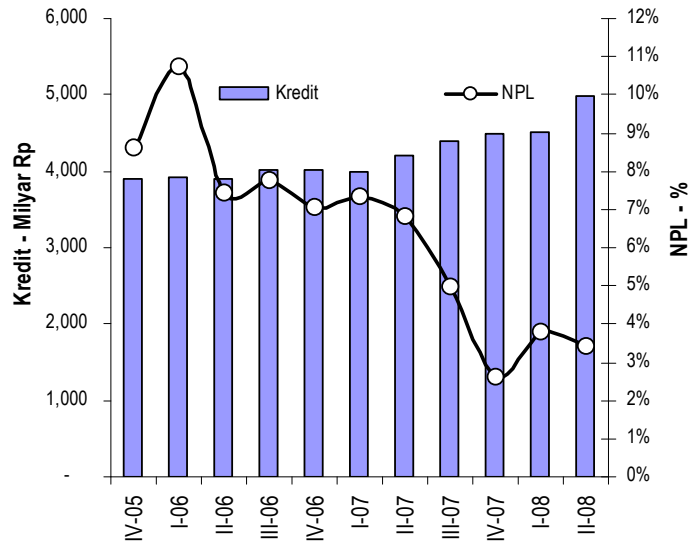


Sumber : SEKDA KBI Semarang

**Grafik 1.13. Perkembangan Impor Barang Modal Utama**

**Investasi non bangunan tercermin dari perkembangan impor barang modal utama di wilayah Jawa Tengah yang menunjukkan adanya trend peningkatan.** Selama semester II-2007 hingga Semester I-2008 terjadi pendirian beberapa industri Tekstil dan Produk Tekstil yang merupakan relokasi dari wilayah lain. Hal tersebut ditengarai merupakan salah satu pendorong pertumbuhan impor barang modal ke wilayah Jawa Tengah, selain investasi pada beberapa sektor industri lain. Impor barang modal di wilayah Jawa Tengah selama periode Januari-Mei 2008 mencatat nilai sebesar USD 213,84 juta, atau mengalami peningkatan sebesar 16,73% dibandingkan posisi yang sama tahun lalu.

Dari sisi pembiayaan, peningkatan investasi tercermin dari trend peningkatan kredit investasi yang disalurkan oleh bank umum di wilayah Jawa Tengah. Walaupun proporsi jenis kredit investasi ini merupakan yang terkecil dibandingkan kredit konsumsi dan kredit modal kerja, namun yang cukup menggembirakan adalah posisi baki debit kredit ini tetap menunjukkan trend peningkatan. Selain itu kualitas kredit investasi yang disalurkan oleh perbankan menunjukkan trend perbaikan, yang tercermin dari perbaikan kualitas NPL.



Sumber : LBU Bank Indonesia

**Grafik 1.14. Perkembangan Kredit dan NPL Jenis Kredit Investasi Bank Umum di Wilayah Jawa Tengah**

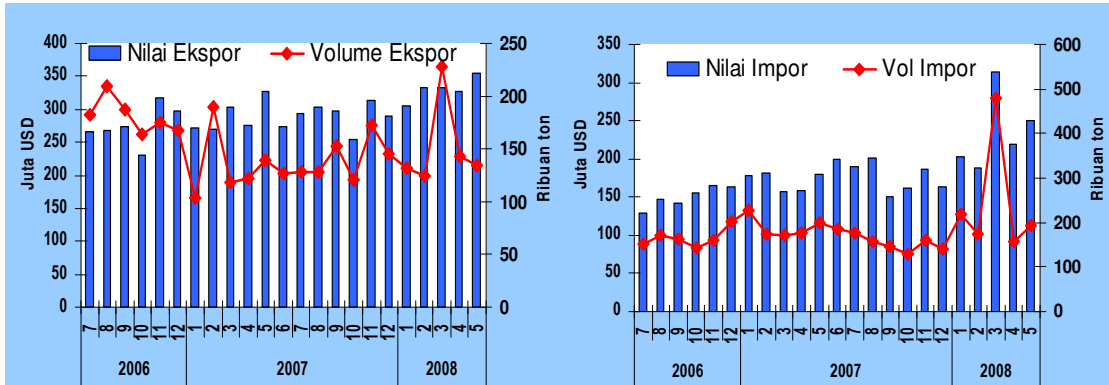
### 1.3. Ekspor Neto

Pertumbuhan ekspor<sup>4</sup> pada PDRB Jawa Tengah triwulan II-2008 mencatat pertumbuhan sebesar 1,21% (yoy), sedangkan impor mengalami kontraksi sebesar -6,44% (yoy). Kontraksi pada impor ini menyebabkan pertumbuhan ekspor netto yang cukup tinggi, yaitu sebesar 501,01%.

Sementara itu berdasarkan data ekspor dan impor yang diolah dari Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter (DSM) Bank Indonesia, kinerja ekspor non migas Jawa Tengah pada April-Mei 2008 tercatat sebesar USD 682,1 juta, meningkat sebesar 12,97% dibandingkan nilai ekspor non migas pada posisi yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang cukup signifikan tersebut didorong pula oleh

<sup>4</sup> Pengertian ekspor dan impor dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar propinsi

peningkatan harga komoditas di tingkat internasional yang mengalami peningkatan. Sementara dari sisi volume ekspor, hanya terjadi peningkatan sebesar 0,06% pada posisi April-Mei 2008.



Sumber : DSM Bank Indonesia

Sumber : DSM Bank Indonesia

**Grafik 1.15. Perkembangan Ekspor Jawa Tengah**

**Grafik 1.16. Perkembangan Impor Jawa Tengah**

**TABEL 1.2.  
PERKEMBANGAN REALISASI EKSPOR NON MIGAS MENURUT KELOMPOK HS 2  
PROPINSI JAWA TENGAH (USD RIBU)**

Komoditas Berdasar Klasifikasi HS 2	Tw I-07	Tw II-07	Tw III-07	Tw IV-07	Tw I-08	Tw II-08*
94 - Perabot, Penerangan Rumah	178,997	166,752	147,712	149,803	209,793	156,212
62 - Pakaian Jadi Bukan Rajutan	143,141	139,125	150,988	144,348	157,339	99,866
44 - Kayu, Barang dari Kayu	102,903	119,620	98,501	91,972	101,821	81,491
55 - Serat Stafel Buatan	85,342	92,239	107,799	94,301	101,932	65,217
61 - Barang-barang Rajutan	37,721	42,969	52,727	51,477	49,265	31,349
52 - Kapas	52,443	51,105	52,541	45,262	48,042	29,820
85 - Mesin / Peralatan Listik	26,495	22,900	31,144	25,520	39,680	22,902
54 - Filamen Buatan	47,439	47,257	45,126	35,987	35,007	26,677
15 - Lemak&Miny. Hewan/Nabati	999	16,942	14,737	24,926	46,446	10,638
03 - Ikan dan Udang	19,435	21,405	20,399	24,975	22,664	23,960
Lainnya	149,984	157,802	172,201	167,584	158,258	133,964
<b>Total Nilai Ekspor</b>	<b>844,899</b>	<b>878,115</b>	<b>893,875</b>	<b>856,156</b>	<b>970,248</b>	<b>682,097</b>

Sumber : KBI Semarang (diolah dari PPDI DSM Bank Indonesia)

\* angka sementara(s.d Mei 2008)

Sementara itu nilai impor non migas pada posisi April-Mei 2008 tercatat sebesar USD 470 juta, meningkat sebesar 38,77% dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan nilai impor yang cukup signifikan tersebut disebabkan pula terutama oleh peningkatan harga komoditas barang impor. Karena

apabila dilihat dari sisi volume impor, pada posisi April-Mei 2008 dibandingkan pisis yang sama tahun lalu justru terjadi penurunan volume impor sebesar -0.06%.

Berdasarkan klasifikasi *Harmonized System* (HS), komoditi ekspor non migas terbesar di Jawa Tengah adalah komoditas perabot/penerangan rumah, diikuti oleh pakaian jadi bukan rajutan dan serat stafel buatan sebesar USD 99,94 juta. Sementara itu kapas, plastik serta mesin mekanik merupakan barang impor yang cenderung mendominasi impor Jawa Tengah. Selengkapnya bisa dilihat dari tabel berikut ini.

**TABEL 1.3.**  
**PERKEMBANGAN REALISASI EKSPOR NON MIGAS MENURUT KELOMPOK HS 2**  
**PROPINSI JAWA TENGAH (USD RIBU)**

Komoditas Berdasar Klasifikasi HS 2	Tw I-07	Tw II-07	Tw III-07	Tw IV-07	Tw I-08	Tw II-08*
52 - Kapas	135,923	104,802	104,902	109,076	133,207	77,561
39 - Plastik &Barang dari Plastik	27,179	28,861	32,258	35,558	36,200	59,493
84 - Mesin / Pesawat Mekanik	76,165	67,300	76,241	67,764	68,201	53,573
10 - Gandum-gandum	35,866	23,535	19,955	25,725	78,267	41,631
85 - Mesin / Peralatan Listik	33,256	42,835	53,665	39,791	49,592	33,543
04 - Susu, Mentega, Telur	18,243	25,112	26,781	24,254	21,077	17,868
60 - Kain Rajutan	12,856	18,828	23,465	21,495	18,367	17,347
55 - Serat Stafel Buatan	15,063	24,264	20,153	19,107	19,903	13,321
12 - Biji-bijian berminyak	9,730	19,733	8,156	12,219	24,395	12,888
72 - Besi dan Baja	11,845	11,512	8,718	12,747	19,593	12,612
Lainnya	140,482	172,161	166,617	143,368	234,761	130,172
<b>Total Nilai Impor</b>	<b>516,606</b>	<b>538,944</b>	<b>540,909</b>	<b>511,104</b>	<b>703,562</b>	<b>470,010</b>

*Sumber : KBI Semarang (diolah dari PPDI DSM Bank Indonesia)*  
*\* angka sementara(s.d Mei 2008)*

## 2. Analisis PDRB Sisi Penawaran

Dilihat dari sisi sektoral, pada triwulan laporan sebagian besar sektor perekonomian mengalami pertumbuhan positif. Berdasarkan kontribusi terhadap pertumbuhan, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah pada triwulan ini adalah sektor industri pengolahan sebesar 1,68%, diikuti sektor pertanian sebesar 1,25% dan sektor perdagangan,hotel dan restaurant (PHR) sebesar 1,21%. Sementara itu berdasarkan tingkat pertumbuhannya, pertumbuhan tertinggi adalah sektor jasa sebesar 8,80%, sektor keuangan sebesar 8,20%, serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,67%.

**TABEL 1.4**  
**PERTUMBUHAN PDRB JAWA TENGAH MENURUT LAPANGAN USAHA (YOY)**

No	Lapangan Usaha	I-07	II-07	III-07	IV-07	I-08*)	II-08**)
<b>Pertumbuhan Year on Year</b>							
1	Pertanian	9.39%	7.58%	1.45%	-8.78%	-3.43%	5.89%
2	Pertambangan & Penggalian	7.89%	8.79%	6.23%	2.79%	1.46%	2.03%
3	Industri Pengolahan	2.02%	4.15%	5.66%	10.37%	9.51%	5.32%
4	Listrik, Gas & Air Bersih	1.02%	7.71%	9.62%	8.65%	5.35%	3.19%
5	Bangunan	7.98%	7.38%	8.06%	5.56%	5.45%	6.04%
6	Perdagangan, Hotel & Restaurant	6.37%	6.35%	7.47%	5.99%	5.46%	5.77%
7	Pengangkutan & Komunikasi	8.23%	8.85%	6.95%	8.25%	7.10%	6.67%
8	Kuangan, Persewaan & Jasa Perush.	2.08%	5.13%	7.79%	12.29%	11.49%	8.20%
9	Jasa-Jasa	3.58%	4.19%	7.23%	11.60%	11.20%	8.80%
<b>Total PDRB</b>		<b>5.37%</b>	<b>5.85%</b>	<b>5.64%</b>	<b>5.53%</b>	<b>5.49%</b>	<b>6.04%</b>
<b>Kontribusi terhadap Pertumbuhan</b>							
1	Pertanian	2.05%	1.59%	0.30%	-1.64%	-0.78%	1.25%
2	Pertambangan & Penggalian	0.09%	0.10%	0.07%	0.03%	0.02%	0.02%
3	Industri Pengolahan	0.64%	1.33%	1.81%	3.34%	2.91%	1.68%
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0.01%	0.06%	0.08%	0.07%	0.04%	0.03%
5	Bangunan	0.43%	0.40%	0.45%	0.33%	0.30%	0.33%
6	Perdagangan, Hotel & Restaurant	1.33%	1.32%	1.56%	1.31%	1.15%	1.21%
7	Pengangkutan & Komunikasi	0.40%	0.43%	0.34%	0.42%	0.35%	0.33%
8	Kuangan, Persewaan & Jasa Perush.	0.07%	0.18%	0.28%	0.44%	0.40%	0.29%
9	Jasa-Jasa	0.36%	0.43%	0.74%	1.23%	1.10%	0.89%
<b>Total PDRB</b>		<b>5.37%</b>	<b>5.85%</b>	<b>5.64%</b>	<b>5.53%</b>	<b>5.49%</b>	<b>6.04%</b>

Sumber : KBI Semarang dan BPS Provinsi Jawa Tengah (data PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000)

Keterangan : \*) angka sementara      \*\*) angka sangat sementara (proyeksi KBI Semarang)

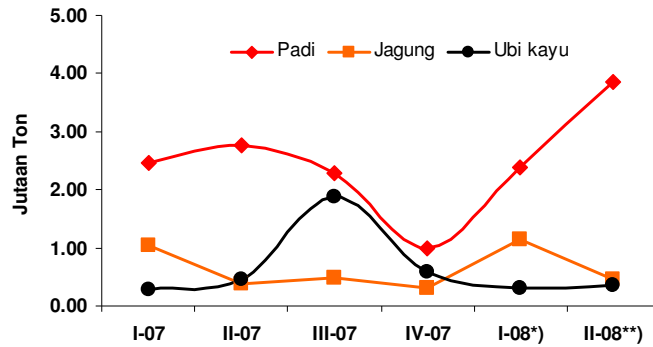
## 2.1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian dalam triwulan II-2008 diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 5,89%. Angka perkiraan pertumbuhan ini menunjukkan perbaikan dibandingkan pertumbuhan triwulan yang lalu yang tercatat sebesar -3,43%, namun lebih lambat dibandingkan angka pertumbuhan triwulan I-2007 sebesar 7,58%.

*Share of growth* atau kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah secara keseluruhan adalah sebesar 1,25%, atau terbesar kedua setelah kontribusi sektor industri pengolahan. Pendorong pertumbuhan sektor ini adalah sub sektor tanaman bahan makanan (tabama), terutama jenis padi yang mengalami masa panen di sebagian daerah. Masa panen ini mengalami kemunduran di beberapa wilayah Jawa Tengah terutama di wilayah pantai utara, disebabkan

bencana banjir di akhir tahun 2007 yang menggeser musim tanam. Selain itu faktor perubahan cuaca di kurun waktu 2007 hingga awal tahun 2008 juga memiliki andil terhadap pergeseran musim tanam. Sementara itu sub sektor perkebunan diperkirakan mengalami kontraksi seperti halnya beberapa triwulan sebelumnya, hal ini diantaranya disebabkan oleh masalah perubahan cuaca dan berkurangnya areal lahan perkebunan akibat konversi lahan.

**Prompt indikator** dari pertumbuhan sektor pertanian tercermin pada angka perkiraan produksi tanaman bahan makanan Propinsi Jawa Tengah dari Badan Pusat Statistik. Dari data tersebut terlihat adanya peningkatan produksi tabama pada triwulan ini dibandingkan produksi pada triwulan yang sama tahun lalu, khususnya pada jenis komoditas padi.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Grafik 1.17 Perkiraan Perkembangan Produksi Tabama di Jawa Tengah**

Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung padi nasional, yang menghasilkan sekitar 15% dari produksi padi nasional. Sehingga perkembangan produksi tabama khususnya padi di wilayah Jawa Tengah memiliki peranan yang penting bagi ketahanan pangan nasional. Berdasarkan angka ramalan II 2008, diperkirakan produksi padi di wilayah Jawa Tengah akan mengalami peningkatan sekitar 6% dengan asumsi musim yang lebih baik dibanding tahun 2007.

**TABEL 1.5.**  
**PERKEMBANGAN DAN PERKIRAAN PRODUKSI PADI DI JAWA TENGAH**

Item	Jan-Apr 07	Mei-Agst 07	Sept-Des 07	Jan-Apr 08	Mei-Agst 08	Sept-Des 08
<b>Luas Panen (Ha)</b>	629,386	725,516	259,196	816,836	652,716	212,320
<b>Produksi Padi (Ton)</b>	3,381,250	3,790,753	1,444,852	4,421,328	3,529,095	1,187,960

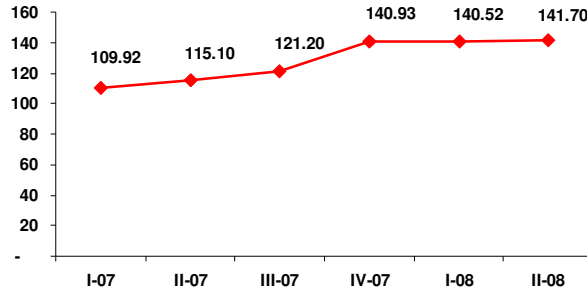
Sumber : BPS, diolah

Keterangan : data tahun 2007: ASEM 2007 data tahun 2008 : ARAM I 2008

Namun demikian salah satu hal yang patut diperhatikan adalah ancaman musim yang sukar untuk diprediksi selama beberapa periode terakhir. Ancaman musim kemarau dapat mengganggu debit saluran irigasi yang menjadi urat nadi pertanian di Jawa Tengah. Selain itu ketersediaan sarana penunjang pertanian seperti pupuk bersubsidi dan obat anti hama juga menjadi salah satu penentu kelangsungan produksi pertanian di Jawa Tengah. Padahal sektor pertanian ini merupakan salah satu penopang utama perekonomian Jawa Tengah, dan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar. Sehingga gangguan pada sektor ini dapat berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Guna meningkatkan kembali pertumbuhan sektor pertanian maka harus dilakukan upaya revitalisasi sektor pertanian yang komprehensif, meliputi perbaikan kondisi *on-farm* sektor pertaniannya sendiri serta peningkatan dukungan pada aktifitas *off-farm* melalui perbaikan peraturan/kebijakan dan meningkatkan dukungan pembiayaan dari perbankan. Selain itu penyediaan sarana produksi pertanian dan distribusi bahan baku maupun *output* pertanian merupakan upaya vital pula yang mendesak untuk dilakukan.

### 2.1. Sektor Industri Pengolahan

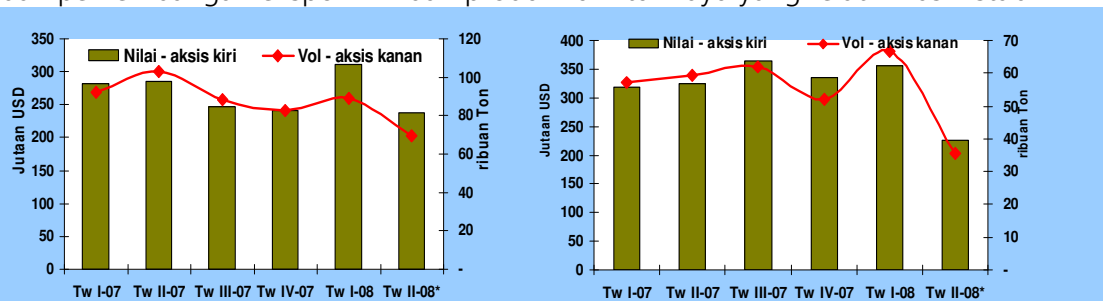
**Walaupun mengalami tekanan akibat kenaikan harga BBM industri yang telah berlangsung selama beberapa waktu, pada triwulan II-2008 sektor industri pengolahan di Jawa Tengah diperkirakan tetap mengalami pertumbuhan sebesar 5,32%.** Sektor industri pengolahan ini memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan perekonomian di Jawa Tengah, yaitu sebesar 1,68%. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh pertumbuhan sektor industri migas, akibat kenaikan harga produk migas. Sementara itu industri non migas tumbuh relatif moderat.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Grafik 1.18 Indeks Produksi Industri Pengolahan Minyak di Jawa Tengah**

Prompt indikator dari pertumbuhan sektor industri migas terlihat dari indeks produksi industri pengolahan minyak yang mengalami peningkatan semenjak awal tahun 2007. Sementara itu industri non migas masih ditopang oleh Industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri pengolahan produk kayu (furniture kayu) dan industri kimia. Prompt indikator pertumbuhan industri non migas terlihat dari perkembangan ekspor TPT dan produk furnitur kayu yang relatif masih stabil.



Sumber : DSM Bank Indonesia  
\* Data Tw II-08 s.d. Mei 2008

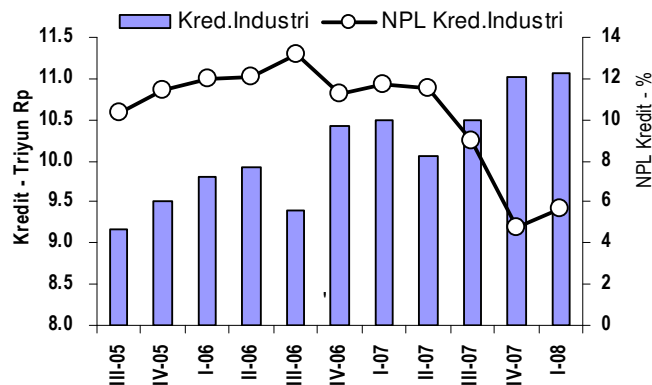
**Grafik 1.19 Perkembangan Ekspor Produk Kayu dan Furnitur di Jawa Tengah**

Sumber : DSM Bank Indonesia  
\* Data Tw II-08 s.d. Mei 2008

**Grafik 1.20 Perkembangan Ekspor TPT di Jawa Tengah**

Dari sisi pembiayaan perbankan, penyaluran kredit bank umum ke sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 24% (yoy). Posisi baki debit kredit sektor industri yang disalurkan oleh Bank Umum di Jawa Tengah mencapai Rp12,48 triliun, sementara itu rasio kredit non lancar (NPLs) juga menunjukkan trend perbaikan yaitu sebesar 3,94%.





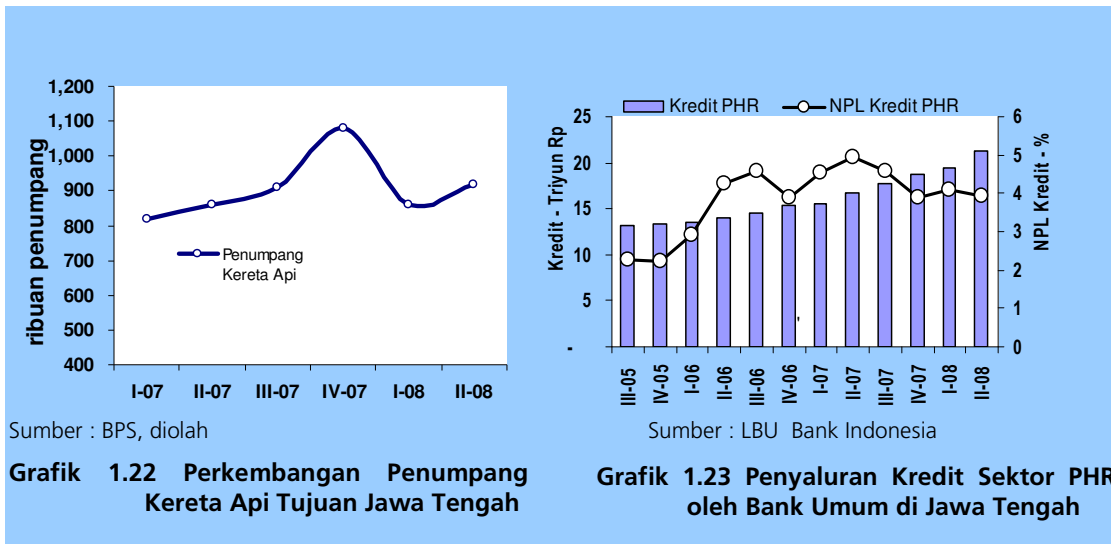
Sumber : LBU, Bank Indonesia

**Grafik 1.21. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektor Industri oleh Bank Umum di Jawa Tengah**

Pada triwulan II-2008, kenaikan harga BBM belum begitu menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perkembangan sektor industri pengolahan di Jawa Tengah. Namun dari hasil kegiatan survey *liaison* yang dilakukan oleh KBI Semarang, ditemukan fakta bahwa beberapa perusahaan mulai mengalami kesulitan akibat meningkatnya biaya produksi. Permasalahan tersebut berlanjut dengan krisis pasokan energi listrik di penghujung triwulan II-2008. Beberapa pengusaha memperkirakan apabila hal ini terus berlanjut dapat menyebabkan penurunan produksi antara 5-10% di akhir tahun 2008.

### 2.3. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR)

Pada triwulan II-2008 sektor PHR diperkirakan tumbuh sebesar **5,77% (yoy)**, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II-2007 yang tercatat sebesar **6,35% (yoy)**. Walaupun terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun lalu, namun secara umum pertumbuhan sektor PHR di Jawa Tengah relatif stabil di atas angka 5% (yoy). Situasi sosial politik dan keamanan di wilayah Jawa Tengah relatif stabil, termasuk ketika dilaksanakan even Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, sehingga mendorong terciptanya iklim bisnis yang kondusif. Pada triwulan II-2008 terdapat masa tahun ajaran baru sekaligus periode liburan, sehingga diperkirakan akan meningkatkan jumlah wisatawan atau orang yang berkunjung ke Jawa Tengah. *Event* PILKADA juga diperkirakan memberikan andil yang cukup signifikan pada perkembangan sektor ini, misalnya terhadap tingkat hunian hotel, sub sektor perdagangan dan bisnis restaurant.



**Pertumbuhan Sektor PHR terlihat dari peningkatan jumlah peningkatan jumlah penumpang kereta api yang menuju Jawa Tengah selama triwulan II-2008.** Dari grafik di atas terlihat jumlah penumpang yang menggunakan kereta api di wilayah Jawa Tengah cenderung meningkat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan sub sektor perdagangan, hotel dan restaurant.

**Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit sektor PHR oleh Bank Umum di wilayah Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 27,2% (yoy).** Pada posisi akhir Juni 2008, *outstanding* kredit sektor PHR yang disalurkan oleh Bank Umum di Jawa Tengah tercatat sebesar Rp 21,25 trilyun dengan rasio NPL sebesar 3,94%. Posisi tersebut relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan posisi *outstanding* dan NPL kredit sektor PHR pada triwulan II-2007 maupun triwulan I-2008.

#### 2.4. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada triwulan II-2008 diperkirakan mencapai pertumbuhan sebesar 8,20% (yoy). Pertumbuhan yang cukup signifikan ini terutama didorong oleh sub sektor bank yang mengalami perkembangan yang cukup pesat, terlihat dari membaiknya indikator kinerja perbankan, seperti dana pihak ketiga, *outstanding* kredit, LDR (*loan to deposit ratio*) serta kualitas kredit yang tercermin dari rasio NPL (*non performing loans*). Peningkatan beberapa indikator kinerja perbankan tersebut disebabkan diantaranya

oleh stabilnya kondisi ekonomi, suku bunga kredit perbankan yang cenderung menurun, serta kondisi sektor industri di Jawa Tengah yang tumbuh positif.

**Tabel 1.6**  
**Perkembangan Kegiatan Bank**

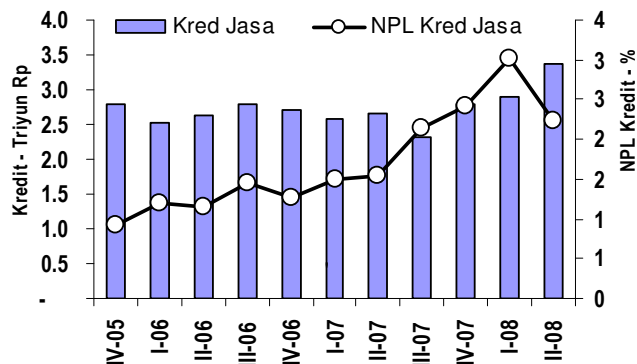
(dalam milyar Rp)

Indikator	II-07	III-07	IV-07	I-08	II-08	% YoY
Aset	86,483	86,228	85,696	87,417	91,281	5.55%
DPK	69,553	67,647	69,492	69,886	73,706	5.97%
- Giro	12,526	13,373	12,246	12,772	12,971	3.55%
- Tabungan	29,041	29,045	32,729	31,971	34,160	17.63%
- Deposito	27,986	25,229	24,516	25,143	26,574	-5.05%
Kredit	56,214	54,515	56,707	58,475	65,406	16.35%
LDR (%)	80.82	80.59	83.68	83.67	88.74	9.80%
% NPL (%)	5.73	5.27	3.19	3.34	3.06	-46.56%

Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

## 2.5. Sektor Lainnya

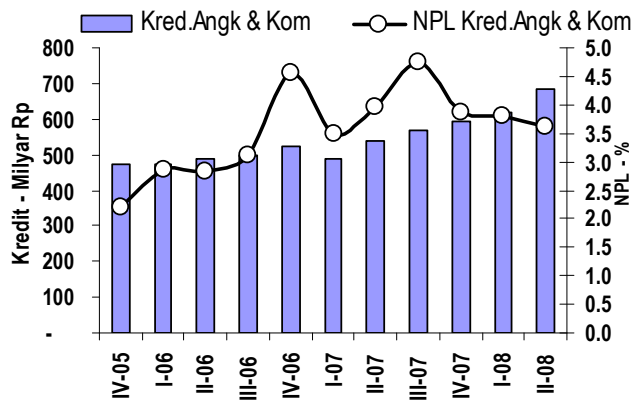
**Sektor jasa-jasa pada triwulan ini diperkirakan tumbuh sebesar 8,80% (yoy), dan merupakan sektor dengan pertumbuhan yang terbesar.** Pertumbuhan sub sektor jasa pemerintah didorong oleh realisasi belanja pemerintah yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan realisasi belanja ini diantaranya untuk kegiatan PILKADA dan kegiatan rutin lainnya. Sementara itu, pertumbuhan sub sektor jasa swasta diantaranya disebabkan oleh pertumbuhan sektor PHR yang menyebabkan meningkatnya jasa perseorangan dan rumah tangga.



**Grafik 1.24** Perkembangan Penyaluran Kredit Sektor Jasa oleh Bank Umum di Jawa Tengah

Dari sisi pembiayaan perbankan, **outstanding penyaluran kredit sektor jasa-jasa oleh bank umum di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 26,4% (yoy)**. Dari data yang ada, terlihat bahwa penyaluran kredit sektor jasa-jasa ini relatif stabil. Walaupun rasio kredit non lancar menunjukkan trend peningkatan, namun pada akhir triwulan II-2008 rasio NPLs tersebut menunjukkan perbaikan.

**Sektor pengangkutan dan komunikasi pada triwulan II-2008 diperkirakan tumbuh sebesar 6,67% (yoy)**. Sektor ini merupakan salah satu sektor ekonomi yang cenderung memiliki trend pertumbuhan positif yang stabil. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat akan jasa telekomunikasi yang semakin meningkat, dan didukung oleh tersedianya tingkat harga yang cukup atraktif akibat persaingan ketat antar operator penyedia jasa komunikasi.



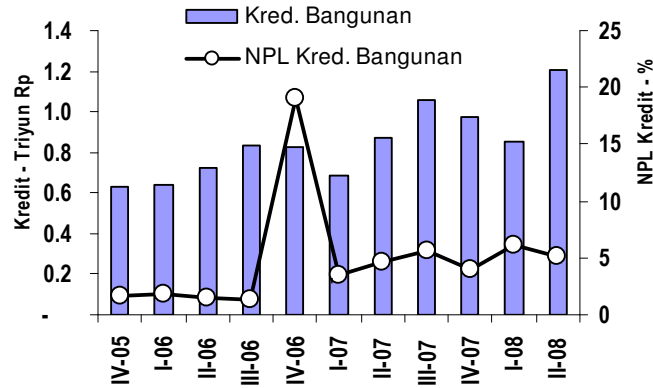
**Grafik 1.25. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektor Pengangkutan dan Komunikasi oleh Bank Umum di Jawa Tengah**

Dari sisi pembiayaan perbankan, **penyaluran kredit bank umum di Jawa Tengah untuk sektor angkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan sebesar 27% (yoy)**. Pertumbuhan kredit yang cukup tinggi tersebut merupakan salah satu indikator perkembangan sektor angkutan dan komunikasi di Jawa Tengah.

Pada periode triwulan II-2008, sektor bangunan diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 6,04% (yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan periode triwulan II-2007 yang tercatat sebesar 7,38%. Hal ini diantaranya disebabkan oleh peningkatan harga beberapa bahan baku bangunan menjelang kenaikan harga BBM sehingga menyebabkan pelaku usaha di sektor ini bersikap *wait and see*. Selain itu belum optimalnya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga ikut memberikan andil terhadap perlambatan ini.

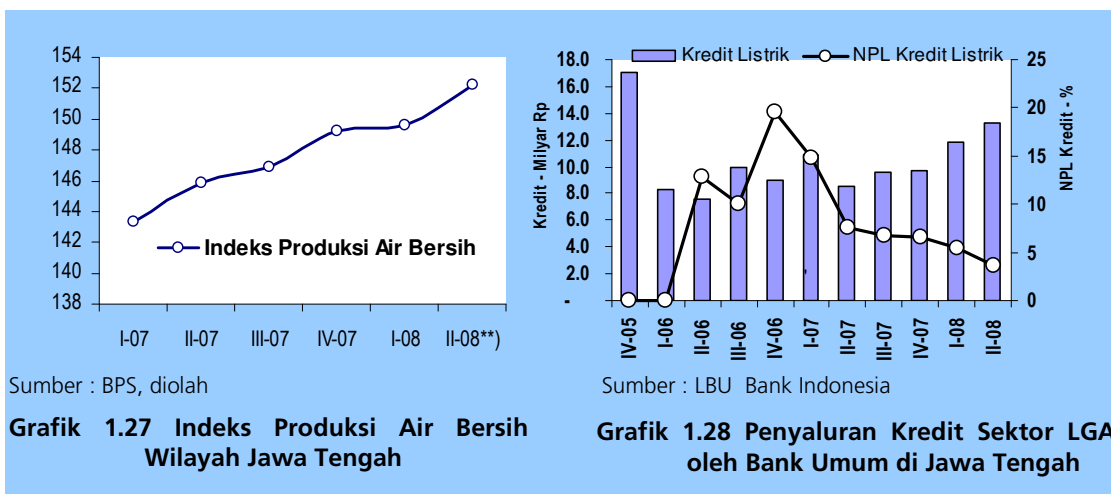
Namun demikian, sektor bangunan ini merupakan salah satu sektor yang

tumbuh relatif stabil di atas level 5% selama 2 tahun terakhir di wilayah Jawa Tengah. Selain itu kebutuhan properti baik untuk kebutuhan personal maupun bisnis membuat sektor bangunan ini tetap tumbuh positif dan relatif stabil.



**Grafik 1.26 Perkembangan Penyaluran Kredit Sektor Bangunan oleh Bank Umum di Jawa Tengah**

**Prompt indikator** dari perkembangan sektor bangunan dapat dilihat dari sisi pembiayaan perbankan, dimana posisi *outstanding* kredit sektor bangunan pada akhir triwulan II-2008 tercatat sebesar Rp 1,2 trilyun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 38,3% (yoy). Demikian pula rasio NPL juga menunjukkan trend perbaikan, peningkatan yang cukup signifikan.



**Sektor listrik, gas dan air (LGA) diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 3,19% (yoy).** Pendorong dari pertumbuhan ini terutama adalah sub sektor air bersih yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,36% (yoy). **Prompt indikator** dari

pertumbuhan sub sektor air bersih terlihat dari indeks produksi PDAM di wilayah Jawa Tengah. Prompt indikator lain dari perkembangan sektor ini adalah pertumbuhan pembiayaan perbankan di sektor LGA, yang memiliki outstanding kredit sebesar Rp13,26milyar dan angka pertumbuhan sebesar 55,1%



## BOKS:

### RINGKASAN EKSEKUTIF BUSINESS CLIMATE SURVEY (BCS) TAHUN 2007 DI PROVINSI JAWA TENGAH

*Business Climate Survey* (BCS) atau Survei Iklim Usaha tahun 2007 dilaksanakan ununtuk mengukur daya saing ekonomi dari 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah serta daya saing ekonomi dari 6 wilayah Karesidenan. Untuk wilayah karesidenan tersebut, BCS menggunakan pendekatan wilayah administratif yang digunakan zaman dahulu, yakni seperti eks Karesidenan Surakarta (yang kemudian lebih dikenal dengan nama "Solo Raya"), Pati, Semarang, Kedu, Banyumas dan Pekalongan.

Daya saing ekonomi didefinisikan berdasarkan beberapa sub-indeks seperti kinerja ekonomi, persepsi terhadap iklim usaha, infrastruktur, kapasitas pemerintah, efisiensi pemerintah dan dinamika usaha (*lebih lengkapnya lihat Diagram 1*). Masing-masing sub-indeks berisi satu set data yang diperoleh dari sumber-sumber data statistik dan dari 1.680 wawancara dengan para pemilik perusahaan serta para manajer perusahaan.

#### **Temuan Utama**

BCS 2007 menghasilkan temuan bahwa dunia usaha di Jawa Tengah merasa sangat optimis mengenai prospek bisnis di masa yang akan datang. Hampir 50% dari responden berkeyakinan bahwa ekonomi akan tumbuh pesat dalam dua tahun mendatang. Untuk Karesidenan Surakarta, di mana data-data perbandingan dari hasil BCS sebelumnya telah tersedia, persepsi positif terhadap prospek usaha telah mencapai tingkat tertinggi sejak tahun 2003.

Akan tetapi, persepsi optimis tersebut lebih didasari oleh persepsi yang cenderung negatif terhadap perkembangan usaha dalam dua tahun terakhir. Yaitu, 38% dari usaha yang ada memandang bahwa prospek bisnis saat ini lebih buruk dibandingkan dengan dua tahun yang lalu, sementara 35% memiliki persepsi positif terhadap prospek bisnis dalam dua tahun terakhir dan 25% tidak melihat adanya perubahan.

Peringkat daya saing secara keseluruhan menunjukkan adanya hasil yang rata-rata baik. Tidak ada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mencapai kinerja tertinggi dan tidak ada Kabupaten atau Kota yang berada pada tingkat terendah. Namun demikian, ditemukan hasil bahwa Kabupaten Cilacap menduduki peringkat tertinggi dan merupakan satu-satunya Kabupaten dengan skor di atas 6 yang

kemudian diikuti oleh Kota Magelang dan Kota Salatiga. 20 Kabupaten dan Kota berada pada tingkat medium (menengah) hingga tinggi, sedangkan 15 Kabupaten dan Kota lainnya mencapai tingkat medium hingga rendah. Kabupaten Kebumen menduduki peringkat paling akhir dengan skor 4.25 (*untuk lebih lengkap lihat Diagram 2*).

Masalah infrastruktur merupakan topik yang dominan di seluruh daerah. Berlawanan dengan survei tahun 2005 di wilayah Solo Raya dimana permasalahan yang mendominasi lebih beragam (transportasi, akses terhadap pendanaan, berbagai masalah regulasi), survei tahun 2007 mengidentifikasi masalah-masalah infrastruktur (transportasi, komunikasi, energi) sebagai hambatan utama di banyak daerah. Dengan demikian, responden menyatakan bahwa Pemerintah memiliki kapasitas yang sangat terbatas dalam hal perencanaan infrastruktur. Selain itu, persaingan usaha, berbagai masalah berkaitan dengan birokrasi dan penerimaan pegawai menduduki posisi atas dalam agenda kebanyakan daerah. Fakta bahwa persaingan usaha dianggap sebagai suatu masalah oleh banyak pengusaha menunjukkan bahwa cukup banyak usaha mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap iklim usaha yang lebih bersaing. Dari segi tingkat keseriusan masalah, akses terhadap bahan mentah, ijin usaha, akses terhadap pendanaan, korupsi, akses terhadap informasi pasar dan berbagai peraturan pasar tertentu menduduki peringkat yang tinggi.

Pengetahuan mengenai adanya Pusat Pelayanan Satu Pintu (*One Stop Service/OSS*) dan pemanfaatannya secara keseluruhan tergolong masih cukup rendah. Di Jawa Tengah, pengetahuan terhadap keberadaan OSS rata-rata mencapai 39%, dengan skor tertinggi diraih oleh Karesidenan Pekalongan dan Pati dengan 48%, sementara Karesidenan Surakarta memperoleh skor terendah dengan 29%. Kesadaran untuk menggunakan jasa OSS dari *target group*, yaitu usaha kecil dan menengah masih rendah, yaitu baru sekitar 50% dari mereka yang mengetahui keberadaan OSS dan juga memanfaatkan pelayanannya. Untuk Jawa Tengah, tingkat penggunaan pelayanan mencapai 19%, dimana Karesidenan Pekalongan dan Pati kembali memperoleh skor tertinggi dan Surakarta memperoleh skor terendah. Mayoritas pengguna OSS merasa puas dengan kualitas pelayanan dan lebih dari 25% berpandangan bahwa ijin usaha menjadi lebih murah setelah munculnya OSS.

Usaha kecil dan mikro jarang sekali berpartisipasi dalam organisasi bisnis seperti KADIN dan Asosiasi. Sekitar 40% dari usaha besar merupakan anggota aktif dalam asosiasi bisnis, sementara hanya sekitar 10% dari usaha mikro dan 19% dari usaha kecil yang menjadi anggota aktif. Hal ini kurang lebih seperti situasi ayam dan telur: bahwa alasan utama untuk tidak berpartisipasi karena adanya persepsi bahwa tidak ada asosiasi yang sesuai, namun tanpa adanya keanggotaan, akan sulit untuk



menggalang motivasi dalam organisasi bisnis yang ada untuk lebih berorientasi pada kepentingan usaha “mikro dan kecil”.

Mengenai akses kepada lembaga keuangan (bank dan non bank), secara keseluruhan untuk Jawa Tengah ditemukan bahwa, 63% dari perusahaan menyatakan saat ini mereka membutuhkan pinjaman. Proporsi dari usaha dengan kebutuhan pinjaman yang tertinggi adalah Karesidenan Kedu dengan 72%, diikuti oleh Pati dengan 71% dan karesidenan yang memiliki kebutuhan pinjaman yang terendah adalah Karesidenan Banyumas dengan 58% dan Surakarta dengan 59%. Tingkat kebutuhan pinjaman di kalangan pengusaha di eks Karesidenan Surakarta tidak banyak berubah dalam dua tahun terakhir. Kabupaten Wonogiri dan Klaten menunjukkan peningkatan kebutuhan pinjaman tertinggi (sekitar +20%), sementara Kabupaten Sragen menunjukkan penurunan yang signifikan (-14%).

Kebutuhan kredit hampir sama ditingkat usaha skala mikro, kecil dan menengah (sekitar 65%), sementara kebutuhan kredit bagi usaha skala besar masih dipandang kecil (sekitar 52%). Kebutuhan pinjaman tertinggi ada pada sektor manufaktur (68%), diikuti oleh sektor jasa (59%) dan sektor perdagangan (55%). Sekitar 51% dari responden di Jawa Tengah pernah mengajukan pinjaman dalam 5 tahun terakhir. Dengan demikian, terdapat selisih 12% perusahaan yang saat ini memiliki kebutuhan pinjaman, namun hingga kini tidak pernah mengajukan pinjaman. Secara keseluruhan, tingkat pengajuan pinjaman tertinggi ada pada usaha skala menengah (58%), diikuti oleh usaha skala besar dan kecil (sekitar 54%). Usaha mikro memiliki tingkat pengajuan pinjaman terendah dengan 40%.

Hasil dari survei mengenai tingkat kemudahan proses pengajuan pinjaman cukup mengejutkan, dimana mayoritas dari semua usaha yang pernah mengajukan pinjaman (74%) merasa proses pengajuan tersebut cukup mudah. Persepsi dalam hal ini bahkan lebih positif di kalangan usaha mikro (80% yang kemungkinan berkaitan dengan besarnya pinjaman) dibandingkan dengan usaha besar (68%). Hal yang cukup mengejutkan pula adalah hasil survei berdasarkan jenis kelamin, dimana 84% dari seluruh wanita pengusaha menilai proses pengajuan pinjaman tergolong mudah, sementara hanya 74% dari laki-laki pengusaha memiliki persepsi yang sama.

Persentase usaha yang pernah mengajukan pinjaman dalam 5 tahun terakhir dan berhasil memperoleh pinjaman ternyata cukup tinggi, yakni 85%. Rasio ini tertinggi untuk Karesidenan Surakarta (93%) dan terendah di Kedu (71%). Hal yang juga mengejutkan adalah bahwa skala usaha tidak terlalu berperan dalam hal ini (84% usaha mikro, 85% usaha skala besar). Dari segi jenis kelamin, tingkat persetujuan pinjaman tergolong lebih besar untuk usaha yang dimiliki oleh wanita dibandingkan dengan usaha yang dimiliki laki-laki.

## Rekomendasi

Terkait dengan berbagai temuan utama di atas, masih ada ruang untuk perbaikan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota guna meningkatkan daya saingnya. Pemerintah daerah dan *stakeholder* sektor swasta perlu untuk duduk bersama untuk mengembangkan strategi guna menanggulangi sejumlah kelemahan yang ditemukan. Untuk itu, beberapa BCS 2007 menghasilkan beberapa rekomendasi sbb..

- a. Pemerintah perlu menangani keterbatasan infrastruktur guna meningkatkan daya saing ekonomi.
- b. Menghilangkan pungutan informal dalam pemberian pelayanan yang dapat menghambat daya saing. Peningkatan transparansi dan penelaahan berbagai peraturan berhubungan dengan pemeriksaan perlu dilakukan untuk menghindari beban yang tidak diperlukan dan ekonomi biaya tinggi, terutama untuk usaha skala menengah-besar.
- c. Peraturan pajak dan peraturan khusus untuk sektor-sektor tertentu sebagai peraturan yang paling menghambat perlu ditelaah kembali. Evaluasi yang lebih rinci terhadap masalah berkaitan dengan peraturan-peraturan ini diperlukan, diikuti dengan penelaahan ulang terhadap sejumlah peraturan yang menghambat.
- d. Tingkat kepatuhan yang rendah dari usaha mikro dan kecil dalam hal perijinan usaha membutuhkan upaya yang lebih besar untuk mendorong kepatuhan (perkembangan dalam peraturan pajak mungkin dapat dijadikan contoh) atau penyesuaian kerangka peraturan untuk mengurangi persyaratan perijinan, terutama bagi usaha mikro.
- e. Pusat pelayanan satu pintu (OSS) untuk ijin usaha harus mampu menjangkau kelompok sasaran yakni usaha kecil dan mikro.
- f. Sektor agribisnis dan pariwisata perlu perhatian mendesak guna menghindari penurunan daya saing lebih jauh lagi. Apabila institusi daerah dan kewilayahan di Surakarta dapat memperkenalkan strategi baru untuk mengembangkan pariwisata seperti yang terjadi di tahun 2007, maka para pengusaha sektor pariwisata lokal akan didorong untuk memperkenalkan berbagai produk yang lebih sesuai di masa yang akan datang dan membuat sektor ini secara keseluruhan lebih dinamis.
- g. Seluruh sektor membutuhkan iklim usaha yang lebih mendukung. Perbaikan iklim usaha dapat memberikan manfaat secara keseluruhan bagi semua sektor. Pemerintah daerah dan asosiasi bisnis perlu merancang ulang dan menemukan kembali berbagai kegiatan pendukung serta bertindak secara lebih strategis guna mengembangkan sektor-sektor tradisional andalannya.

- h. Pasar kredit di Jawa Tengah tampaknya berfungsi dengan baik. Namun demikian, pemerintah masih perlu terlibat dalam berbagai program pinjaman, khususnya untuk usaha mikro dan kecil, yang belum pernah berhubungan dengan lembaga keuangan.

*(BCS 2007 dilaksanakan dalam catur wulan terakhir tahun 2007 sebagai inisiatif bersama antara Program Pengembangan Ekonomi Wilayah (Regional Economic Development) GTZ, Harian Umum Suara Merdeka, Kantor Bank Indonesia Semarang dan Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah, diluncurkan pada bulan Juli 2008)*



Halaman Ini sengaja dikosongkan  
*(This page is intentionally blank)*

## Bab 2

# Perkembangan Inflasi

**Berdasarkan penghitungan BPS Provinsi Jawa Tengah, laju inflasi Jawa Tengah triwulan II-2008 tercatat sebesar 9,01% (yoy)<sup>5</sup>, lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan I-2008 sebesar 7,95%.** Laju inflasi Jawa Tengah triwulan II-2008 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi nasional dalam triwulan yang sama sebesar 10,03% (yoy). Tingginya laju inflasi dalam triwulan II-2008 tersebut dipicu oleh naiknya harga BBM sehingga memicu inflasi bulanan di bulan Juni 2008 mencapai 2,31% (mtm). Inflasi tersebut jauh lebih tinggi dari inflasi bulan Mei 2008 sebesar 1,21% (mtm).

Dengan demikian, dalam 6 bulan pertama tahun ini laju inflasi di Jawa Tengah, hanya inflasi bulan April 2008 yang berada di bawah 1%, yaitu 0,35% (mtm). Laju inflasi 5 bulan lainnya berada di atas 1%, yang menunjukkan tingginya laju inflasi selama triwulan I dan triwulan II tahun ini. Inflasi kumulatif Januari-Juni 2008 pun dicatat oleh BPS Jateng mencapai 6,18% (ytd), lebih tinggi dari inflasi kumulatif periode yang sama tahun 2007 sebesar 2,55%.

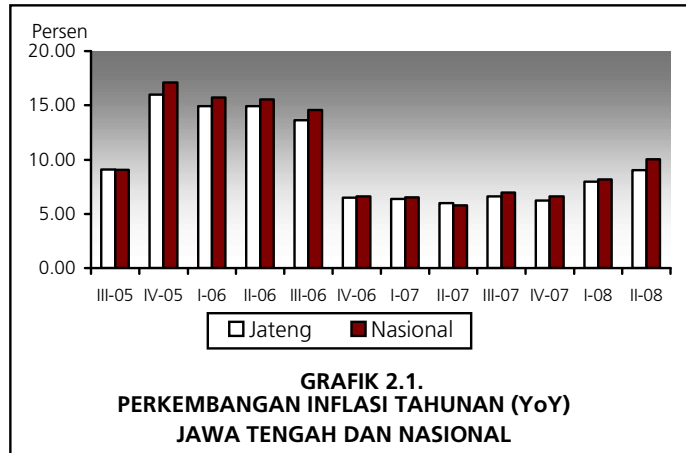
**Meningkatnya tekanan inflasi triwulan II-2008 tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan harga BBM pada bulan Mei 2008 yang kemudian memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya.** Di samping itu, masih cukup tingginya tekanan dari sisi eksternal berupa masih cukup tingginya harga minyak dunia dan harga beberapa komoditas lain seperti pangan, besi dan *crude palm oil* (CPO) selama triwulan II-2008 juga memberikan andil inflasi yang cukup signifikan. Di level daerah, tekanan muncul disebabkan oleh faktor distribusi yang kurang lancar dan *supply shock* beberapa komoditas, serta ekspektasi masyarakat yang mengarah kepada terjadinya kenaikan harga setelah kenaikan harga BBM. Kondisi ini perlu memperoleh perhatian serius pemerintah dan BI untuk mengendalikan laju inflasi agar tetap rendah dan stabil hingga akhir tahun. Meskipun tidak mungkin berada dalam kisaran  $6\% \pm 1\%$ , namun tekanan inflasi 6 bulan ke depan diharapkan dapat

---

<sup>5</sup> BPS telah melakukan perubahan metode penghitungan angka inflasi yang diterapkan mulai angka inflasi Juni 2008 atau akhir triwulan II-2008. Perubahan tersebut antara lain berupa perubahan tahun dasar dari tahun 2002 menjadi tahun 2007, serta berubahnya komposisi komoditas yang dicacah sebagai dasar penghitungan inflasi. Dengan demikian, angka inflasi triwulan II-2008 dalam buku KER ini murni angka penghitungan BPS Jawa Tengah, kecuali diberi keterangan sebagai hasil estimasi KBI Semarang.

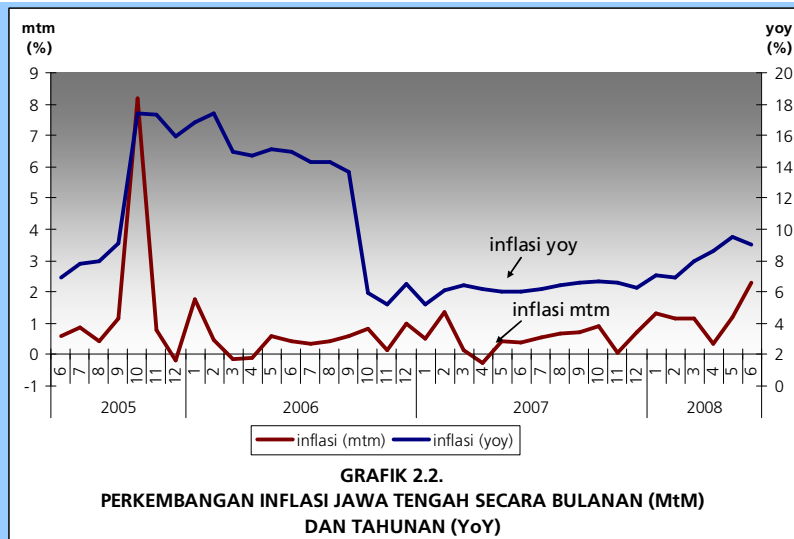
diredam dalam level  $11\% \pm 1\%$ . Tantangan ini cukup berat mengingat tekanan dari sisi eksternal dan internal diperkirakan masih relatif tinggi hingga akhir tahun.

Dengan tingginya tekanan terhadap laju inflasi dalam triwulan ini, maka pemerintah dan BI dihadapkan pada tantangan ke depan untuk dapat mencapai inflasi *single digit* di tahun-tahun mendatang. Laju inflasi dalam besaran *single digit* diharapkan memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Untuk itu, keseriusan para pelaku dan pembuat kebijakan ekonomi di Jawa Tengah dalam mendorong melakukan pembangunan ekonomi sangat diperlukan, khususnya dalam rangka mencapai sinergi antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal itu didasari dengan paradigma bahwa pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh stabilitas ekonomi menjadi pondasi terwujudnya *sustainable economic development* (pembangunan ekonomi yang berkelanjutan). Di sinilah telah strategisnya keterpaduan antar instansi dalam melakukan pemantauan dan pengendalian harga, yang diharapkan dapat berujung pada tercapainya laju inflasi yang rendah dan stabil.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan inflasi tahunan Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat dalam Grafik 2.1., sedangkan inflasi bulanan dan tahunan Jawa Tengah dapat dilihat dalam Grafik 2.2.



Sumber : Badan Pusat Statistik

## 2.1 Faktor-Faktor Penyebab Inflasi Tahunan (yoy) di Jawa Tengah

Laju inflasi di Jawa Tengah dalam triwulan II-2008 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I-2008, yaitu dari 7,95% (yoy) menjadi 9,01%. Peningkatan laju inflasi tahunan tersebut disebabkan oleh cukup tajamnya kenaikan harga beberapa kelompok barang dan jasa, yaitu kelompok transportasi, kelompok bahan makanan, dan kelompok perumahan. Apabila dilihat secara bulanan, inflasi tahunan yang cukup tinggi tersebut disebabkan oleh tingginya tekanan inflasi Jawa Tengah pada bulan Mei dan Juni 2008 masing-masing sebesar 1,21% dan 2,31% (mtm).

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi laju inflasi triwulan II-2008 antara lain adalah adanya kenaikan harga BBM, kurang lancarnya distribusi beberapa komoditi, faktor *imported inflation*, dan ekspektasi. Hal itu dapat terlihat dari meningkatnya inflasi *administered price* dan *volatile food*. Kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa ekspektasi masyarakat terbentuk oleh adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada Mei 2008. Hal tersebut dipicu pula oleh kurang lancarnya distribusi beberapa komoditas seperti minyak goreng, gula pasir, dan bahan makanan lainnya, serta distribusi gas elpiji di beberapa daerah seiring dengan program konversi minyak tanah ke gas elpiji. Kurang lancarnya distribusi juga dipengaruhi oleh masih adanya kerusakan jalur distribusi akibat banjir di awal tahun 2008.

Tingginya laju inflasi tersebut antara lain juga disebabkan oleh faktor eksternal berupa tingginya harga minyak dunia dan komoditas lain seperti pangan, besi dan CPO, yang masih berlanjut hingga triwulan II-2008. Meskipun faktor fundamental seperti kurs rupiah relatif stabil, tapi faktor *supply shock* dan ekspektasi masyarakat lebih dominan dalam memicu laju inflasi. Hal itu dapat dilihat dari kenaikan harga beberapa komoditas seperti minyak goreng, bawang merah, cabe merah, cabe rawit, serta beberapa bahan bangunan (batu bata, semen, besi). Seiring dengan kenaikan harga BBM, inflasi *administered prices* juga meningkat tajam.

Berdasarkan kelompok barang dan jasa, laju inflasi Jawa Tengah triwulan II-2008 secara tahunan terutama disebabkan oleh kelompok transportasi, kelompok bahan makanan, dan kelompok perumahan. Kenaikan IHK kelompok transportasi secara tahunan tersebut dipicu oleh naiknya harga BBM, seperti bensin, minyak tanah dan solar. Komoditas lain yang terkait langsung dengan naiknya harga BBM juga ikut mengalami peningkatan, yaitu tarif angkutan dalam kota, tarif angkutan antar kota, dan tarif taksi.

Kenaikan IHK kelompok bahan makanan secara tahunan tersebut dipicu oleh beberapa komoditas, yaitu minyak goreng, bawang merah, tepung terigu, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, cabe rawit, tahu mentah, susu bubuk, mie kering instan, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan (kacang tanah, tempe). Kenaikan IHK kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar terutama disebabkan oleh kenaikan IHK kontrak rumah, sewa rumah, tukang bukan mandor, bahan bangunan (seperti batu bata, semen dan besi), minyak tanah, dan upah pembantu RT.

IHK kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau juga mengalami kenaikan cukup signifikan seiring dengan naiknya harga BBM. Hal itu terutama disebabkan oleh kenaikan IHK komoditas rokok seiring dengan naiknya cukai mulai bulan April 2008, nasi, mie, soto, dan sate. Perkembangan inflasi Jawa Tengah bulanan dan tahunan dapat dilihat pada tabel 2.1.

**TABEL 2.1**  
**LAJU INFLASI JAWA TENGAH BULANAN DAN TAHUNAN**  
**MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA (PERSEN)**

NO	KELOMPOK BARANG & JASA	BULANAN (mtm)			TAHUNAN (yoy)		
		Apr-08	Mei-08	Jun-08	IV-07	I-08	II-08*)
1	Bahan Makanan	0.02	2.14	0.36	9.87	13.36	19-20
2	Mkn Jadi, Minuman, Rokok & Temb.	0.07	0.57	0.96	7.93	10.69	10-11
3	Perumh., Air, Listrik, Gas & Bhn Bakar	1.41	0.66	2.62	4.72	5.34	7-8
4	Sandang	-0.36	-0.07	0.55	7.11	9.69	8-9
5	Kesehatan	0.95	0.44	0.14	3.30	5.50	6-7
6	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	0.76	0.36	0.17	7.42	7.31	8-9
7	Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	-0.98	2.56	8.72	1.13	1.18	11-12
<b>UMUM</b>		<b>0.35</b>	<b>1.21</b>	<b>2.31</b>	<b>6.60</b>	<b>6.24</b>	<b>9.01</b>

Sumber: BPS, diolah

Keterangan: \*) angka inflasi umum adalah hasil penghitungan BPS, sedangkan angka inflasi tiap kelompok barang dan jasa adalah estimasi KBI Semarang

Terkait dengan perkembangan inflasi triwulan II-2008 tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan BI, antara lain yaitu kemungkinan masih berlanjutnya hambatan distribusi akibat kerusakan infrastruktur, tantangan untuk memenuhi kecukupan stok bahan pangan, dan terjaganya stabilitas nilai tukar yang dapat diharapkan dapat meminimalkan tekanan inflasi.

Menghadapi kondisi tersebut, Bank Indonesia menyadari pentingnya koordinasi dengan berbagai instansi di daerah. Beberapa hal yang telah dilakukan KBI Semarang dalam rangka membantu pengendalian inflasi di Jawa Tengah, KBI Semarang telah mengidentifikasi sumber dan faktor penyebab inflasi di daerah. Berdasarkan disagregasi inflasi selama 5 tahun terakhir, inflasi *volatile foods* dan



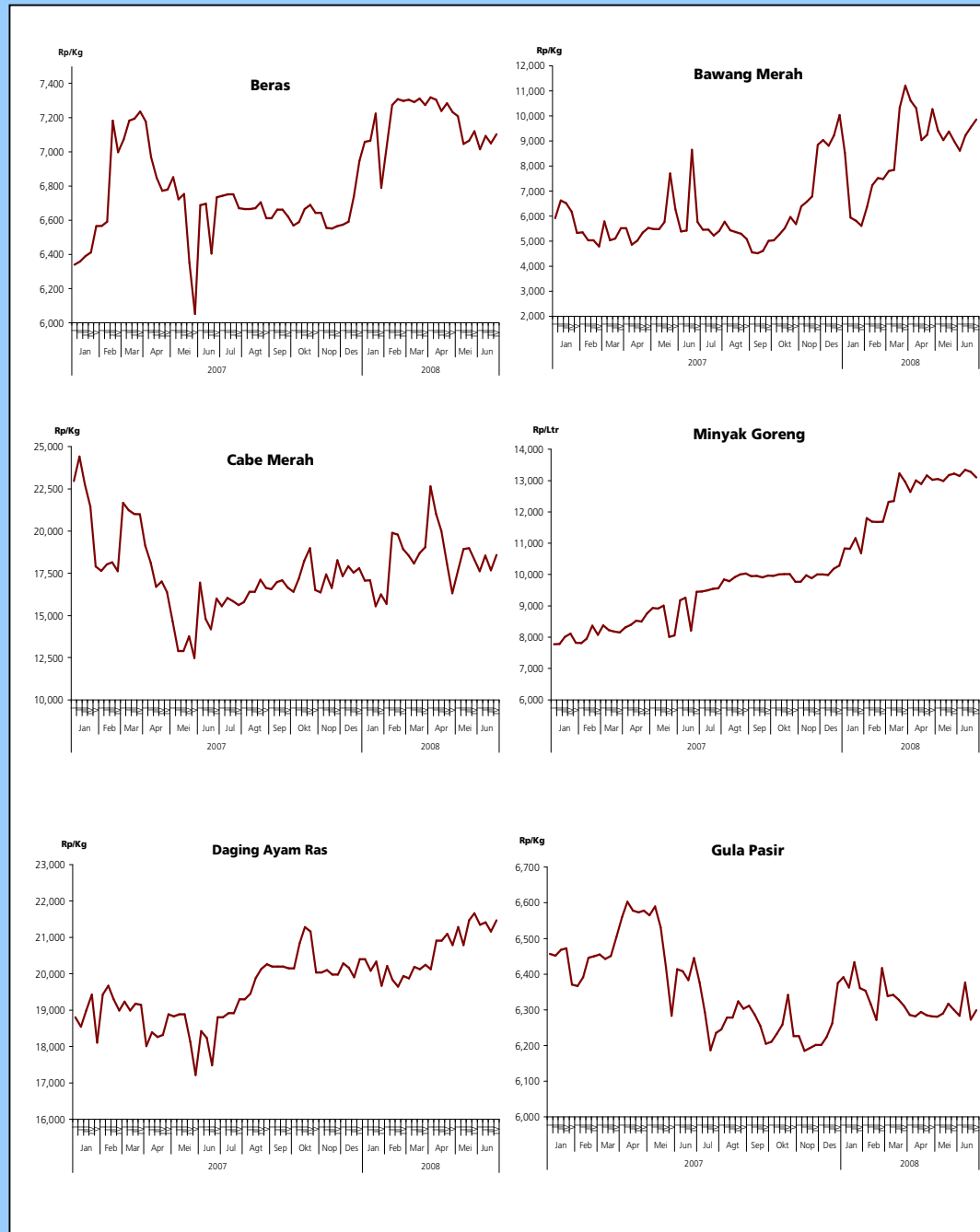
*administered prices* cukup dominan dalam mempengaruhi inflasi IHK Jawa Tengah. Oleh karena itu, ke depan KBI Semarang akan semakin meningkatkan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam memperbaiki distribusi dan pasokan beberapa komoditas serta membentuk ekspektasi masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih positif.

Koordinasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengambil tindakan pengendalian inflasi di daerah, antara lain berupa operasi pasar untuk beberapa komoditas (misalnya, minyak goreng), mempercepat perbaikan infrastruktur jalan, atau pengamanan stok beras oleh Bulog. Namun demikian, berdasarkan survey yang dilakukan, terdapat beberapa tantangan dalam pengendalian harga di daerah, antara lain berupa cukup dominannya pedagang dalam menentukan harga, tingginya tantangan mengelola ekspektasi masyarakat, dan dukungan infrastruktur di beberapa daerah yang kurang optimal.

**Apabila dilihat sumbangan inflasi menurut komoditasnya selama triwulan II-2008, berdasarkan survei yang dilakukan oleh KBI Semarang, beberapa komoditas yang diperkirakan memberikan sumbangan inflasi terbesar adalah bensin, solar, minyak tanah, tarif angkutan dalam kota dan antar kota, minyak goreng, gas elpiji, beras, daging ayam ras, nasi dan beberapa komoditas makanan jadi lainnya.** Tingginya sumbangan inflasi dari beberapa komoditas bahan makanan antara lain disebabkan oleh persediaan yang kurang mencukupi di beberapa daerah, sedangkan komoditas kelompok makanan jadi merupakan dampak dari kenaikan harga BBM.

Perkembangan harga beberapa komoditas tersebut sesuai dengan hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan KBI Semarang setiap minggu di beberapa pasar tradisional dan pasar modern di kota Semarang, yang menempatkan minyak goreng sebagai komoditas dengan kenaikan harga paling tinggi secara tahunan (yoy). Hasil SPH memperlihatkan perkembangan harga komoditas bawang merah yang cukup tajam sejak awal tahun 2008. Beberapa komoditas lain yang mencatat kenaikan harga secara tahunan cukup tinggi adalah daging ayam ras, telur ayam, emas, gula pasir, dan beras. SPH mencatat angka kenaikan harga minyak goreng secara tahunan (yoy) mencapai 46,93%, disusul oleh kenaikan harga bawang merah, bayam, telur ayam ras, dan tempe masing-masing sebesar 43,06%, 42,43%, 35,68% dan 32,45%. Dalam grafik 2.3. terlihat beberapa komoditas yang mengalami perkembangan harga sangat fluktuatif, sebagai hasil Survei Pemantauan Harga (SPH)

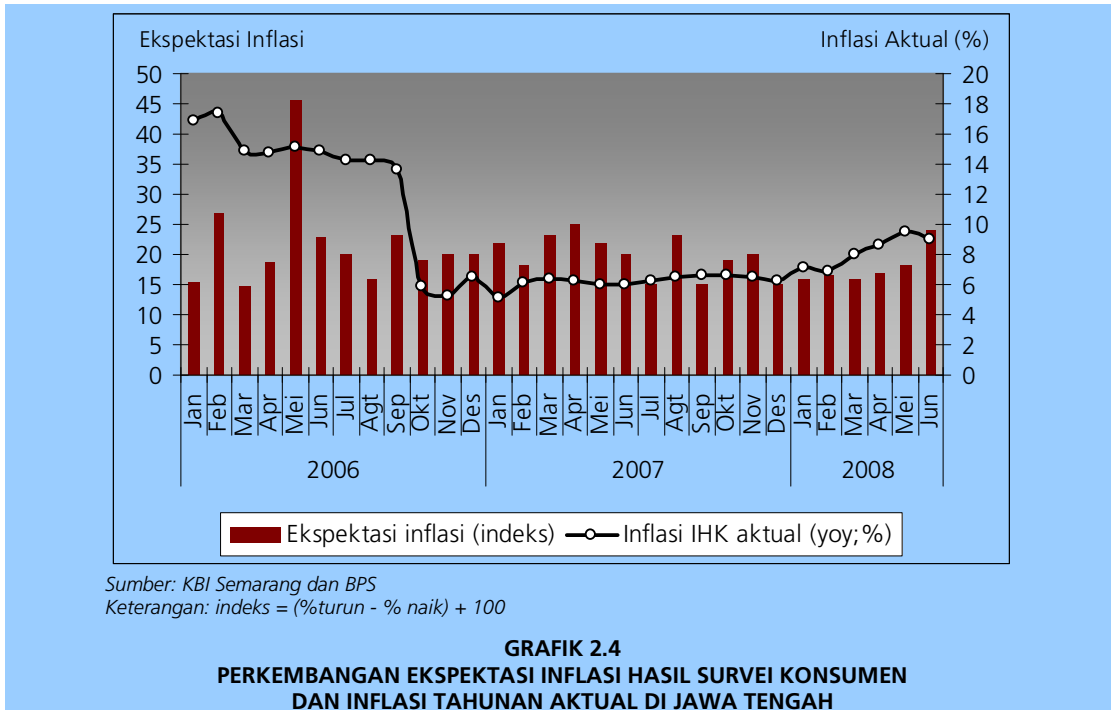
yang dilakukan KBI Semarang setiap minggu di beberapa pasar tradisional dan pasar modern di kota Semarang dapat dilihat pada Grafik 2.3.



Sumber: KBI Semarang

**GRAFIK 2.3**  
**PERKEMBANGAN HARGA BEBERAPA KOMODITAS STRATEGIS**  
**HASIL SURVEI PEMANTAUAN HARGA (SPH) MINGGUAN**  
**DI KOTA SEMARANG**

Berdasarkan Survei Konsumen, sebagian besar responden memperkirakan dalam triwulan ini akan terjadi inflasi tahunan yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Menurut responden survei, semua kelompok barang dan jasa akan mengalami peningkatan IHK yang cukup tinggi, terutama kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, dan kelompok perumahan. Perkembangan ekspektasi inflasi hasil Survei Konsumen dibandingkan dengan inflasi tahunan Jawa Tengah aktual setiap bulan dapat dilihat pada grafik 2.4.

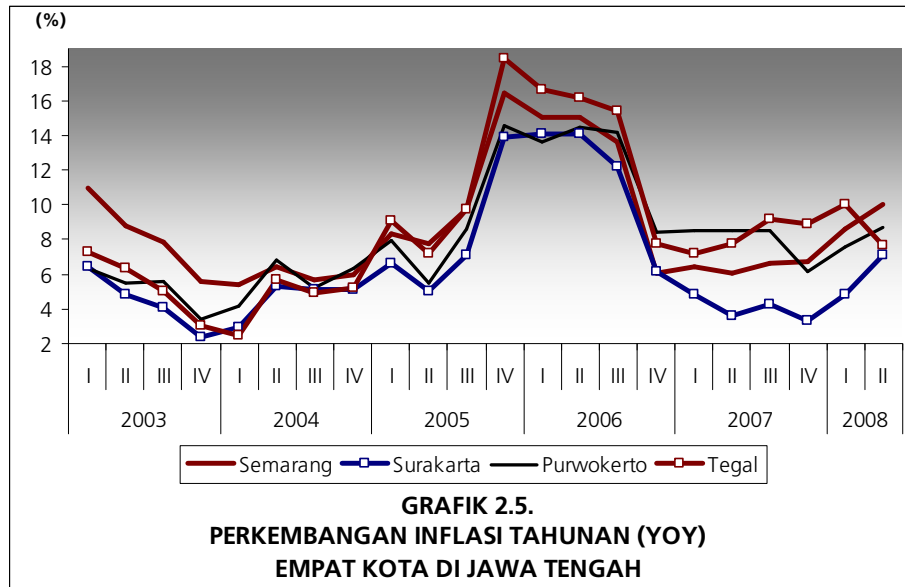


## 2.2. Faktor-Faktor Penyebab Inflasi Empat Kota di Jawa Tengah

Berdasarkan penghitungan BPS, laju inflasi tahunan (yoy) empat kota di Jawa Tengah yaitu di kota Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan Tegal pada triwulan II-2008 masing-masing sebesar 9,99%, 7,08%, 8,75% dan 7,64%. Hal itu memperlihatkan bahwa tiap kota memiliki pola dan karakteristik laju inflasi yang berbeda dengan kota lainnya. Kota Surakarta memiliki laju inflasi yang paling rendah, sedangkan Kota Semarang dengan laju inflasi paling tinggi. Kondisi ini tentunya memerlukan penanganan yang berbeda terhadap komoditas-komoditas yang menjadi penyumbang inflasi cukup dominan di setiap kota.

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, BPS mencatat bahwa laju inflasi di empat kota tersebut mengalami peningkatan laju inflasi yang cukup signifikan, kecuali kota Tegal yang sedikit menurun. Dalam triwulan ini tekanan harga beberapa

komoditas *volatile foods* dan *administered prices* tergolong cukup tinggi. Beberapa komoditas *volatile foods* penyumbang inflasi terbesar dalam triwulan ini antara lain adalah minyak goreng, bawang merah, nasi, telur ayam ras, daging ayam ras, tempe, tahu mentah, dan sayur-sayuran (bayam, kangkung, dll). Adapun inflasi *administered prices* disumbang oleh kenaikan harga BBM seperti bensin, solar, minyak tanah, serta tarif angkutan dalam kota dan antar kota. Perkembangan inflasi tahunan empat kota di Jawa Tengah setiap triwulan dapat dilihat pada grafik 2.5.



Sumber: BPS

Berdasarkan kelompok barang dan jasa, BPS mencatat bahwa di Kota Semarang, laju inflasi khususnya di bulan Juni 2008 terutama disumbang oleh kelompok transportasi yang mengalami kenaikan IHK sebesar 8,60% (mtm), diikuti oleh kelompok perumahan yang naik 2,80%. Kelompok komoditas yang memberikan sumbangan inflasi cukup nyata antara lain adalah kelompok transportasi sebesar 1,35%, serta kelompok perumahan dan kelompok makanan jadi masing-masing sebesar 0,73% dan 0,22%.

Di kota Surakarta, inflasi di bulan Juni 2008 khususnya dipicu oleh kenaikan IHK kelompok transportasi sebesar 10,14% (mtm), disusul oleh kelompok perumahan sebesar 2,67%. Sedangkan kelompok yang mengalami penurunan IHK (deflasi) adalah kelompok bahan makanan sebesar -0,52% (mtm). Kelompok komoditas yang memberikan sumbangan inflasi terbesar adalah kelompok transportasi sebesar 1,63%, diikuti oleh kelompok perumahan sebesar 0,62%. Adapun kelompok bahan makanan memberikan sumbangan deflasi sebesar -0,12%.

Di kota Purwokerto, BPS mencatat bahwa dari ketujuh kelompok komoditas, kelompok transportasi mengalami kenaikan paling tinggi

mencapai 9,02% (mtm), diikuti oleh kelompok perumahan dan kelompok bahan makanan masing-masing sebesar 2,74% dan 2,04%. Sedangkan kelompok pendidikan mengalami kenaikan IHK terendah sebesar 0,12%. Kelompok komoditas yang memberikan sumbangan inflasi terbesar adalah kelompok transportasi sebesar 1,22%, disusul oleh kelompok perumahan dan kelompok bahan makanan masing-masing 0,66% dan 0,52%.

Adapun di kota Tegal, BPS mencatat angka inflasi di kota tersebut sebagai yang terendah pada bulan Juni 2008 yaitu 1,82% (mtm). Inflasi tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan IHK pada kelompok transportasi sebesar 6,41%, kelompok bahan makanan 1,55%, dan kelompok perumahan 1,48%. Kelompok komoditas yang memberikan sumbangan inflasi cukup nyata adalah kelompok transportasi sebesar 0,82%, diikuti oleh kelompok perumahan dan kelompok bahan makanan masing-masing sebesar 0,37% dan 0,33%.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa dalam triwulan ini komponen *administered prices* (khususnya di kelompok transportasi) dan *volatile foods* menjadi determinan utama inflasi di setiap kota. Perkembangan laju inflasi tahunan di empat kota di Jawa Tengah terlihat pada tabel 2.2.

**TABEL 2.2.**  
**LAJU INFLASI TAHUNAN EMPAT KOTA DI JAWA TENGAH**  
**MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA (PERSEN)**

NO	KELOMPOK	SEMARANG			SURAKARTA			PURWOKERTO			TEGAL		
		IV07	I-08	II-08*	IV07	I-08	II-08*	IV07	I-08	II-08*	IV07	I-08	II-08*
<b>LAJU INFLASI (%)</b>													
1	Bahan Makanan	10.91	14.55	18-19	8.79	8.79	15-16	9.11	17.03	20-21	12.55	12.75	18-19
2	Makanan Jadi	8.21	11.97	10-11	3.52	3.52	5-6	10.82	8.24	7-8	15.05	17.09	13-14
3	Perumahan	5.61	6.01	9-10	4.08	4.08	6-7	2.66	2.46	3-4	4.89	6.22	5-6
4	Sandang	9.01	12.41	11-12	5.17	5.17	5-6	0.77	0.27	2-3	7.16	9.68	8-9
5	Kesehatan	3.15	6.59	8-9	3.17	3.17	4-5	6.60	5.70	7-8	2.71	3.98	6-7
6	Pendidikan	8.04	7.86	9-10	2.39	2.39	3-4	8.90	8.88	9-10	11.49	11.15	8-9
7	Transpor	0.67	0.67	11-12	2.16	2.16	10-11	2.51	2.36	10-11	0.62	1.04	11-12
<b>UMUM</b>		<b>6.59</b>	<b>6.75</b>	<b>11-12</b>	<b>3.28</b>	<b>4.88</b>	<b>9-10</b>	<b>6.15</b>	<b>7.57</b>	<b>9-10</b>	<b>8.89</b>	<b>10.04</b>	<b>10-11</b>

Sumber: BPS, diolah

Keterangan: \*) angka perkiraan KBI Semarang (angka inflasi tahunan per kelompok belum dapat dihitung secara pasti, terkait adanya perubahan penghitungan inflasi oleh BPS)

Halaman Ini sengaja dikosongkan  
(This page is intentionally blank)

## Bab 3

# Perkembangan Perbankan

**Kinerja perbankan (Bank Umum dan BPR) di Provinsi Jawa Tengah pada triwulan II-2008 mengalami perkembangan yang positif.** Hal tersebut tercermin dari meningkatnya indikator- indikator utama kinerja perbankan yaitu total aset, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun, dan kredit yang diberikan, serta *Loan to Deposits Ratio* (LDR). Kualitas kredit yang diberikan juga membaik, tercermin dari menurunnya *Non Performing Loans – NPLs Gross*.

**TABEL 3.1.**  
**PERKEMBANGAN INDIKATOR PERBANKAN**  
**DI PROVINSI JAWA TENGAH (BANK UMUM & BPR)**

INDIKATOR USAHA	2007			2008		PERT. JUN-08 (%)	
	JUN	SEP	DES	MAR	JUN	yoy	qtq
<b>1. Total Aset</b>	<b>86,483</b>	<b>92,551</b>	<b>93.197</b>	<b>94.342</b>	<b>99.100</b>	<b>14,58</b>	<b>5,04</b>
<b>2. DPK</b>	<b>69,553</b>	<b>72,106</b>	<b>74.845</b>	<b>74.783</b>	<b>78.761</b>	<b>13,23</b>	<b>5,31</b>
a.Giro	12,526	13,373	12.304	12.772	12.971	3,55	1,55
b.Tabungan	29,041	30,730	35.072	33.938	36.219	24,71	6,72
c.Deposito	27,986	28,003	27.469	28.073	29.571	5,66	5,33
<b>3. Kredit</b>	<b>56,214</b>	<b>59,808</b>	<b>62.333</b>	<b>64.040</b>	<b>71.397</b>	<b>27,00</b>	<b>11,48</b>
<b>4. LDR (%)</b>	<b>80.82</b>	<b>82.94</b>	<b>83,28</b>	<b>85,63</b>	<b>90,65</b>	-	-
<b>5. NPLs (%)</b>	<b>5.73</b>	<b>4.96</b>	<b>3,73</b>	<b>4,13</b>	<b>2,80</b>	-	-

Sumber : LBU, Bank Indonesia

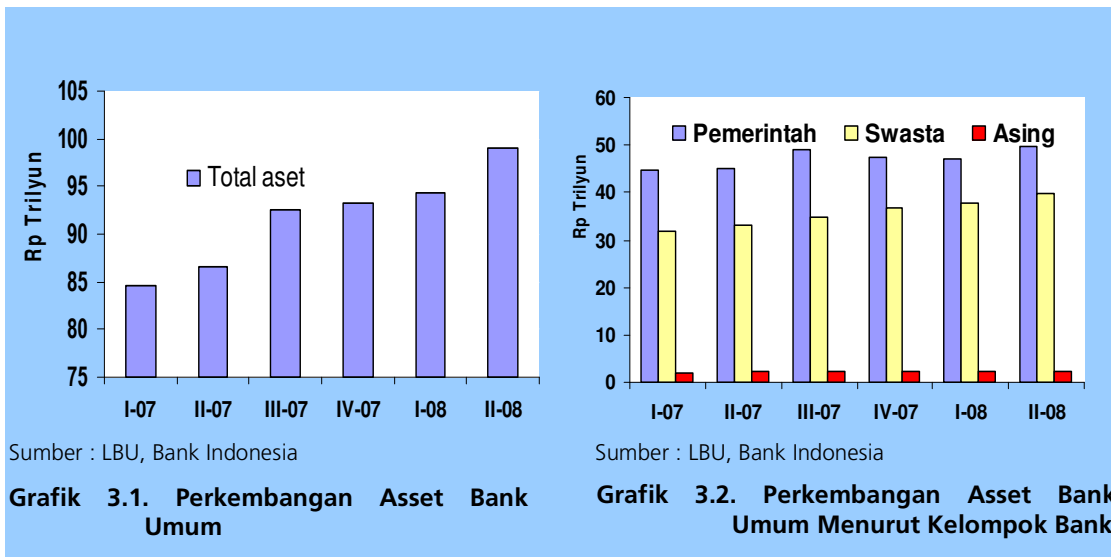
### 3.1 Fungsi Intermediasi Bank Umum

Mengingat porsi BPR terhadap perbankan di Jawa Tengah sangat kecil, maka pembahasan fungsi intermediasi perbankan ini lebih difokuskan kepada bank umum. Sebelum membahas fungsi intermediasi, akan diuraikan terlebih dahulu perkembangan aset bank umum di Jawa Tengah.

**Aset bank umum di Jawa Tengah dari triwulan ke triwulan terus meningkat. Pada triwulan II-2008 meningkat sebesar Rp11.379 miliar (14,14%) dibandingkan dengan triwulan II-2007, sehingga menjadi Rp91.822 miliar.** Andil terbesar dari peningkatan aset tersebut disumbang oleh bank pemerintah yaitu

sebesar 53,99%. Sedangkan bank swasta nasional dan swasta asing masing-masing sebesar 43,35% dan 2,66%.

Selain faktor jaringan kantor bank pemerintah yang jumlahnya relatif lebih banyak dibanding bank swasta nasional dan bank asing, faktor adanya bank lokal yaitu Bank Jateng juga menjadi penyebab besarnya peran bank pemerintah di Jawa Tengah. Sampai saat ini bank-bank pemerintah khususnya Bank Jateng masih menjadi pilihan utama pemerintah provinsi dan 35 pemerintah kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah dalam menyimpan dananya.



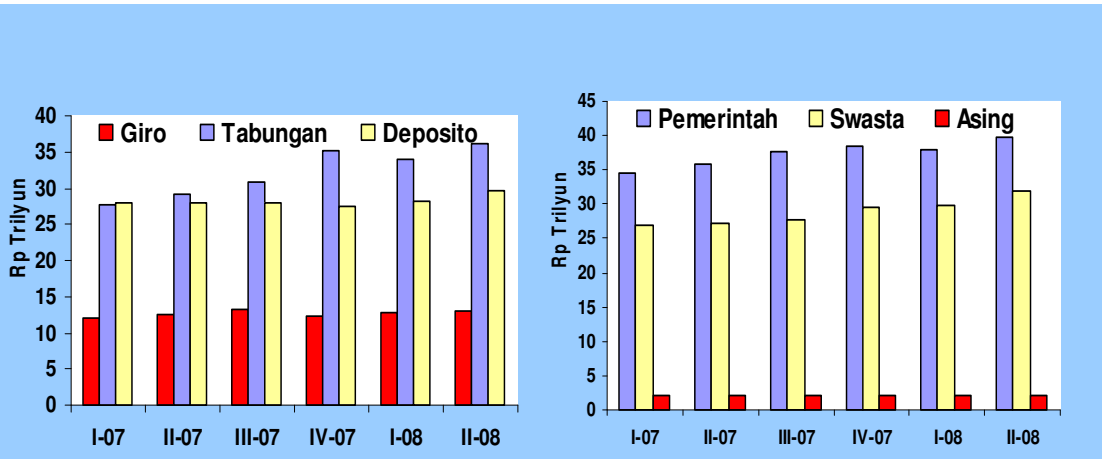
### 3.1.1 Penghimpunan Dana Masyarakat

**DPK bank umum di Jawa Tengah tumbuh positif meski sempat melambat pada triwulan sebelumnya.** Posisi DPK yang berhasil dihimpun bank umum di Jawa Tengah pada triwulan II-2008 mengalami pertumbuhan triwulanan sebesar 5,46%, meningkat dibanding triwulan I-2008 yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,30%. Peningkatan DPK terutama terjadi pada simpanan tabungan yang tumbuh sebesar 6,84% (qtq), diikuti simpanan deposito dan simpanan giro yang masing-masing tumbuh sebesar 5,69% (qtq) dan 1,55% (qtq). Secara tahunan, DPK yang berhasil dihimpun bank umum di Jawa Tengah pada triwulan II-2008 tumbuh sebesar 12,92% (yoy), sehingga menjadi Rp73.706 miliar.

**Peningkatan DPK lebih didorong oleh pertumbuhan yang cukup agresif dari simpanan perusahaan swasta.** Pada triwulan II-2008 ini simpanan perusahaan



swasta tumbuh 109,72% (yoy) dan 24,16% (qtq), dibanding simpanan perorangan yang hanya tumbuh sebesar 15,28% (yoy) dan 2,05% (qtq). Bahkan simpanan yang berasal dari pemerintah daerah mengalami kontraksi baik secara tahunan maupun triwulanan yaitu masing-masing sebesar -20,28% dan -14,03%. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor riil di Jawa Tengah khususnya UMKM masih *survive* ditengah-tengah kondisi perekonomian yang masih belum tumbuh sesuai yang diharapkan.

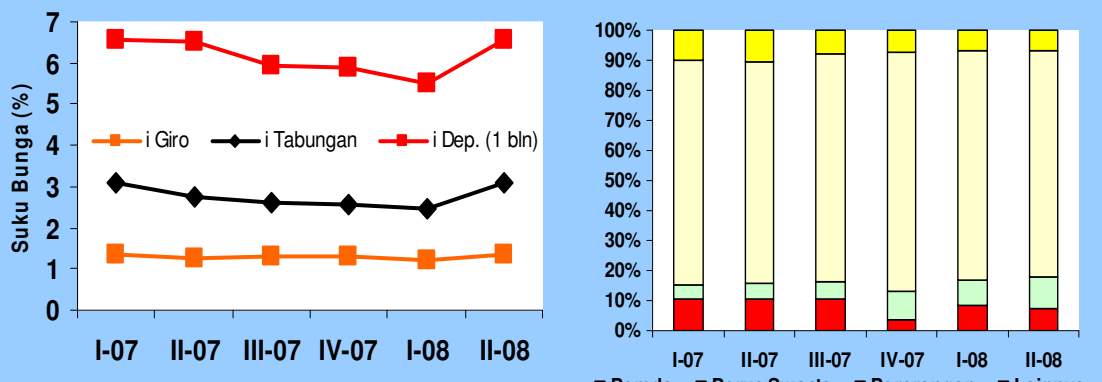


Sumber : LBU, Bank Indonesia

**Grafik 3.3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum**

Sumber : LBU, Bank Indonesia

**Grafik 3.4. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Menurut Kelompok Bank**



Sumber : LBU, Bank Indonesia

**Grafik 3.5. Perkembangan Suku Bunga Simpanan Perbankan Bank Umum**

Sumber : LBU, Bank Indonesia

**Grafik 3.6. Perkembangan Komposisi Kepemilikan Dana Pihak Ketiga Bank Umum**

**Peranan simpanan milik perorangan dalam penghimpunan DPK sangat dominan di Jawa Tengah.** Meskipun sempat mengalami penurunan, porsi DPK yang berasal dari perorangan sangat besar. Pada posisi triwulan II-2008 ini jumlah simpanan perorangan sebesar Rp55.491 miliar, atau sebesar 75,28% terhadap total DPK, padahal pada triwulan IV-2007 sempat pada posisi lebih tinggi yaitu 79,43%. Namun bila dibandingkan dengan triwulan II-2007 mengalami kenaikan mengingat porsi simpanan dari perorangan pada posisi tersebut sebesar 73,74% dari DPK.

Komposisi DPK Jawa Tengah terbesar adalah simpanan tabungan, diikuti simpanan deposito dan simpanan giro. Simpanan tabungan dari triwulan ke triwulan perannya selalu meningkat, menggeser peran simpanan deposito yang sempat mendominasi pada era sebelum tahun 2007. Pada triwulan II-2008, porsi simpanan tabungan adalah sebesar 46,34%, diikuti simpanan deposito dan simpanan giro masing-masing sebesar 36,05% dan 17,61%.

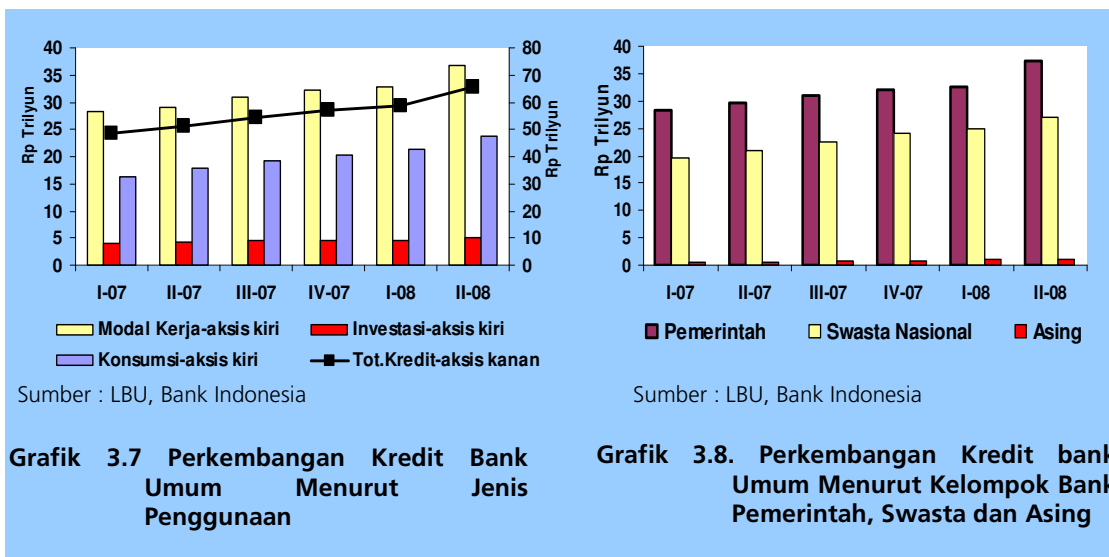
Pesatnya pertumbuhan simpanan tabungan ini cenderung lebih menguntungkan bank. Mengingat jenis simpanan ini memiliki biaya bunga yang lebih rendah dibanding simpanan deposito. Jenis simpanan tabungan dan juga giro, biasa disebut dengan *core deposits*. Sifat lain dari *core deposits* adalah relatif loyal dan tidak mudah berpindah ke bank/lembaga keuangan lain dibanding dengan *hot money* atau *funds purchased*. Sementara itu *hot money* memiliki karakter yang biasanya dimiliki nasabah penyimpan deposito, yaitu akan menyimpan pada bank/lembaga keuangan lain yang menawarkan *yield* atau tingkat suku bunga lebih tinggi.

Dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, lembaga keuangan bank masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabahnya. Selain sebagai lembaga yang menjalankan tugas intermediasi, perbankan juga semakin inovatif dalam mengembangkan produknya. Adanya *SMS banking*, *internet banking*, *Automatic Teller Machine (ATM)*, sistem pembayaran secara *real time*, dan jasa layanan lainnya yang saat ini masih *gres* yaitu *wealth management* dengan *priority banking*-nya, menjadikan nasabah perbankan enggan berpaling ke lembaga keuangan non bank.

### 3.1.2 Penyaluran Kredit

**Kredit yang disalurkan bank umum di Jawa Tengah cukup ekspansif sejalan dengan pertumbuhan DPK.** Pertumbuhan kredit pada triwulan II-2008 telah mencapai 27,48% (yoy). Pertumbuhan tersebut di atas target Bank Indonesia yang telah menetapkan pertumbuhan kredit secara nasional sebesar 18-20%. Secara triwulanan, kredit pada triwulan II ini tumbuh 11,85%, jauh di atas pertumbuhan kredit pada triwulan sebelumnya sebesar 2,55%.

**Porsi terbesar penyaluran kredit bank umum di Jawa Tengah masih dipegang oleh bank pemerintah yaitu sebesar 57,83%, diikuti bank swasta nasional sebesar 41,43%.** Sedangkan bank swasta asing hanya sebesar 0,74%. Bila dilihat pertumbuhan kredit secara triwulanan, bank pemerintah juga terlihat paling ekspansif. Pada triwulan II ini bank pemerintah tumbuh sebesar 14,64%, sedangkan bank swasta nasional dan asing masing-masing tumbuh sebesar 8,68% dan 0,39%.



**Penyerapan kredit modal kerja masih menjadi tumpuan pertumbuhan kredit di Jawa Tengah.** Kredit bank umum di Jawa Tengah pada triwulan II-2008 masih didominasi oleh Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu sebesar 56,15%, diikuti Kredit Konsumsi (KK) sebesar 36,21%. Sementara itu Kredit Investasi (KI) hanya sebesar 7,64%. Kredit modal kerja juga tumbuh lebih cepat dibanding jenis kredit lainnya. Secara triwulanan kredit modal kerja tumbuh sebesar 12,17%, sedangkan kredit konsumsi dan investasi masing-masing tumbuh sebesar 11,66% dan 10,40%. Tingginya kredit modal kerja ini mengindikasikan bahwa Jawa Tengah memiliki

banyak UMKM yang membutuhkan pembiayaan dari perbankan, meskipun diduga masih banyak lagi UMKM di Jawa Tengah yang belum tersentuh oleh perbankan.

**Bank Pemerintah masih menjadi tumpuan dalam penyaluran kredit modal kerja.** Dari total kredit modal kerja yang disalurkan di Jawa Tengah sebesar Rp36.732 miliar, sebanyak 52,39% (Rp19.246 miliar) disalurkan oleh bank pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya jaringan kantor yang dimiliki oleh bank-bank pemerintah yang menjangkau UMKM-UMKM di pedesaan/kecamatan.

**TABEL 3.2.**  
**PENYALURAN KREDIT MODAL KERJA BANK UMUM**  
**PER SEKTOR EKONOMI**

Sektor Ekonomi	I-07	II-07	III-07	IV-07	I-08	II-08
Pertanian	1,938	1,952	1,958	2,002	1,864	1,952
Pertambangan	29	41	29	31	44	41
Industri	9,126	8,626	8,966	9,439	9,499	10,750
Listrik, Gas, & Air	9	8	9	9	11	13
Konstruksi	587	743	903	903	789	1,121
PHR	14,061	15,244	16,178	17,186	17,765	19,580
Pengangkutan	153	167	182	214	229	274
Jasa Dunia Usaha	1,598	1,625	1,905	1,725	1,787	1,996
Jasa Sosial Masy.	385	391	404	400	377	428
Lainnya	295	329	389	366	381	577
<b>Total KMK</b>	<b>28,181</b>	<b>29,126</b>	<b>30,924</b>	<b>32,275</b>	<b>32,745</b>	<b>36,732</b>

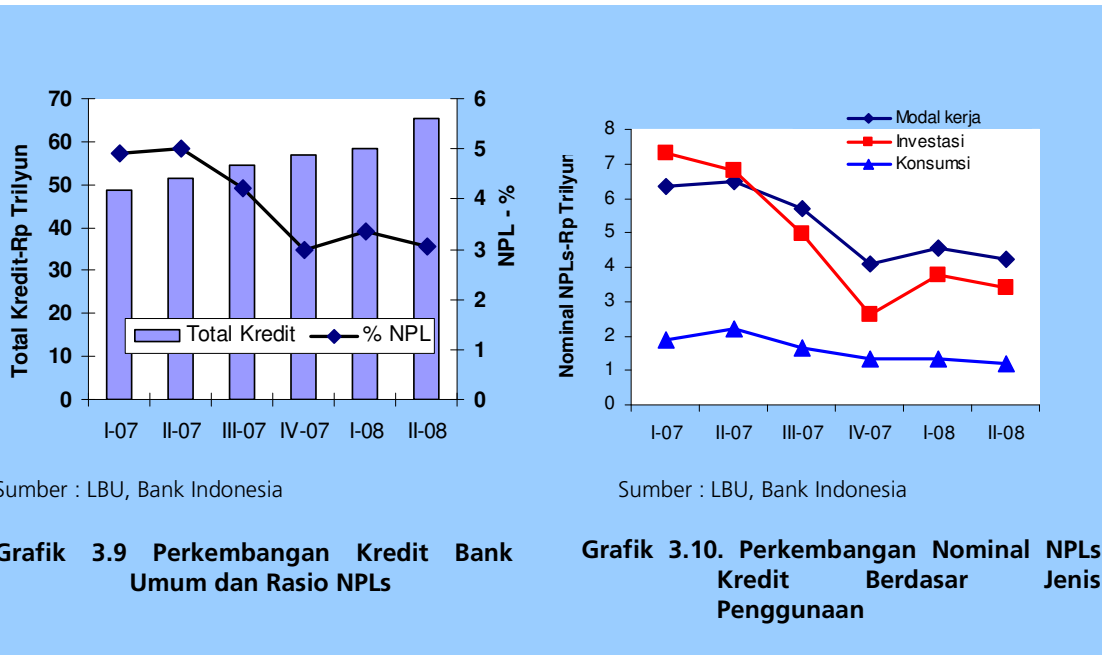
Sumber : LBU, Bank Indonesia

Penyaluran kredit modal kerja terkonsentrasi pada sektor Perdagangan, Hotel, & Restoran (PHR) khususnya perdagangan. Lebih dari separuh KMK disalurkan pada sektor PHR ini, yaitu 53,30%. Mungkin yang perlu dicermati adalah, ternyata lebih dari 82% KMK tersalur ke dua sektor ekonomi yaitu sektor PHR dan sektor industri. Meskipun demikian, jumlah kredit non lancar pada ke dua sektor besar tersebut tidak terlalu tinggi yaitu 4,01% untuk sektor PHR, dan 5,19% untuk sektor perindustrian. NPLs terbesar justru terjadi pada sektor transportasi dan sektor konstruksi, masing-masing sebesar 5,43% dan 5,41%.

### 3.2 Risiko Kredit

**Risiko kredit bank umum di Jawa Tengah cukup rendah.** Secara umum risiko kredit adalah risiko yang timbul dari kemungkinan si peminjam/debitur atau *counterparty* gagal dalam memenuhi kewajibannya. Pada triwulan II-2008 ini risiko kredit bank umum yang salah satunya tercermin dari rasio *Non Performing Loans (NPLs)-gross* mulai membaik. Meskipun pertumbuhan kredit tergolong cukup ekspansif, namun NPLs bank umum tergolong cukup rendah. Pada triwulan II-2007 NPLs bank umum berada di angka 5,00%, dan pada triwulan laporan ini turun menjadi 3,06%, di bawah NPLs yang dihimbau Bank Indonesia sebesar 5%.

**Kredit modal kerja menyumbang kredit non lancar terbesar.** Apabila dilihat dari jenis penggunaan, kredit modal kerja memiliki NPLs tertinggi, diikuti kredit investasi dan kredit konsumsi. NPLs kredit modal kerja bank umum di Jawa Tengah pada triwulan II-2008 sebesar 4,22%, diikuti oleh kredit investasi dan kredit konsumsi masing-masing dengan NPLs sebesar 3,38% dan 1,19%. Besarnya NPLs kredit modal kerja dan kredit investasi tersebut masih belum mengkhawatirkan dan masih dalam batas yang ditetapkan Bank Indonesia. Namun demikian perbankan wajib tetap hati-hati dalam menyalurkan kreditnya untuk menekan munculnya kredit non lancar baru.



**Grafik 3.9** Perkembangan Kredit Bank Umum dan Rasio NPLs

**Grafik 3.10.** Perkembangan Nominal NPLs Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

**TABEL 3.3.**  
**RASIO NPLs PER SEKTOR EKONOMI**

(%)

Sektor Ekonomi	I-07	II-07	III-07	IV-07	I-08	II-08
Pertanian	2.71	3.02	3.12	2.22	3.06	3.67
Pertambangan	2.14	1.83	0.88	0.68	0.72	1.03
Industri	11.69	11.50	8.98	4.76	5.70	5.03
Listrik, Gas, & Air	14.82	7.52	6.72	6.65	5.45	3.54
Konstruksi	3.42	4.71	5.63	3.94	6.09	5.12
PHR	4.54	4.94	4.58	3.89	4.11	3.94
Pengangkutan	3.50	3.96	4.75	3.88	3.80	3.61
Jasa Dunia Usaha	1.49	1.55	1.93	2.37	3.13	2.31
Jasa Sosial Masy.	2.32	3.03	2.94	2.55	2.55	1.99
Lainnya	1.90	2.21	1.68	1.35	1.39	1.22

Sumber : LBU, Bank Indonesia

**Kredit kepada sektor konstruksi memiliki NPLs tertinggi.** Sejalan dengan besarnya NPLs menurut jenis penggunaan yang didominasi oleh jenis kredit modal kerja dan kredit investasi, NPLs kredit menurut sektor ekonomi yang dibiayai juga terkait dengan kedua jenis penggunaan di atas. Secara sektoral, NPLs terbesar didominasi oleh sektor konstruksi dan sektor industri, yang nilainya di atas 5%. Namun demikian secara umum NPLs per sektor dalam triwulan II-2008 mengalami penurunan di banding triwulan-triwulan sebelumnya. Sesuai dengan hasil survei *Senior Credit Officer*, sektor yang paling buruk pengembalian kreditnya adalah sektor bangunan/perumahan dan sektor industri.

**TABEL 3.4.**  
**RASIO NPLs JENIS KREDIT MODAL KERJA PER SEKTOR EKONOMI**

(%)

Sektor Ekonomi	I-07	II-07	III-07	IV-07	I-08	II-08
Pertanian	2.66	3.01	3.13	2.17	2.79	3.48
Pertambangan	3.56	2.57	1.33	1.51	1.12	1.64
Industri	11.23	11.26	9.26	5.16	5.89	5.19
Listrik, Gas, & Air	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
Konstruksi	3.34	4.04	5.24	4.16	6.53	5.41
PHR	4.53	4.96	4.59	3.94	4.18	4.01
Pengangkutan	8.71	8.95	8.15	6.41	6.14	5.43
Jasa Dunia Usaha	1.54	1.75	2.11	2.69	2.78	1.86
Jasa Sosial Masy.	2.70	3.42	3.22	2.85	3.20	2.57
Lainnya	2.80	2.61	2.19	2.54	3.16	2.51
<b>Total NPLs KMK</b>	<b>6.36</b>	<b>6.46</b>	<b>5.69</b>	<b>4.11</b>	<b>4.56</b>	<b>4.22</b>

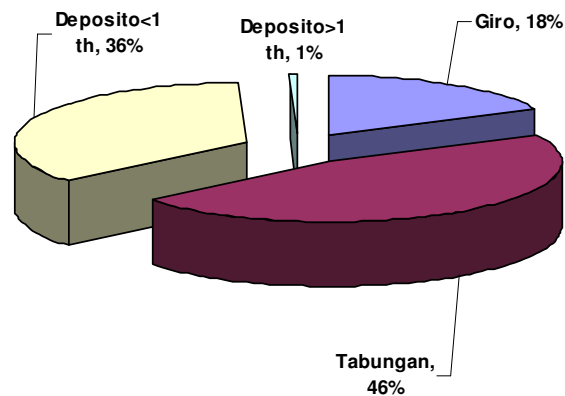
Sumber : LBU, Bank Indonesia

Secara umum risiko kredit perbankan di Jawa Tengah cukup rendah. Hal ini terlihat dari menurunnya NPLs sampai di bawah level aman menurut Bank Indonesia. Meskipun pertumbuhan kredit terbilang cukup ekspansif, yaitu pada kisaran 27,48% (yoy), perbankan tetap mampu mengamankan eksposur kreditnya sehingga tidak menjadi macet. Hal ini dikarenakan bank-bank telah menjalankan *prudential banking* dengan lebih baik. Namun demikian perbankan tetap harus mencermati faktor keuangan nasabah akibat pengaruh ekonomi global dan perubahan musim, yang dapat memicu tidak tertagihnya angsuran kredit.

### 3.3 Risiko Likuiditas

**Risiko likuiditas bank umum di Jawa Tengah masih rendah.** Pengelolaan likuiditas yang baik akan terlihat pada kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Bila likuiditas tidak dikelola dengan baik, bank akan dihadapkan pada risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Risiko likuiditas sendiri didefinisikan sebagai risiko dimana bank tidak akan dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Hampir seluruh DPK bank umum di Jawa Tengah adalah dana jangka pendek. Komposisi DPK secara berurutan dari terbesar adalah simpanan tabungan (46 %), simpanan deposito (36,05%), dan simpanan giro (18%). Bila dirinci lagi, simpanan deposito dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun sebesar 36%, sehingga secara keseluruhan struktur pendanaan jangka pendek bank umum sebesar 99,47%.



**Grafik 3.11. Komposisi DPK Bank Umum Triwulan II-2008**

Melihat struktur pendanaan bank umum di Jawa Tengah, menjadikan perbankan cukup berhati-hati dalam menanamkan dananya dalam *earning assets*,

khususnya kredit yang diberikan. Kehati-hatian perbankan di Jawa Tengah ini tercermin dari dominasi penyaluran kredit oleh kredit modal kerja yang berjangka pendek. Penyaluran kredit konsumsi juga cukup besar, atau terbesar kedua setelah kredit modal kerja, karena dianggap relatif lebih aman. Sementara itu kredit investasi yang porsinya cukup kecil, pertumbuhannya juga relatif lamban, karena sifatnya yang jangka panjang dan memiliki *risk exposure* yang lebih besar, serta berpotensi menimbulkan *mismatch*.

Dengan melihat struktur liabilitas yang didominasi dana jangka pendek, maka struktur aset secara tidak langsung harus menyesuaikan struktur liabilitas, dimana kredit didominasi oleh kredit jangka pendek. Kualitas *earning assets* juga relatif baik, dan tidak adanya dominasi nasabah inti, maka secara keseluruhan risiko likuiditas perbankan di Jawa Tengah relatif masih terjaga.

### 3.4 Risiko Pasar

**Risiko pasar bank umum di Jawa Tengah relatif rendah.** Risiko pasar adalah risiko yang berpengaruh terhadap bank yang disebabkan oleh pergerakan arah yang berlawanan dari tingkat bunga atau harga pasar (suku bunga, nilai tukar/kurs, atau harga komoditas/saham).

Perbankan lebih diuntungkan dengan relatif fleksibelnya suku bunga DPK, dalam artian lebih cepat menyesuaikan apabila terdapat penurunan suku bunga SBI. Sementara suku bunga kredit relatif lebih sulit untuk turun, tapi sangat fleksibel untuk naik. Kondisi tersebut menjadikan bank relatif lebih aman dalam memelihara *spread* marginnya, mengingat *spread* bunga saat ini masih cukup tinggi. Di sisi lain, tingkat suku bunga SBI yang masih lebih besar dibandingkan dengan suku bunga DPK, menjadi alternatif lain bagi bank dalam menanamkan dana *idle*-nya. Dengan kondisi tersebut maka fluktuasi suku bunga secara keseluruhan masih dapat dihadapi oleh bank. Kemungkinan risiko yang terjadi, hanya berkurangnya margin keuntungan bank.

Perbankan di Jawa Tengah relatif jarang memiliki eksposur valuta asing yang besar. Produk-produk derivatif juga relatif jarang dijumpai. Transaksi pasar uang yang terjadi biasanya ada di kantor pusat masing-masing bank, yang umumnya berlokasi di Jakarta. Dengan demikian risiko yang terkait dengan perubahan kurs, relatif cukup terkendali atau rendah. Apalagi Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan yang terkait



dengan pembatasan *exposure* valuta asing (PDN) dan aturan yang cukup ketat bagi bank yang melakukan pinjaman ke luar negeri.

### 3.5 Perkembangan Bank Umum Yang Berkantor Pusat Di Jawa Tengah

**Perkembangan bank umum yang berkantor pusat di Jawa Tengah pada triwulan II-2008 sedikit menunjukkan penurunan.** Terdapat dua bank umum yang berkantor pusat di Jawa Tengah yaitu PT Bank Jateng dan PT Bank Purbadanarta. Total aset kedua bank tersebut tercatat sebesar Rp12.908 miliar atau menurun sebesar -0,61% dibanding triwulan II tahun sebelumnya. Demikian pula apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya juga mengalami penurunan aset sebesar -0.68%. Kondisi ini menyebabkan *share*-nya terhadap total aset bank umum di Jawa Tengah juga menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dari 14,86% menjadi 14,05%.

**TABEL 3.5.**  
**PERKEMBANGAN BANK UMUM**  
**YANG BERKANTOR PUSAT DI JAWA TENGAH**

INDIKATOR USAHA	2007			2008		PERT. JUN-08 (%)	
	JUN	SEP	DES	MAR	MAR	yoy	qtq
1. a. Total Aset	12,988	13,454	12.487	12.997	12.908	-0,61	-0,68
b. <i>Share thd BU Jateng (%)</i>	16.15	15.60	14,44	14,86	14,05	-	-
2. a. Dana Pihak Ketiga	11,610	12,009	9.979	11.089	10.683	-7,98	-3,66
- Giro	4,720	4,847	3.763	4.478	3.706	-21,48	-17,23
- Tabungan	1,924	2,063	2.998	2.339	2.607	35,49	11,45
- Deposito	4,966	5,099	3.218	4.272	4.370	-12,00	2,29
b. <i>Share thd BU Jateng (%)</i>	17.79	17.75	14,23	15,86	14,49	-	-
3. a. Penyaluran Kredit	7,026	7,160	7.665	8.175	9.216	31,16	12,73
b. <i>Share thd BU Jateng (%)</i>	13.69	13.13	13,44	13,98	14,09	-	-
4. LDR (%)	60.52	59.63	76,81	73,72	86,26	-	-
5. NPL (%)	0.70	0.71	0,44	0,50	0,53	-	-

Sumber : LBU, Bank Indonesia

Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dalam triwulan ini tercatat sebesar Rp10.683 miliar, atau menurun -7,98% (yoy) dan -3,66% (qtq). Penurunan DPK ini terutama terjadi di Bank Jateng, disebabkan adanya peralihan sebagian dana pemerintah daerah kepada bank pemerintah lainnya. Sedangkan kredit yang disalurkan tetap mengalami peningkatan, yaitu sebesar 31,16% (yoy) dan 12,73%

(qtq). Pertumbuhan kredit yang cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK yang negatif, menjadikan LDR bank meningkat dari 73,72% menjadi 86,26%.

### 3.6 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

**BPR di Jawa Tengah terus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan bank umum.** Meskipun BPR memiliki kegiatan operasional yang sama dengan bank umum, namun BPR memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank umum. BPR memiliki prosedur pemberian kredit yang lebih sederhana dan lebih cepat, dan BPR lebih mengutamakan pendekatan personal. Dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, BPR di Jawa Tengah memiliki karakteristik yang berbeda. Sebagian BPR di Jawa Tengah dimiliki oleh pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi.

**TABEL 3.6.**  
**PERKEMBANGAN BEBERAPA INDIKATOR BPR**  
**DI JAWA TENGAH**

INDIKATOR USAHA	2007			2008		PERT. JUN-08 (%)	
	JUN	SEP	DES	MAR	JUN	yoy	qtq
1. Aset	6.002	6.323	6.776	6.864	7.278	21,25	6,03
2. DPK	4,257	4,459	4.746	4.856	5.054	18,72	4,07
a.Tabungan	1,559	1,685	1.947	1.946	2.058	32,00	5,75
b.Deposito	2,698	2,774	2.798	2.910	2.997	11,08	2,98
3. Kredit	4,881	5,293	5.316	5.520	5.991	22,74	8,53
4. LDR (%)	114.65	118.70	112,06	113,66	118,52	-	-
5. NPLs (%)	13.36	12.62	11,55	11,52	10,36	-	-
6. Jumlah BPR	344	342	339	326	311	-9,59	-4,60

Sumber : LBPR Bank Indonesia

**Total aset BPR pada triwulan II-2008 ini tercatat sebesar Rp7.278 miliar, meningkat sebesar 21,25% dibanding dengan triwulan II tahun sebelumnya, atau 6,03% dibanding triwulan sebelumnya.** Peningkatan tersebut banyak di-*support* oleh peningkatan DPK, yang pada posisi yang sama meningkat sebesar 18,72% (yoy) dan 4,07% (qtq) sehingga menjadi Rp5.054 miliar. Sementara itu kredit yang diberikan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK. Kredit yang diberikan tumbuh sebesar 22,74% (yoy) dan 8,53% (qtq), sehingga pada triwulan II-2008 menjadi Rp5.991 miliar. Peningkatan kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan DPK ini menjadikan LDR BPR meningkat dari 114,65% pada triwulan II-2007 menjadi 118,52% pada triwulan II-2008, atau juga

lebih tinggi dari LDR pada triwulan I-2008 LDR BPR sebesar 113,66%. Hal ini menunjukkan bahwa dana BPR yang dihimpun dari masyarakat, seluruhnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, bahkan BPR menggunakan sebagian modalnya untuk melempar kredit.

Seperti halnya bank umum, kredit modal kerja menjadi penyumbang terbesar kredit BPR. Kredit modal kerja yang disalurkan BPR di Jawa Tengah adalah sebesar Rp2.891 miliar atau 48,70% dari total kredit secara keseluruhan. Sementara itu kredit konsumsi dan investasi masing-masing sebesar 45,45% (Rp2.698 miliar) dan 5,85% (Rp347 miliar). Banyaknya usaha mikro dan kecil yang dimiliki masyarakat Jawa Tengah menjadi faktor pemicu tingginya kredit modal kerja ini. Namun demikian bila dilihat secara sektoral, sektor lainnya (termasuk konsumsi) menempati ranking pertama bagi BPR dalam menyalurkan kreditnya yaitu sebesar Rp2.813 miliar (47,38%). Pemberian kredit untuk pembelian kendaraan bermotor, diindikasikan sebagai faktor penyebab utama tingginya kredit konsumsi. Hal ini terkait dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh BPR kepada masyarakat yang ingin memiliki kendaraan bermotor secara kredit. Juga sebagian besar masyarakat menilai bahwa memiliki kendaraan bermotor lebih hemat daripada menggunakan kendaraan umum.

Jumlah BPR di Jawa Tengah menurun secara signifikan dalam kurun waktu setahun ini. Pada triwulan II-2007 jumlah BPR yang ada di Jawa Tengah tercatat sebanyak 344 BPR, turun menjadi 311 BPR pada triwulan II-2008. Penurunan ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah setempat yang menggabungkan BPR miliknya, yang semula ada di setiap kecamatan, digabung (merger) menjadi satu hanya di tingkat kabupaten/kota.

### 3.7 Perkembangan Bank Syariah

**Perkembangan perbankan syariah di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup baik.** Aset perbankan syariah dari triwulan ke triwulan selalu menunjukkan peningkatan meskipun sempat sedikit menurun pada triwulan ke I-2008. Total aset perbankan syariah pada triwulan II-2008 tercatat sebesar Rp1.866 miliar. Aset tersebut meningkat sebesar 48,21% dibandingkan triwulan II-2007 atau meningkat 14,90% dibanding triwulan sebelumnya. DPK yang dihimpun perbankan syariah juga meningkat 53,24% (yoy) menjadi Rp1.462 miliar, dan pembiayaan yang

disalurkan naik 58,35% (yoy) menjadi Rp1.620 miliar. Kondisi tersebut menggambarkan perkembangan perbankan syariah di Jawa Tengah cukup menggembirakan, meskipun *share* aset perbankan syariah terhadap total perbankan masih di bawah 2%.

Porsi perbankan syariah terhadap total perbankan di Jawa Tengah, dari waktu ke waktu juga menunjukkan peningkatan, meskipun relatif lambat. Pada triwulan II-2007 porsi perbankan syariah masih tercatat 1,49%, kemudian meningkat menjadi 1,88% pada triwulan II-2008. Tentunya masih cukup jauh bila dibandingkan dengan target Bank Indonesia untuk mencapai *share* 5% bahwa pada 2008 secara nasional.

**TABEL 3.7.**  
**PERKEMBANGAN INDIKATOR PERBANKAN SYARIAH**  
**DI PROVINSI JAWA TENGAH**

INDIKATOR USAHA	2007			2008		PERT. DES-07 (%)	
	JUN	SEP	DES	MAR	JUN	yoy	qtq
1. Total Aset	1.259	1.454	1.630	1.624	1.866	48.21	14.90
Share thd tot.perbankan	1.49	1.57	1.75	1.72	1.88	-	-
2. DPK	954	1.041	1.242	1.288	1.462	53.24	13.50
Share thd tot. perbankan	1.41	1.51	1.66	1.72	1.85	-	-
3. Pembiayaan	1.023	1.188	1.279	1.304	1.620	58.35	24.23
Share thd tot. Perbankan	1.92	1.71	2.05	2.04	2.26	-	-
4. FDR (%)	107.27	114.16	102.97	101.24	110.80	-	-
5. NPLs (%)	3.88	4.28	3.56	4.83	4.12	-	-

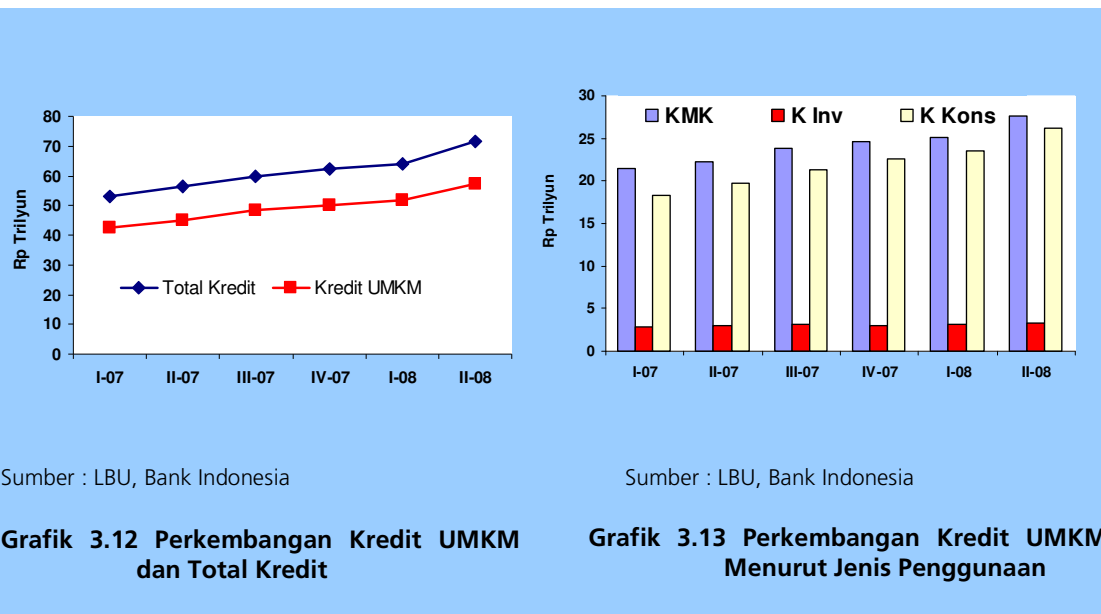
Sumber : LBU, Bank Indonesia

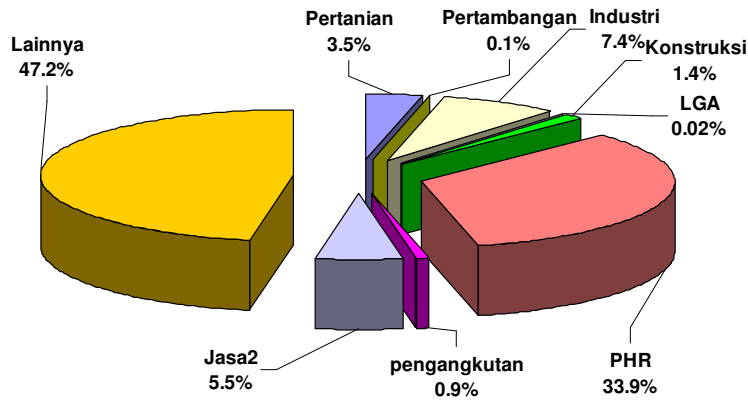
Sementara itu fungsi intermediasi yang dilakukan perbankan syariah di Jawa Tengah juga berjalan dengan baik. *Financing deposits ratio (FDR)* perbankan syariah hampir selalu di atas 100%. Hal ini membuktikan bahwa dana masyarakat yang dihimpun dari masyarakat, seluruhnya disalurkan kembali kepada masyarakat. Rasio FDR pada triwulan II-2008 sebesar 110,80%, meningkat dibandingkan triwulan II-2007 sebesar 107,27%. Meskipun cukup ekspansif, kredit rasio *Non Performing Financing (NPF)* perbankan syariah masih relatif rendah, terlihat dari rasio NPF perbankan syariah sampai dengan triwulan II-2008 masih di bawah 5%, yaitu 4,12%.

### 3.8 Kredit UMKM

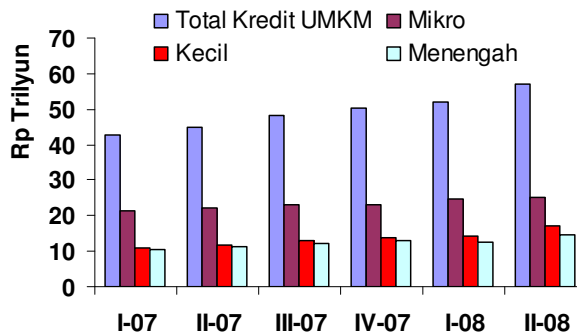
Jumlah penyaluran kredit kepada UMKM di Jawa Tengah terus meningkat meski dengan porsi yang relatif sama terhadap total kredit perbankan. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan II-2008 mengalami peningkatan sebesar 27,19% dibandingkan triwulan I-2007 sehingga menjadi Rp57.145 miliar. Peningkatan kredit UMKM tersebut memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap meningkatnya kredit perbankan, mengingat kontribusinya pada triwulan ini mencapai 80,04% dari total kredit perbankan (bank umum dan BPR) di Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp27.598 miliar atau 48,29% merupakan kredit modal kerja, sisanya sebesar 45,95% dan 5,76% merupakan kredit konsumsi dan investasi.

Sesuai data statistik BPS, di Jawa Tengah diperkirakan terdapat 7,88 juta unit UMKM, dan banyaknya jumlah UMKM ini diindikasikan sebagai faktor penyebab tingginya penyaluran kredit kepada UMKM. Sebutan sebagai *heart of small medium enterprises* memang layak disandang oleh Provinsi Jawa Tengah sehubungan dengan keberadaan UMKM yang cukup besar ini.





**Grafik 3.14 Komposisi Kredit UMKM berdasar Sektor Ekonomi Triwulan II-2008**



**Grafik 3.15 Perkembangan Kredit UMKM berdasarkan Skala Usaha**

Sejalan dengan struktur perekonomian Jawa Tengah yang utamanya disumbang oleh empat sektor yaitu sektor PHR, sektor industri, sektor pertanian, dan sektor jasa, maka penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah juga didominasi oleh keempat sektor tersebut. Pada triwulan II-2008, kredit UMKM pada sektor PHR tercatat sebesar Rp19.385 miliar atau 33,92% dari total kredit UMKM. Sementara itu untuk sektor industri, sektor pertanian, sektor jasa dunia usaha masing-masing sebesar Rp4.246 miliar (7,43%), Rp2.001 miliar (3,50%), dan Rp3.167 miliar (5,54%).

**Pangsa kredit skala mikro masih mendominasi kredit UMKM.** Meskipun pertumbuhannya melambat, pangsa kredit untuk skala mikro masih mendominasi pemberian kredit kepada UMKM di Jawa Tengah. Pada triwulan II-2008 ini pangsa kredit skala mikro punya andil sebesar 44,32% terhadap total UMKM. Menurun dibandingkan dengan triwulan II-2007 yang memiliki andil sebesar 49,05%. Pangsa skala mikro ini diambil oleh kredit kepada skala kecil yang porsinya meningkat dari

26,06% pada triwulan II-2007 menjadi 29,95% pada triwulan ini. Sementara itu untuk skala menengah relatif stabil.

**Perkembangan rasio kredit bermasalah atau NPLs UMKM perbankan di Jawa Tengah triwulan II-2008 tercatat sebesar 3,52%.** Dari total NPLs UMKM tersebut, NPLs tertinggi terjadi pada kredit usaha menengah sebesar 3,86%, diikuti kredit usaha mikro dan usaha kecil masing-masing sebesar 3,71% dan 2,83%..

Upaya Bank Indonesia dalam mendorong perbankan untuk lebih meningkatkan perannya dalam pemberdayaan sektor riil dan UMKM adalah dengan melaksanakan kegiatan bantuan teknis, antara lain melalui pelatihan survei potensi keuangan dengan metode *rapid rural appraisal* (RRA) kepada perbankan. Adapun tujuan memberikan pelatihan tersebut adalah untuk mengenali kebutuhan dan potensi pelaku ekonomi dan peran lembaga keuangan. Dan diharapkan dari pelatihan tersebut, peserta mampu memperluas pangsa pasar masing-masing banknya, serta mampu membuka peluang lebih besar lagi bagi pengembangan sektor ekonomi di masing-masing wilayah kerjanya.

Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan berbagai penelitian tentang UMKM, penyelenggaraan bazar intermediasi perbankan dan bursa kredit UMKM, menyelenggarakan forum interaktif/komunikasi perbankan/instansi pemerintah dengan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), serta penulisan buku-buku seri pengembangan UMKM. Terkait kerjasama dengan *stakeholders* dalam rangka pengembangan UMKM, Bank Indonesia Semarang melakukan berbagai bentuk kerjasama, antara lain :

- Kerjasama dengan Lembaga Internasional dalam mendukung terbentuknya *promoting enterprise access to credit* (PEAC) Borobudur yang didukung oleh Swisscontact, IFC Pensa, dan GTZ.
- Kerjasama dengan GTZRed, PT Bukopin Solo, dan PEAC Borobudur dalam *pilot project* pengembangan klaster mebel rotan di Transan, Sukoharjo, dalam pelaksanaan pelatihan CEFE Start up yang bertujuan meningkatkan kemampuan wirausaha para pelaku ekonomi.



Halaman Ini sengaja dikosongkan  
*(This page is intentionally blank)*



## BOKS: PERKEMBANGAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI JAWA TENGAH

Dalam rangka mendorong penyaluran kredit bagi UMKM yang *feasible* namun tidak *bankable*, pada tahun 2007 yang lalu pemerintah meluncurkan program kredit untuk sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi dengan pola penjaminan pemerintah yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 dan sebelumnya diawali dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) oleh 5 menteri departemen teknis, direksi 6 bank pelaksana, direksi 2 Lembaga Penjamin Kredit, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 9 Oktober 2007 di Jakarta. Untuk tujuan ini, pemerintah telah menyuntikkan modal sebesar Rp1,45 triliun kepada Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) yang digunakan sebagai jaminan kredit sebesar 70% atas kredit yang disalurkan dengan menggunakan dana bank-bank pelaksana.

KUR ini disalurkan untuk sektor ekonomi produktif dengan bunga maksimum 16 % dan jumlah kredit maksimum Rp 500 juta per debitur yang disalurkan melalui enam bank pelaksana, yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk. PT Bank Bukopin Tbk., PT Bank Tabungan Negara Tbk. dan PT Bank Syariah Mandiri. Penyaluran kredit difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan.

Adapun di Jawa Tengah, berdasarkan laporan dari bank-bank pelaksana kepada Kantor Bank Indonesia Semarang, realisasi plafon kredit KUR hingga triwulan II 2008 sebesar Rp759 milyar, baki debit sebesar Rp707 milyar, dan jumlah debitur sebanyak 91.543. Dengan melihat jumlah kredit maupun debitur tersebut, rata-rata kredit yang diberikan oleh bank-bank tersebut sebesar Rp8,3 juta per-nasabah. Sementara itu, data yang dirilis oleh Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat menyebutkan bahwa penyaluran KUR Jawa Tengah sebesar Rp1,154 triliun, dengan jumlah debitur 194.863. Dibandingkan dengan penyaluran KUR oleh provinsi-provinsi lainnya, Jawa Tengah menduduki urutan pertama.

Di Jawa Tengah, penyaluran kredit terbanyak disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp489milyar (65% dari total penyaluran KUR triwulan II/2008), dan

terbanyak kedua oleh Bank Negara Indonesia sebesar Rp163 milyar (21% dari total penyaluran KUR triwulan II/2008).

Sektor ekonomi yang paling banyak menyerap KUR adalah sektor perdagangan, restoran dan hotel yaitu sebesar Rp587milyar (77% dari total penyaluran KUR triwulan II/2008), dan terbanyak kedua adalah sektor pertanian, perburuan & sarana pertanian sebesar Rp91 milyar (12% dari total penyaluran KUR triwulan II/2008).

Pada perkembangannya, karena serapan KUR oleh UMKM dan koperasi ternyata tinggi, pemerintah berencana menambah jaminan kredit usaha rakyat (KUR) pada perbankan untuk 2009 sebesar Rp 1 triliun. Selain itu pemerintah akan merevisi ketentuan kredit usaha rakyat (KUR) untuk memperluas akses pengusaha mikro dan kecil terhadap KUR. Beberapa revisi tersebut, di antaranya memperlonggar batas maksimal bunga pinjaman kredit usaha rakyat dari 16% menjadi hingga 24% untuk penyaluran melalui lembaga keuangan mikro dengan skema *linkage program* dan memperpanjang jangka waktu pinjaman KUR tidak lagi dibatasi maksimal tiga tahun. Pemerintah juga akan merintis skema penyaluran melalui lembaga keuangan mikro (*linkage program*), mengingat hampir semua bank tidak memiliki jaringan sampai ke peminjam mikro.

**Tabel Pertumbuhan Realisasi Kredit Usaha Rakyat 2008**

	Plafon Kredit		Baki Debet		Jumlah Debitur	
	Nominal (Rp)	Pertumbuhan (%)	Nominal (Rp)	Pertumbuhan (%)	Jumlah	Pertumbuhan (%)
<b>Triwulan I/2008</b>	285.854.411.503		269.625.601.818		20.269	
<b>April 2008</b>	435.161.090.656	52%	392.049.663.603	45%	44.548	120%
<b>Mei 2008</b>	631.918.102.200	45%	581.363.612.591	48%	67.683	52%
<b>Juni 2008</b>	758.652.319.200	20%	707.461.416.545	22%	91.543	35%

Pada praktiknya, terdapat keluhan dari masyarakat mengenai penyaluran KUR ini, antara lain karena pada konsepnya KUR diberikan kepada UMKM dan koperasi tanpa memerlukan agunan, namun pada praktiknya, karena risiko 30% tetap ditanggung bank pelaksana, maka UMKM tetap dimintai agunan walaupun dengan porsi yang lebih kecil. Yang tanpa jaminan maksimal untuk kredit Rp5 juta. Selain itu bunga kredit usaha rakyat (KUR) yang berlaku saat ini dirasakan terlalu tinggi bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi.

**Tabel Realisasi Kredit Usaha Rakyat 2008 Per Bank Pelaksana**

Bank	Realisasi	
	Rp	%
BRI	489.395.649.000	65%
BTN	5.118.400.000	1%
Bukopin	16.592.000.000	2%
BNI	162.710.010.200	21%
BSM	29.466.300.000	4%
Mandiri	55.369.960.000	7%
<b>Total</b>	<b>758.652.319.200</b>	

♣♣♣

Halaman Ini sengaja dikosongkan  
*(This page is intentionally blank)*

## BOKS:

### PROGRAM FASILITASI PERCEPATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAERAH (FPPED) DAN PENGEMBANGAN KLASTER KBI SEMARANG

#### I. PROGRAM FASILITASI PERCEPATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAERAH

Pelaksanaan Program Fasilitas Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (FPPED) merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. 077/04440 dan No. 10/1/DpG/DKM/SKB tanggal 19 Maret 2008 tentang Kerjasama Pengembangan Ekonomi Jawa Tengah. Program yang diawali dari hasil Penelitian Dasar Potensi Ekonomi Daerah Dalam Rangka Pengembangan Komoditi Unggulan UMKM Di Wilayah Eks-Karesidenan Semarang (2007), kerjasama KBI Semarang dan CEMSED UKSW Salatiga menemukan bahwa komoditas sapi merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, KBI Semarang berupaya untuk memfasilitasi *access to finance* bagi pengembangan komoditas sapi potong bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan PT. BRI Kabupaten Grobogan serta komoditas sapi perah dan sapi potong di Kabupaten Semarang bekerjasama dengan Dinas Peternakan, PT. BRI dan Bank Jateng Kab Semarang.

#### 1. Fasilitas Akses Pembiayaan Komoditas Sapi Potong di Kabupaten Grobogan

Kegiatan ini berawal dari kesesuaian hasil penelitian KBI Semarang dengan informasi dari Pimpinan Cabang BRI Grobogan pada saat Rapat Koordinasi dengan bank-bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengenai komoditas yang akan dibiayai. Selanjutnya KBI Semarang melakukan identifikasi potensi komoditas sapi potong, kelompok peternak, potensi kredit dari bank sekaligus bantuan teknis yang dapat diberikan bagi kelompok peternak di Kabupaten Grobogan bersama Dinas Peternakan Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan hasil identifikasi, terpilih kelompok peternak Lembu Karya di desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi Kota dan Lembu Kinasih di desa Njono, kecamatan Tawang Harjo, Kabupaten Grobogan yang dinilai layak mendapatkan

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) karena memenuhi persyaratan bank teknis dan telah memiliki kandang komunal. Di samping itu, kebutuhan bantuan teknis yang teridentifikasi adalah kebutuhan informasi mengenai biogas, inseminasi buatan dan penggunaan pakan ternak instan yang diproduksi oleh Perusahaan Daerah (PERUSDA) Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya, KBI Semarang melakukan sinergi antara kelompok peternak Lembu Karya, Dinas Peternakan, dan PT. BRI sebagai berikut : para peternak membangun kandang komunal berkapasitas 20 ekor sapi secara swadaya untuk menampung sapi yang dibeli dari realisasi kredit KKPE sebesar Rp200 juta dari PT. BRI. Dalam rangka memanfaatkan hasil kotoran sapi menjadi sumber energi, KBI Semarang membantu pembangunan instalasi biogas untuk kelompok tersebut melalui BISR (*Bank Indonesia Social Responsibility*). Sedangkan pemenuhan kebutuhan bantuan teknis diperoleh dari penyuluhan yang dilakukan bersama Dinas Peternakan Kab. Grobogan mengenai biogas, inseminasi buatan dan penggunaan pakan ternak instan.

## **2. Fasilitasi Akses Pembiayaan Komoditas Sapi Potong di Kabupaten Semarang**

Kegiatan ini berawal dari pencarian informasi sumber pembiayaan dari perbankan pada komoditas yang berhasil diidentifikasi dari hasil penelitian Dasar Potensi Ekonomi Daerah Dalam Rangka Pengembangan Komoditi Unggulan UMKM Di Wilayah Eks-Karesidenan Semarang (2007), kerjasama KBI Semarang dan CEMSED UKSW Salatiga. Dari kegiatan tersebut, diperoleh informasi bahwa Bank Jateng dan PT. BRI Cabang Ungaran berminat membiayai pengembangan usaha Sapi Perah dan Sapi Potong di wilayah Kabupaten Semarang.

Bersama Dinas Peternakan Kab. Semarang, informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan survei awal kepada kelompok peternak sapi. Dari hasil survei, selanjutnya disusun Program Analisis Kelayakan Usaha Sapi Perah yang didiseminasikan dalam FGD bersama Bank Jateng Pusat, Bank Jateng Ungaran, Dinas Peternakan Kab.Semarang, Dinas Pelayanan Koperasi & UKM serta Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jateng untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam rangka mengembangkan usaha Sapi Perah di Kab. Semarang.

Berdasarkan hasil tersebut program fasilitasi peternak sapi untuk mengakses sumber pembiayaan KKPE bekerjasama dengan Bank Jateng telah terealisasi kredit bagi peternak sapi perah sebesar Rp 3,350 milyar di Kabupaten Semarang dan kredit bagi peternak sapi potong sebesar Rp818 juta di kabupaten Semarang.

Sedangkan program fasilitasi peternak sapi untuk mengakses sumber pembiayaan KKPE bekerjasama dengan PT. BRI di Kab Semarang, telah terealisasi kredit kepada peternak sapi perah sebesar Rp.500 juta. *Follow up* untuk meng-*upgrade* kapasitas para peternak melalui kegiatan pelatihan direncanakan akan dilaksanakan bulan Agustus 2008, dengan fasilitator dari Dinas Peternakan dan Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BPPT) Provinsi Jawa Tengah.

## II. PROGRAM PERCEPATAN SEKTOR RIIL MELALUI PENGEMBANGAN KLASTER

Melanjutkan berbagai kegiatan pengembangan klaster mebel rotan Transan, Sukoharjo yang telah dilaksanakan pada triwulan I-2008, maka pada triwulan II-2008 telah dilaksanakan beberapa FGD bersama dengan para pelaku usaha di klaster mebel rotan Transan, Sukoharjo. Dari beberapa FGD tersebut telah berhasil diformulasikan tujuan jangka pendek dan jangka menengah yang disepakati bersama oleh para *champion* dalam klaster. Untuk jangka pendek, prioritas utama adalah terciptanya keberlanjutan pasokan bahan baku dan kemungkinan pemasaran bersama melalui peningkatan penggunaan teknologi.

Guna menindaklanjuti FGD dan merumuskan strategi serta rencana aksi pengembangan klaster rotan, maka telah ditunjuk perwakilan yang nantinya bertindak selaku *task force* dan menjadi mitra kerja harian bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan mendatang. Anggota *Task force* terdiri dari para pengusaha di lingkungan klaster mebel rotan Transan, Sukoharjo.

Pembentukan Task Force ini dilakukan sebagai wujud komitmen kebersamaan para pelaku sekaligus membentuk "*sense of belonging*" dari para pelaku untuk mempersiapkan langkah *passing out* BI dan GTZ dari intervensinya di klaster. Tim ini nantinya juga diharapkan dapat menjadi embrio dalam mengelola klaster ke depan.

Selanjutnya berdasarkan FGD bersama Tim Task Force telah disepakati untuk membentuk terminal bahan baku bagi pelaku usaha di Transan dengan

membuat rencana *Business Plan* sekaligus *Feasibility Study*nya, sehingga pendanaannya dapat ditawarkan kepada lembaga keuangan baik perbankan, non bank dll. *Business Plan* tersebut disusun berdasarkan hasil survei pasar kebutuhan bahan baku industri mebel di wilayah Solo Raya yang dilakukan IFC (*International Finance Corporation*) bersama *Detro Consulting*, dan telah teridentifikasi bahwa pasar yang dapat dilayani oleh terminal bahan baku ini sebesar 300 ton/bulan. Untuk operator terminal bahan baku tersebut, saat ini sedang dilakukan negosiasi dengan *champion* dan ASMINDO Komda Solo sehingga diharapkan nantinya tidak menimbulkan persaingan dengan *champion* yang saat ini telah bertindak sebagai *supplier* dengan melayani pasar sekitar 135 ton/bulan. Apabila *Business Plan* tersebut dapat disepakati bersama calon operator, maka selanjutnya KBI Semarang akan memfasilitasi akses pendanaannya.

### III. REKOMENDASI PROGRAM PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL MELALUI TFPED DAN PENGEMBANGAN KLASTER MEDEL ROTAN

1. Dalam rangka menciptakan sinergi program TFPED dapat dikombinasikan dengan program BISR (*Bank Indonesia Social Responsibility*), sehingga pemanfaatannya bisa mendukung sektor-sektor produktif.
2. KBI Semarang mengharapkan kerjasama dengan KBI yang wilayahnya merupakan penghasil bahan baku rotan (Kalimantan, Sulawesi dan Papua), untuk menghubungkan konsorsium/asosiasi/pemasok rotan dengan *Tim Task Force* yang akan menjadi operator terminal bahan baku rotan di Transan, Sukoharjo.
3. *Lessons Learned* yang didapatkan KBI Semarang dalam program pengembangan klaster :
  - a. Pengembangan klaster merupakan program jangka menengah – panjang karena sebagian besar klaster di Jawa Tengah merupakan klaster *dormant*, sehingga butuh waktu cukup lama untuk melakukan peningkatan daya saingnya. Oleh karena itu sebaiknya program pengembangan klaster tidak dilakukan dalam jangka pendek
  - b. Dalam rangka pengembangan klaster dibutuhkan modal sosial yang tinggi dari *stakeholder* yang terlibat di dalamnya, dan sinergi dengan pihak-pihak terkait.



- c. Untuk meningkatkan akses pembiayaan, skim-skim kredit perbankan seperti KUR dan KKPE perlu untuk dilanjutkan dan dapat lebih ditingkatkan pemanfaatannya, disamping perlunya bekerjasama dengan BUMN maupun perusahaan yang masing-masing memiliki dana PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) dan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Halaman Ini sengaja dikosongkan  
*(This page is intentionally blank)*

## Bab 4

# Keuangan Pemerintah Daerah

### 4.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Semester Pertama Tahun 2008 didasarkan pada pelaksanaan APBD dari bulan Januari 2008 sampai dengan Juni 2008 dan disusun berdasarkan struktur APBD Tahun Anggaran 2008. Realisasi pelaksanaan APBD sampai dengan semester pertama Tahun 2008 secara garis besar sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Realisasi APBD Semester I-2007 & I-2008**

NO	URAIAN	APBD *) 2008	REALISASI			PERUBAHAN	
			SMT I-07	SMT I-08	% APBD-08	Nominal	%
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>						
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>3,365,222.67</b>	<b>1,394,870.32</b>	<b>1,739,557.76</b>	<b>51.69</b>	<b>344,687.44</b>	<b>24.71</b>
	- Pendapatan Pajak Daerah	2,797,000.00	1,113,737.04	1,384,719.07	49.51	270,982.03	24.33
	- Pendapatan Retribusi Daerah	327,688.66	142,483.26	137,195.76	41.87	(5,287.50)	-3.71
	- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekay. Daerah Yg Dipisahkan	116,044.57	88,852.86	132,704.46	114.36	43,851.60	49.35
	- Lain-Lain PAD Yang Sah	124,489.44	49,797.16	84,938.47	68.23	35,141.31	70.57
<b>2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,480,002.41</b>	<b>690,185.13</b>	<b>662,505.09</b>	<b>44.76</b>	<b>(27,680.04)</b>	<b>-4.01</b>
	- Dana Bagi Hsl Pjk/Bukan Pjk	426,510.54	77,258.13	135,567.51	31.79	58,309.38	75.47
	- Dana Alokasi Umum	1,053,491.87	612,927.00	526,745.93	50.00	(86,181.07)	-14.06
	- Dana Alokasi Dana Khusus	-	-	-	-	-	-
	- Dana Penyes. Tunj. Pendidkan	-	-	191,64	-	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4,845,225.08</b>	<b>2,085,055.45</b>	<b>2,402,062.85</b>	<b>49.58</b>	<b>317,007.40</b>	<b>15.20</b>

Sumber : Pemerintah Propinsi Jawa Tengah .

Keterangan : \*) Data Sementara

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran pendapatan daerah Tahun 2008 semester I-2008 sebesar Rp2.402,06 miliar atau 49,58 % dari yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

## 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

Pendapatan ini berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada 2008 PAD dianggarkan sebesar Rp3.365.222,67 juta, dan realisasi sampai dengan semester I-2008 mencapai sebesar Rp1.739.557,76 juta atau 51.69%. Hal ini menunjukkan bahwa program intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang telah dan sedang digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menampakkan hasilnya. Keberhasilan dalam memenuhi target PAD ini perlu dipertahankan pada semester II-2008 mendatang. Bila dibandingkan antara PAD semester I-2007 terjadi peningkatan sebesar 24,71% yaitu dari Rp1,394,870.32 juta menjadi Rp1,739,557.76 juta.

## 2. Dana Perimbangan :

Bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum dan Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan. Pada 2008 dana tersebut dianggarkan sebesar Rp1.480.002,41 juta, dan realisasi sampai dengan semester I-2008 sebesar Rp662.505,09 juta atau 44,76%. Sementara itu bila dibandingkan dengan posisi semester I-2007, Dana Perimbangan semester I-2008 mengalami penurunan sebesar minus Rp27,680.04 juta atau minus 4.01%. Penurunan ini disebabkan berkurangnya *dropping* Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak pada semester I-2008 tumbuh 75.47% yaitu dari Rp77,258.13 juta pada semester I-2007 menjadi Rp135,567.51 juta.

## 4.2. BELANJA DAERAH

Pada Anggaran Tahun 2008, Belanja Daerah yang berasal dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dianggarkan sebesar Rp5.394.313,68 juta. Namun sampai dengan semester I-2008 realisasinya baru mencapai Rp1.876.780,43 juta atau 34,79%. Kencenderungan melambatnya realisasi belanja ini terkait dengan diterbitkannya Perda tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru, dimana pada awal implementasinya terdapat kebijakan untuk menunda sementara kegiatan realisasi belanja daerah. Sementara itu bila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah semester I-2007, mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 75,08% yaitu dari Rp1,071,939.79 juta menjadi Rp1,876,780.43 juta.

**Tabel 4.2 Realisasi APBD Semester I-2007 & I-2008**

(Rp Juta)

NO	URAIAN	APBD *) 2008	REALISASI			PERUBAHAN	
			SMT I-2007	SMT I-2008	% APBD-08	Nominal	%
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>						
<b>1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3,408,625.11</b>	<b>651,628.73</b>	<b>1,314,262.58</b>	<b>38.56</b>	<b>662,633.85</b>	<b>101.69</b>
	- Belanja Pegawai	855,466.42	353,705.04	430,685.42	50.35	76,980.38	21.76
	- Belanja Bunga	4.00	-	0.68	17.00	-	-
	- Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Hibah	653,161.02	-	416,648.52	63.79	-	-
	- Belanja Bantuan Sosial	312,060.17	48,972.66	103,417.44	33.14	54,444.78	111.17
	- Belanja Bagi Hasil Kpd Kab/Kota	956,467.87	215,526.89	250,802.00	26.22	35,275.11	16.37
	- Blnj Bant.Keuang. kpd Kab/Kota	606,465.63	28,340.74	111,817.82	18.44	83,477.08	294.55
	- Belanja Tidak Terduga	25,000.00	5,083.40	890.70	3.56	(4,192.70)	-82.48
<b>2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1,985,688.58</b>	<b>420,311.08</b>	<b>562,517.86</b>	<b>28.33</b>	<b>142,206.78</b>	<b>33.83</b>
	- Belanja Pegawai	276,143.98	69,635.97	102,149.77	36.99	32,513.80	46.69
	- Belanja Barang dan Jasa	1,079,777.06	289,479.27	378,700.75	35.07	89,221.48	30.82
	- Belanja Modal	629,767.54	61,195.84	81,667.34	12.97	20,471.50	33.45
	JUMLAH BELANJA	5,394,313.69	1,071,939.81	1,876,780.44	34.79	804,840.63	75.08
	SURPLUS/DEFISIT	(549,088.60)	1,013,115.64	525,282.41	-	-	-

Sumber : Pemerintah Propinsi Jawa Tengah  
Keterangan : \*) Data Sementara

Realisasi belanja daerah secara garis besar sebagai berikut :

### 1. Belanja Tidak Langsung :

Pada semester I-2008 realisasi belanja ini dibanding semester yang sama tahun 2007 meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 101.69% atau dari Rp651,628.72 juta menjadi Rp1,314,262.57 juta. Peningkatan tersebut signifikan terutama terjadi pada pos Belanja Bantuan Sosial untuk bencana alam sebesar 111,17%. Dalam pos Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota diperuntukkan bagi perhelatan akbar dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur pada 22 Juni 2008 yang lalu telah berjalan lancar, aman dan dalam kondisi sosial yang sangat kondusif. Dengan terpilihnya pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2008-2014 yang baru dalam sekali putaran, patut kita syukuri dan sangat membanggakan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. Dari sisa anggaran biaya Pilkada untuk putaran ke dua Pilgub Jawa Tengah tentunya dapat dialokasi untuk proyek-proyek lain guna peningkatan pelayanan masyarakat. Menurut rencana pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih akan dilaksanakan pada 23 Agustus 2008.

## 2. Belanja Langsung :

Meliputi pos Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Rata-rata realisasi belanja langsung masih di bawah 30%, khususnya untuk Belanja Modal yang baru mencapai 12,97%. Hal ini perlu mendapat prioritas pada semester II-2008 melalui kebijakan tertentu agar sasaran pos Belanja Langsung dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah tersusun sebelumnya.

## 4.3. PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) :

Semakin dominannya kontribusi PAD dalam membiayai kegiatan pembangunan di Jawa Tengah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah setempat yang semakin meningkat dalam melaksanakan program otonomi daerah. Gambaran bentuk kemandirian dalam melaksanakan pembangun di daerah Jawa Tengah dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan PAD pertahun 2006-2008 sebesar 10,61%, dengan kontribusi rata-rata PAD terhadap APBD sebesar 68,64%. Ini adalah suatu prestasi yang cukup membanggakan bagi masyarakat di Jawa Tengah.

**Tabel 4.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah  
Tahun 2006 - 2008**

TAHUN	PAD (Rp Juta)	PERTUMBUHAN (%)	VOLUME APBD (Rp Juta)	PROPORSI (%)
2006	2,632,541.19	5,70	3,818,401.90	68,95
2007	2,947,863.61	11,98	4,367,206.17	67,50
2008	3,365,222.67	14,16	4,845,225.08	69,46
		10,61		68,64

Sumber : Pemerintah Propinsi Jawa Tengah

Keterangan : PAD Tahun 2006 dan 2007 dari Realisasi dan Tahun 2008 dari APBD



## Bab 5

### Sistem Pembayaran

Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran nasional, berbagai kebijakan telah dilakukan oleh Bank Indonesia baik dalam transaksi pembayaran non tunai maupun tunai. Perkembangan transaksi pembayaran non tunai tercermin pada aktivitas kliring dan RTGS (*real time gross settlement*). Sementara itu, perkembangan transaksi pembayaran tunai diketahui melalui aliran uang yang masuk ke dalam dan keluar dari kas Bank Indonesia (*inflow* dan *outflow*) yang berasal dari setoran dan pembayaran kepada bank-bank umum.

#### 5.1 Perkembangan Transaksi Pembayaran Non Tunai

Kegiatan pembayaran non tunai antarbank melalui *sistem kliring* pada triwulan II-2008 tumbuh 6,44% berdasarkan nominal dibandingkan triwulan yang sama tahun 2007, namun mengalami penurunan sebesar -6,73% berdasarkan jumlah warkat yang dipergunakan. Jumlah transaksi kliring selama triwulan II-2008 tercatat sebesar 713.927 lembar, sementara itu secara nominal transaksi kliring tercatat sebesar Rp22.290 milyar.

**TABEL 5.1.**  
**PERKEMBANGAN PERPUTARAN KLIRING DAN RTGS**  
**DI JAWA TENGAH**

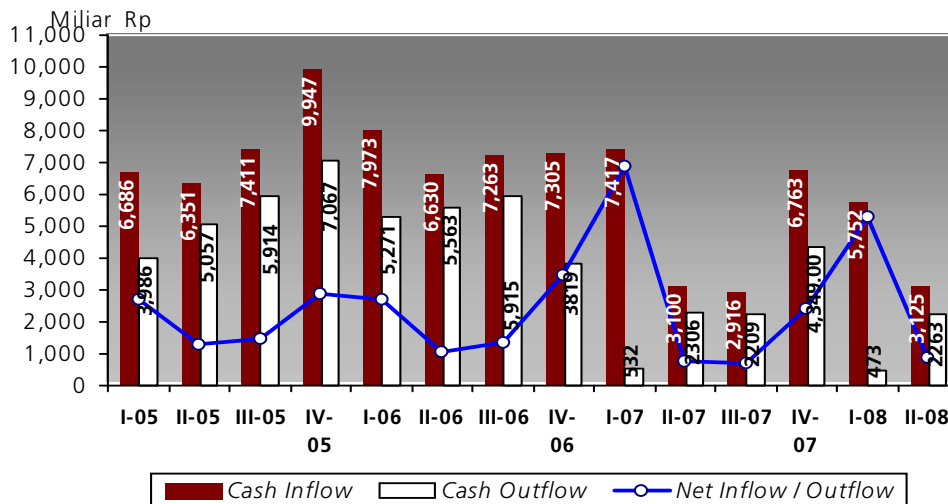
KETERANGAN	2007			2008		PERT. (%)	
	II	III	IV	I	II	YOY	QTQ
<b>PERPUTARAN KLIRING</b>							
- Lembar (Satuan)	765,447	829,775	668,158	676,327	713,927	-6.73	5.56
- Nominal (Miliar Rp)	20,941	23,351	20,078	19,665	22,290	6.44	13.35
- Rata-rata lembar per hari (Satuan)	12,346	12,988	11,136	11,661	11,375	-7.86	-2.45
- Rata-rata nominal per hari (Miliar Rp)	338	366	335	339	356	5.25	4.94
<b>TRANSAKSI RTGS</b>							
- Nominal transaksi (Miliar Rp)	23,001	25,387	23,866	24,563	24,546	6.72	-0.07

Sumber: Kantor Bank Indonesia Semarang

Sementara itu untuk penyelesaian transaksi non tunai melalui RTGS mengalami pertumbuhan 6,72% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar Rp24.546 miliar.

## 5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, perkembangan transaksi pembayaran tunai mengalami peningkatan dari sisi aliran kas masuk atau *cash inflow* sementara dari sisi aliran kas keluar atau *cash outflow* mengalami sedikit penurunan. Sementara dibandingkan posisi triwulan I-2008, baik *cash inflow* maupun *cash outflow* mengalami penurunan. Namun demikian, pada triwulan ini masih terjadi *net inflow* karena *cash inflow* yang terjadi lebih besar dibandingkan *cash outflow*, atau dengan kata lain setoran dari perbankan masih lebih besar dibanding penarikan yang dilakukan oleh perbankan.



**GRAFIK 5.1.**  
**ALIRAN KAS MASUK DAN KELUAR KBI SE-JAWA TENGAH**

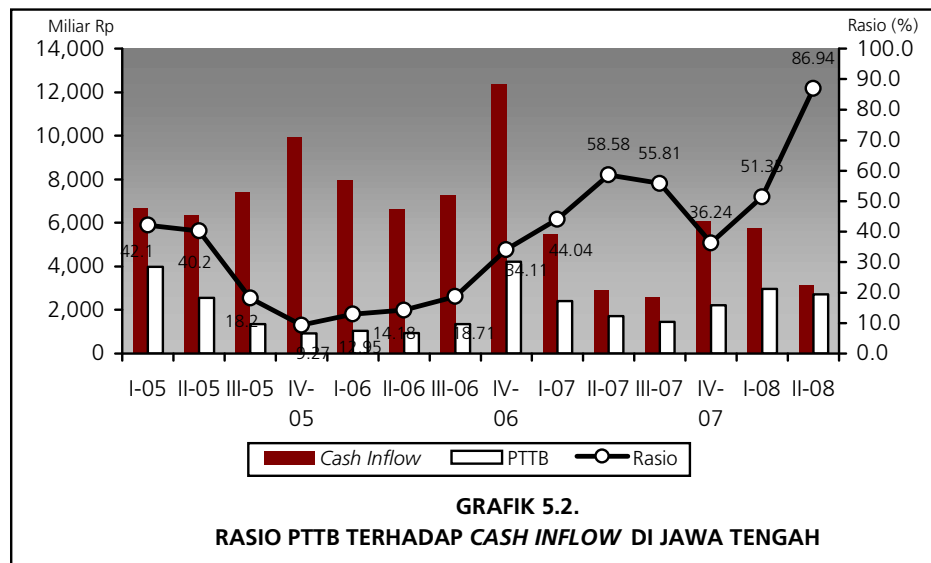
Sumber : Kantor Bank Indonesia Semarang

Aliran uang masuk ke kas Bank Indonesia yang berasal dari setoran bank umum di Jawa Tengah selama triwulan II-2008 tercatat sebesar Rp3.125 miliar atau menurun 83,73% dari triwulan 1-2008. Sementara itu, *cash outflow* dari kas Bank Indonesia Semarang tercatat sebesar Rp2.263 miliar atau meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 378,4% dari triwulan sebelumnya. Peningkatan *cash outflow* ini disebabkan karena pada triwulan II kebutuhan masyarakat akan uang kartal



meningkat seiring dengan peningkatan kegiatan konsumsi. Sementara itu pada triwulan I-2008 terjadi inflow yang cukup besar sementara cash outflow relatif kecil. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan uang kartal masyarakat perbankan melakukan penarikan uang kartal dari Bank Indonesia. Perkembangan aliran kas masuk dan keluar KBI di Jawa Tengah dapat dilihat dalam grafik 5.1.

Terkait dengan transaksi pembayaran secara tunai, kebijakan Bank Indonesia masih tetap bertujuan untuk senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jumlah nominal yang cukup menurut jenis pecahan dan dalam kondisi layak edar (*fit for circulation*). Pemilahan uang yang layak edar dan tidak layak edar dilakukan dengan menggunakan mesin racik uang kertas (MRUK) dan mesin sortir uang kertas (MSUK). Untuk uang yang sudah tidak layak edar (UTLE) dilakukan pemberian tanda tidak berharga (PTTB). Di samping itu, terhadap uang yang sudah dimusnahkan tersebut dilakukan penggantian dengan uang layak edar, dan secara periodik dilakukan penggantian uang emisi lama dengan emisi baru.



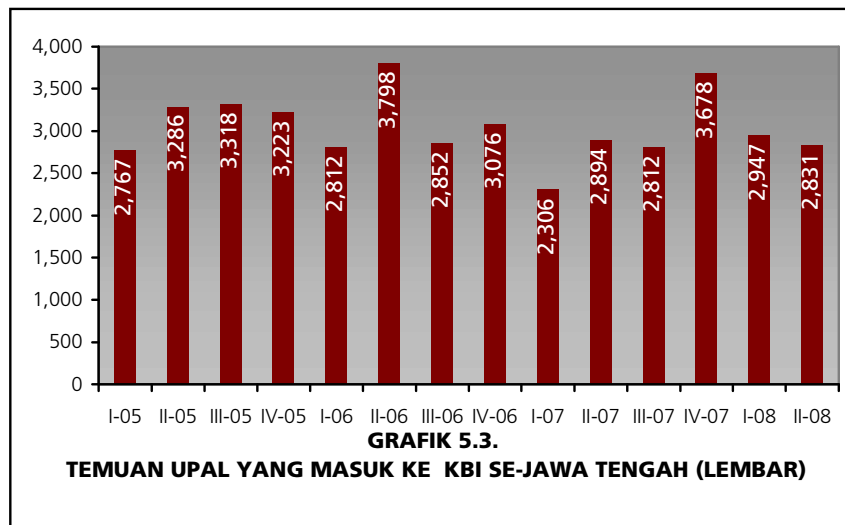
Sumber : Kantor Bank Indonesia Semarang

**Pada triwulan II-2008, jumlah PTTB di KBI se-Jawa Tengah tercatat sebesar Rp2.717 miliar, mengalami sedikit penurunan sebesar -8% dibandingkan triwulan I-2008. Porsi jumlah PTTB terhadap cash inflow pada triwulan laporan tercatat sebesar 86,94%, meningkat dibandingkan triwulan I-2008 sebesar 51,35% karena pertumbuhan cash inflow yang lebih kecil dibandingkan**

pertumbuhan PTTB. Perkembangan porsi jumlah PTTB terhadap *cash inflow* di Jawa Tengah dapat dilihat dalam grafik 5.2.

### 5.3 Perkembangan Temuan Uang Palsu

Jumlah temuan uang rupiah palsu (UPAL) yang tercatat di Kantor Bank Indonesia dalam triwulan II-2008 tercatat sebanyak 2.831 lembar atau mengalami sedikit penurunan dibandingkan triwulan yang lalu sebanyak 2.947 lembar. Namun demikian, dibandingkan dengan jumlah uang yang beredar, jumlah temuan uang palsu ini sangat kecil sekali secara prosentase. Rata-rata temuan UPAL dalam triwulan laporan sebanyak 943 lembar/bulan, lebih rendah dari triwulan I-2008 sebanyak 981 lembar/bulan. Pecahan Rp50.000,00 adalah jenis uang yang terbanyak dipalsu atau 44% dari total UPAL, disusul pecahan Rp100.000,00 sebanyak 29% dari total UPAL. Perkembangan temuan UPAL di Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 5.3.



Sumber : Kantor Bank Indonesia Semarang, Solo, dan Purwokerto



## Bab 6

# Kesejahteraan Masyarakat

Persoalan kesejahteraan dan ketenagakerjaan merupakan salah satu persoalan ekonomi yang menjadi *concern* Bank Indonesia, karena pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seharusnya diiringi oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah penduduk yang dikategorikan miskin di suatu wilayah.

### 6.1. Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh BPS per Maret 2008, jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori miskin di Jawa Tengah tercatat sebesar 6,19 juta orang, mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar -5,6% apabila dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2007 yang tercatat sejumlah 6,56 juta orang. Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan menurun sebesar 367 ribu orang, yang terdiri dari berkurangnya penduduk miskin di wilayah perkotaan sebesar 130.800 jiwa, berkurangnya penduduk miskin di wilayah pedesaan sebesar 236.600 jiwa.

**TABEL 6.1**  
**ANGKA KEMISKINAN PENDUDUK (RIBU ORANG)**

Wilayah	Tahun		K	D	K+D
Jawa Tengah	2007	000 Jiwa	2,687.30	3,869.90	6,557.20
		%	17.23	23.45	20.43
	2008	000 Jiwa	2,556.50	3,633.10	6,189.60
		%	16.34	21.96	19.23
Nasional	2007	000 Jiwa	13,559.30	23,609.00	37,168.30
		%	12.52	20.37	16.58
	2008	000 Jiwa	12,768.50	22,194.80	34,963.30
		%	11.65	18.93	15.42

Sumber : BPS, diolah

Ket : K=Kota, D=Desa

Dilihat dari proporsi terhadap total penduduk, maka penduduk miskin di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 19,23% dari total penduduk. Prosentase ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan posisi tahun 2007 yang tercatat sebesar 20,43%. Sementara itu apabila dilihat dari jenis wilayah, komposisinya masih relatif sama yaitu prosentase penduduk miskin di wilayah pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.

Dibandingkan dengan kondisi di tingkat nasional, Jawa Tengah memiliki angka prosentase penduduk miskin yang lebih tinggi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh banyaknya penduduk Jawa Tengah yang tinggal di pedesaan, yang memiliki akses pasar yang rendah. Oleh karena itu peningkatan sarana infrastruktur merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Kenaikan harga bahan bakar minyak di pertengahan akhir Mei 2008 dapat menimbulkan ancaman peningkatan angka kemiskinan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan membuat langkah-langkah komprehensif untuk menghindari lonjakan angka kemiskinan di masa yang akan datang.

## 6.2 Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk yang tidak bekerja dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan suatu wilayah. **Berdasarkan hasil Sakernas 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, dari 24,9 juta penduduk usia kerja di wilayah Jawa Tengah, 17,74 juta jiwa digolongkan sebagai angkatan kerja dan 7,17 juta jiwa tidak termasuk angkatan kerja.** Yang dimaksudkan sebagai penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun ke atas.

**TABEL 6.2**  
**PENDUDUK USIA KERJA DI JAWA TENGAH MENURUT KEGIATANNYA**

	2005	2006	2007
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>16,995,013</b>	<b>17,350,112</b>	<b>17,737,595</b>
Bekerja	15,548,609	15,927,856	16,300,707
Pengangguran	1,446,404	1,422,256	1,436,888
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>6,882,641</b>	<b>7,051,286</b>	<b>7,167,210</b>
Sekolah	1,940,360	2,039,041	2,086,347
Mengurus RT	3,599,439	3,483,424	3,715,485
Lainnya	1,342,842	1,528,821	1,365,378
<b>Total Penduduk di atas usia 15 th</b>	<b>23,877,654</b>	<b>24,401,398</b>	<b>24,904,805</b>
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71.18%	71.10%	71.22%
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>8.51%</b>	<b>8.20%</b>	<b>8.10%</b>

Sumber : BPS, diolah

Dari data tersebut, tingkat partisipasi angkatan kerja atau ukuran yang menggambarkan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja adalah sebesar 71,22%. Dari sisi jumlah dan prosentase, mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2006 dan tahun 2007.

**Sementara itu tingkat pengangguran terbuka atau angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran yang masuk kategori angkatan kerja tercatat sebesar 8,10% atau sejumlah 1,44 juta jiwa.** Dari sisi jumlah, angka ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan posisi tahun 2006. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2005 maka terjadi penurunan jumlah pengangguran. Sedangkan dari sisi prosentase, angkanya mengalami perkembangan positif (penurunan prosentase pengangguran) apabila dibandingkan posisi tahun 2006 dan 2007.

Sementara itu, berdasarkan data yang tercatat di Disnakertrans Provinsi Jateng, dari periode 2005-2007 juga terjadi trend peningkatan pencari kerja di Jawa Tengah. Jumlah pencari kerja tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu indikator atau proksi jumlah penduduk yang belum bekerja di Jawa Tengah.

**TABEL 6.3**  
**JUMLAH PENCARI KERJA DI JAWA TENGAH**

Tahun	Jumlah
2005	391.967
2006	508.572
2007	568.724

*Sumber : Disnakertrans Jawa Tengah, diolah*

Data di atas menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir angka pengangguran mengalami peningkatan namun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Salah satu penyebabnya kemungkinan adalah karena pertumbuhan lapangan kerja baru yang dibuka lebih rendah dari pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja.



Halaman Ini sengaja dikosongkan  
*(This page is intentionally blank)*

## BOKS

### RINGKASAN EKSEKUTIF

#### SURVEI EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI KOTA SEMARANG

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu solusi meminimalkan dampak kenaikan harga BBM dengan memberikan subsidi langsung bagi rakyat miskin. Permasalahan utama penyaluran BLT 2008 adalah penggunaan data BPS 2005 yang menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan juga banyak pihak yang menilai bahwa BLT merupakan program yang banyak ruginya dibanding manfaat. Bantuan Rp100.000,00 per bulan seolah tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan hidup sebagai akibat kenaikan harga BBM. Menyimak pemberitaan yang dilakukan di media massa mengenai BLT, timbul berbagai pertanyaan seputar BLT dan efektivitasnya.

Survei ini memiliki 3 tujuan sbb: (a) mengidentifikasi dan menganalisis persepsi masyarakat penerima BLT di kota Semarang terhadap efektivitas penyaluran BLT, (b) mengidentifikasi dan menganalisis persoalan di sekitar penyaluran BLT di kota Semarang, dan (3) menganalisis berbagai alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam memperbaiki mekanisme penggantian subsidi kepada masyarakat miskin sebagai akibat kenaikan harga BBM.

Survei ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kondisi aktual yang ada di masyarakat, terutama masyarakat yang menerima BLT dan aparat yang terkait dengan penyaluran BLT. Deskripsi dan analisis mengenai efektivitas program BLT dan dampak ekonomisnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat akan dapat digunakan sebagai masukan untuk pengambil keputusan mengenai bentuk subsidi yang seharusnya diberikan, serta sistem dan mekanisme penyaluran subsidi secara lebih tepat.

Subyek penelitian ini adalah masyarakat penerima BLT dan aparat yang terkait dengan penyaluran BLT. Pengambilan sampel dilakukan secara *proporsional random sampling* terhadap populasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) BLT dan aparat yang terkait dengan penyaluran BLT. Kecamatan yang dipilih sebagai sampel ditetapkan berdasarkan 10 kecamatan yang menerima BLT terbanyak. Jumlah sampel sebanyak 150 responden yang terdiri dari penerima BLT sebanyak 120 orang, aparat yang terkait dengan penyaluran BLT sebanyak 30 orang, dengan rincian masing-masing

kecamatan 3 Ketua RT. Selain 150 responden, maka analisis akan dipertajam dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap aparat tingkat Kelurahan sebanyak 10 orang Lurah dan 2 orang pakar. Pakar yang dipilih dalam wawancara mendalam adalah Bapak Ngargono, Ketua LP2K, sebagai representasi dari LSM yang memiliki fokus pada perlindungan konsumen/masyarakat dan Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, sebagai representasi pemerintah.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2008 diberikan berdasarkan Instruksi Presiden No 3 tahun 2008 kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang masuk dalam kategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin. BLT diberikan dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM (Departemen Sosial, 2008) dengan tujuan untuk (i) membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, (ii) mencegah penurunan tarat kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan (iii) meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

BLT diberikan dengan pertimbangan bahwa masyarakat miskin merupakan masyarakat yang paling rentan, dan akan terkena dampak sosial yang paling besar. Kenaikan harga BBM akan menyebabkan taraf kesejahteraannya semakin menurun atau menjadi semakin miskin. Pada tahun 2008, pemerintah melanjutkan skema program PKPS BBM dari bulan Juni sampai dengan Desember 2008 dalam bentuk BLT tanpa syarat kepada RTS sebesar Rp 100.000,00 per bulan selama 7 bulan, dengan rincian diberikan Rp 300.000,00/3 bulan (Juni-Agustus) dan Rp 400.000,00/4 bulan yaitu September s.d. Desember (Departemen Sosial, 2008).

Kota Semarang menjadi daerah yang pertama kali mendapatkan BLT Jawa Tengah pada tahun 2008. Mengacu data BPS Jawa Tengah tahun 2006, jumlah penerima BLT di Semarang adalah 82.665 kepala keluarga (KK) dari total 3.171.201 Rumah Tangga Miskin (RTM).

### **Temuan Survei**

Berdasarkan hasil survei, karakteristik responden RTS BLT menunjukkan bahwa 52,50% menyatakan bekerja dalam kategori lain-lain karena mereka tidak memiliki pekerjaan tetap, atau berwiraswasta seperti berdagang di pasar, kaki lima, dan 45,83% bekerja sebagai buruh harian, dan 1,67% adalah pensiunan. RTS BLT sebagian besar (98,25%) memiliki tanggungan keluarga kurang dari 5 orang dan



hanya 1,75% yang memiliki tanggungan antara 5 sampai 7 orang. Survei ini memperoleh beberapa hasil temuan berikut ini.

- a. Karakteristik responden RTS BLT adalah sebagian besar bekerja dalam kategori lain-lain karena mereka tidak memiliki pekerjaan tetap, atau berwiraswasta seperti berdagang di pasar, kaki lima, dan lainnya adalah buruh harian dan pensiunan. RTS BLT sebagian besar memiliki tanggungan keluarga kurang dari 5 orang.
- b. Kesesuaian dengan kriteria kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan indikasi ada beberapa ketidaksesuaian. Kesesuaian tercermin dari penghasilan yang sebagian besar di bawah Rp 600.000,00, namun bila dilihat dari kondisi fisik, maka sebanyak 89,17% responden menyatakan mengkonsumsi daging atau telur atau ikan atau ayam kurang dari 2 kali dalam satu bulan dan 10,83% menyatakan mengkonsumsi 3 – 5 kali dalam satu bulan. Sebanyak 53,33% responden menyatakan memiliki jamban di dalam rumah (artinya memiliki jamban sendiri, dan bukan WC umum), 62,71% memiliki televisi, dan 89,17% menyatakan memiliki listrik. Ketidaktepatan kriteria RTS BLT antara yang distandarkan oleh BPS dengan kondisi di lapangan, mengindikasikan dua hal. Yang pertama adalah memang terjadi penyimpangan atau ketidaktepatan sasaran sesuai dengan kriteria kemiskinan BPS, dan atau yang kedua adalah kriteria miskin itu sendiri yang perlu dipertimbangkan ulang.
- c. Pada tahap verifikasi data aparat RT, RW, dan Lurah merasa kurang dilibatkan. Tingkat partisipasi aparat pemerintah masih relatif rendah baik dari proses awal sampai ke pencairan. Sebagian besar identitas RTS BLT sama dengan data yang ada, sehingga kondisi ini tidak menimbulkan masalah mendasar dalam pencairan BLT. Pencairan BLT di Kota Semarang pun berjalan dengan lancar, keluhan muncul pada antrean yang terlalu panjang, jumlah petugas di setiap kantor pos yang terlalu sedikit, dan tidak adanya pelayanan keliling untuk warga yang memiliki hambatan khusus.
- d. Sebanyak 17.245 RTS di Kota Semarang tidak memiliki KTP Semarang. Tidak adanya KTP setempat dapat menimbulkan celah untuk penerimaan BLT ganda apabila yang bersangkutan meminta ulang ke kota asal.
- e. Masalah ketidaktepatan sasaran tidak terlalu tinggi di Kota Semarang dan lebih dikarenakan bertambahnya warga miskin dan bukan karena beberapa warga miskin telah menjadi lebih sejahtera. Apabila terjadi ketidaktepatan sasaran karena

pemegang kartu meninggal, maka kartu diberikan kepada istrinya, namun apabila tidak terdapat lagi keluarga, maka akan dialihkan ke RTS lain dengan dimusyawarahkan terlebih dahulu di RT atau kelurahan.

- f. Ketidapuasan masyarakat hanya disampaikan dalam bentuk keluhan dan pengaduan kepada ketua RT, karena tidak ada sosialisasi yang jelas mengenai mekanisme dan posko pengaduan.
- g. Sebanyak 61,34% responden memandang bahwa BLT ini mampu mengurangi beban pengeluaran, namun 87,50% menyatakan bahwa mereka tidak mengalami peningkatan daya beli setelah menerima BLT. Sebanyak 53,50% responden menyatakan uang BLT yang diterima langsung habis dikonsumsi saat itu juga, sisanya pada kisaran 1 minggu sampai satu bulan. Meskipun BLT dipandang belum mampu meningkatkan daya beli masyarakat, namun 42,50% responden RTS BLT tetap menghendaki BLT diberikan dan tidak diganti dengan wujud lain, sedangkan 39,17% lebih memilih adanya subsidi dalam bentuk barang seperti misalnya sembako murah, dan 10,83% lebih memilih uang sekolah gratis per bulan.
- h. Prioritas tertinggi dari penggunaan BLT adalah untuk konsumsi (77,5%), membayar keperluan anak sekolah (16,67%), disimpan (2,5%) dan membayar utang (1,67%), sedangkan penggunaan untuk biaya berobat sebesar 0,83% dan modal usaha sebesar 0,83%. Responden yang menggunakan BLT untuk konsumsi, memprioritaskan pembelian beras dan sembako (92,59%), kemudian diikuti dengan pembelian sandang dan bahan bakar.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan temuan di atas, beberapa rekomendasi yang bisa disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan penyaluran BLT di masa yang akan datang dapat dimulai dari adanya kriteria kemiskinan yang lebih tepat. Ketika kriteria kemiskinan telah dapat menggambarkan kondisi kemiskinan yang sesungguhnya, karena beberapa indikator seperti kepemilikan listrik, TV, dan jamban keluarga, tampaknya sudah tidak dapat menjadi ukuran kesejahteraan suatu keluarga. Untuk itu pemerintah dalam hal ini BPS perlu memikirkan penentuan kriteria yang lebih sesuai untuk di lapangan, atau dapat dengan alternatif menggunakan 14 kriteria yang sama

- namun dilakukan pembobotan sehingga justifikasi petugas di lapangan akan lebih obyektif.
- b. Perlu dilakukan pelibatan RT/RW/Lurah baik dalam proses pendataan maupun verifikasi secara lebih banyak. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi bias sasaran, karena bagaimana pun ketua RT/RW/Lurah, merupakan orang yang relatif lebih tahu kondisi warganya. Untuk mendorong tingkat partisipasi yang lebih tinggi maka, perlu adanya insentif bagi aparat kelurahan/desa dalam bentuk biaya operasional.
  - c. Untuk mengatasi celah kemungkinan penerimaan BLT secara ganda (akibat tidak terlalu diperlukannya KTP di lapangan), maka perlu dibuat sistem yang lebih tegas mengenai KTP. Salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan menggunakan PIN, *social security number* nasional.
  - d. Pemerintah sebaiknya tidak lagi mendasarkan diri pada anggaran untuk pembagian BLT karena akan mengakibatkan perlakuan yang tidak sama (*inequality treatment*) terhadap masyarakat miskin. Pemberian dana BLT sebaiknya diperuntukkan untuk semua masyarakat miskin, dan tidak didasarkan pada kuota. Sehingga implikasinya adalah penentuan anggaran harus didasarkan pada data kemiskinan, dan bukan jumlah penerima menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
  - e. Ketidakpuasan yang muncul dari RT/RW/Lurah sebenarnya lebih disebabkan karena bertambahnya beban tugas mereka baik secara fisik maupun psikis karena harus menampung berbagai keluhan yang mungkin tidak dapat diselesaikan oleh mereka sendiri. Untuk itu prosedur pengaduan dan adanya posko pengaduan merupakan hal yang penting untuk dipikirkan karena adanya mekanisme pengaduan yang jelas akan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dan dapat mengurangi beban yang harus ditanggung oleh ketua RT/RW/Lurah. Posko pengaduan sebaiknya ada di tingkat kelurahan sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan.
  - f. Tolok ukur efektivitas program BLT yang dikeluarkan oleh Menko Kesra tampaknya juga perlu diperluas dan dipertajam. Penggunaan tolok ukur efektivitas yang berupa pengurangan beban pengeluaran masyarakat, kemungkinan besar tercapai karena subsidi akan langsung digunakan untuk mendukung pengeluaran yang ada. Hal yang lebih penting dalam persepsi masyarakat mengenai

peningkatan daya beli adalah adanya kontinuitas kemampuan beli. Data di masyarakat menunjukkan BLT hanya memiliki dampak yang sangat pendek. Sehingga hal yang perlu dipikirkan adalah panjang dampak yang ditimbulkan dan disertai skema program lain yang tujuannya adalah mengembangkan kemampuan produktif (*empowering*) masyarakat. Program *empowering* dapat mengacu pada program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yaitu PNPM dan KUR. Kedua program ini sebaiknya dilakukan secara sinergis dengan program BLT.

*(Survei dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Semarang dan P3M Fakultas Ekonomi UNIKA Soegijapranata Semarang, Juni 2008)*



## Bab 7

# Prospek Perekonomian

**Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan III-2008 diperkirakan akan melambat dibandingkan triwulan II-2008, akibat dampak kenaikan harga BBM.** Sektor industri khususnya industri menengah-kecil diperkirakan akan mengalami dampak yang paling besar dari kenaikan harga BBM tersebut. Namun demikian, masih terdapat stimulus positif bagi perkembangan perekonomian yaitu peningkatan konsumsi menjelang hari raya keagamaan.

**Diperkirakan perekonomian Jawa Tengah akan tumbuh dalam kisaran 5,3%-5,8% (yoy) pada triwulan III-2008.** Sementara itu sampai dengan akhir tahun 2008, perekonomian Jawa Tengah diperkirakan akan tumbuh dalam kisaran 5,1%-5,6% dibandingkan posisi tahun 2007. Hasil Survey Persepsi Pasar Regional menunjukkan hasil serupa, yaitu adanya pesimisme terhadap kondisi perekonomian di tahun 2008 dibandingkan tahun 2007. Kenaikan harga minyak dunia maupun dalam negeri, kenaikan harga komoditas serta permasalahan infrastruktur diperkirakan merupakan salah satu penyebab munculnya pesimisme ini.

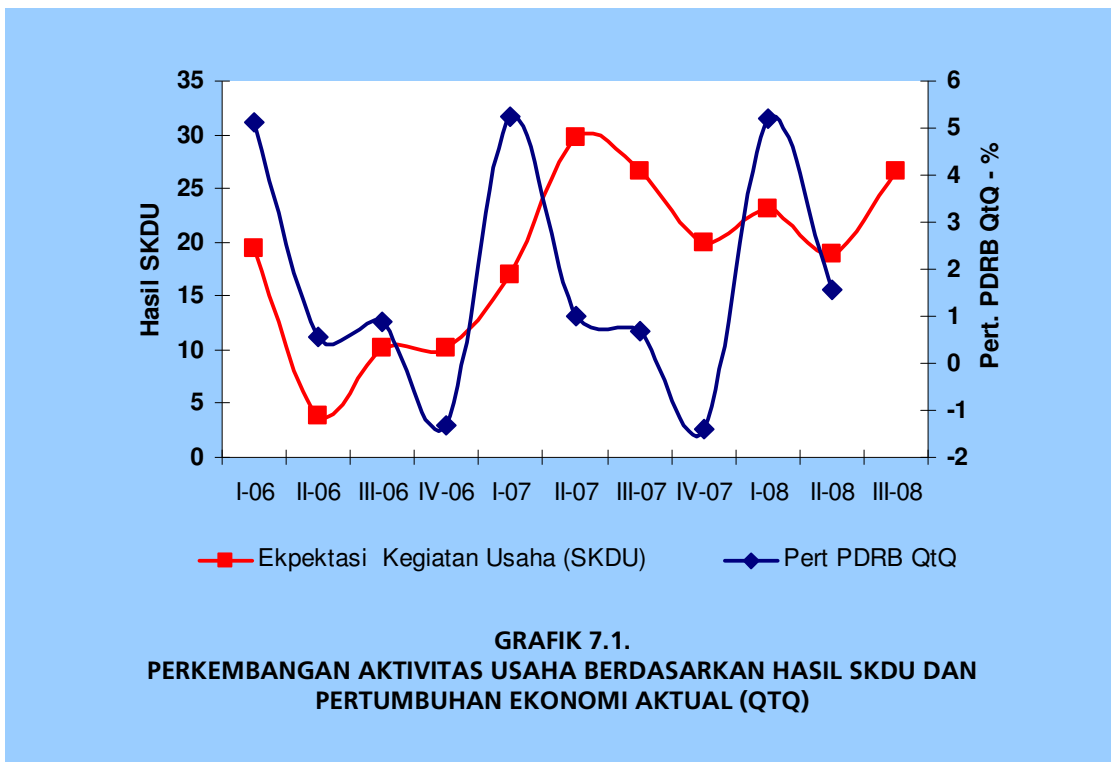
**Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2008 di Jateng akan didorong oleh sektor perdagangan, hotel dan restaurant (PHR) , sektor industri pengolahan ,sektor jasa-jasa dan sektor pertanian.** Peningkatan sub sektor industri migas diperkirakan masih akan menjadi pendorong perkembangan sektor industri pengolahan. Sementara itu Sektor PHR diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, mengingat pada bulan terakhir di triwulan III-2008 akan memasuki bulan puasa. Hal tersebut menyebabkan masyarakat akan meningkatkan konsumsinya dan mendorong perkembangan sektor PHR.

Sementara itu, sektor pertanian pada triwulan III-2008 diperkirakan akan mengalami perlambatan, karena baru memasuki masa tanam. Selain itu terdapat potensi ancaman terhadap produksi pertanian, yaitu terutama dari musim kemarau yang mengakibatkan berkurangnya debit air saluran irigasi.

**Di sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih didorong oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.** Konsumsi rumah

tangga ini masih disebabkan oleh peningkatan kebutuhan memasuki bulan puasa dan menjelang hari raya Idul Fitri. Selain itu terdapat pula pengeluaran konsumsi ekstra untuk keperluan biaya pendidikan. Sementara itu konsumsi pemerintah diperkirakan akan meningkat disebabkan siklus anggaran telah memasuki semester kedua. Selain itu, pada akhir Agustus 2008 Gubernur baru yang terpilih akan dilantik secara resmi. Hal tersebut diperkirakan akan meningkatkan realisasi anggaran.

**Sementara itu hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) menunjukkan tetap adanya optimisme peningkatan dunia usaha, walaupun tidak sebesar ekspektasi pada triwulan III-07.** Hal ini tercermin dari naiknya Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pada triwulan II-2008 (Grafik 7.1.).



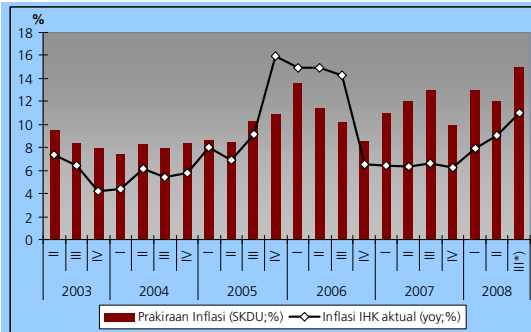
**GRAFIK 7.1.**  
**PERKEMBANGAN AKTIVITAS USAHA BERDASARKAN HASIL SKDU DAN**  
**PERTUMBUHAN EKONOMI AKTUAL (QTQ)**

**Tekanan inflasi tahunan yang mulai meningkat pasca kenaikan harga BBM pada bulan Mei 2008 yang lalu diperkirakan akan meningkatkan tekanan laju inflasi hingga *double digit* pada triwulan III-2008 hingga akhir tahun 2008.** Faktor pemicu inflasi triwulan mendatang diperkirakan karena inflasi komoditas *administered prices* dan *volatile foods*, khususnya di kelompok transportasi, kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, dan kelompok perumahan. Selain karena masih adanya dampak kenaikan harga BBM, hal tersebut juga seiring dengan naiknya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pada bulan puasa dan sekaligus menjelang hari raya lebaran di triwulan III-2008.

Sementara itu, sumbangan dari faktor moneter diperkirakan tidak terlalu signifikan sejalan dengan cukup stabilnya kurs rupiah dalam kisaran ideal antara Rp9.000,00 s.d. Rp9.300,00 per USD. Namun, tekanan dari ekspektasi masyarakat diperkirakan mengalami peningkatan hingga akhir tahun. Hal tersebut sejalan dengan hasil Survei Penjualan Eceran maupun Survei Konsumen yang dilakukan Kantor Bank Indonesia Semarang pada triwulan ini. Berdasarkan Hasil Survei Penjualan Eceran, responden mengekspektasikan bahwa harga di tingkat pedagang pada triwulan III-2008 mendatang akan meningkat rata-rata 21%. Sementara dari hasil Survei Konsumen, sebagian besar juga mengekspektasikan terjadinya kenaikan harga barang/jasa.

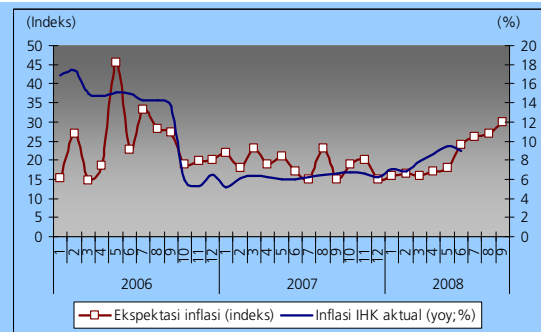
**Dari sisi penawaran, masuknya masa tanam pada triwulan III-2008 akan berpengaruh terhadap harga pupuk dan juga pasokan bahan makanan.** Di samping itu, tibanya musim hujan di awal bulan September diperkirakan juga akan berdampak pada naiknya harga beberapa bahan makanan. Kondisi tersebut merupakan faktor risiko yang perlu diwaspadai karena akan mempengaruhi stabilitas harga pada triwulan mendatang. Mengingat permintaan masyarakat pada triwulan III-2008 diperkirakan akan meningkat, maka interaksi permintaan dan penawaran tersebut berpotensi meningkatkan laju inflasi. Dari sisi permintaan, konsumsi pemerintah yang mulai meningkat seiring dengan dimulainya realisasi APBD diperkirakan juga akan menjadi salah satu faktor yang mampu mendorong laju inflasi pada triwulan III-2008.

**Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), ekspektasi masyarakat terhadap laju inflasi pada triwulan mendatang diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan II-2008 yaitu sekitar 11-12%.** Berdasarkan hasil Survei Konsumen (SK), ekspektasi masyarakat terhadap inflasi triwulan mendatang juga mengalami peningkatan dibandingkan triwulan II-2008. Dengan melihat beberapa faktor tersebut, inflasi Jawa Tengah pada triwulan III-2008 diperkirakan akan berada dalam kisaran 10,5%-11,5% (yoy).



Sumber : SPE Bank Indonesia Semarang

**Grafik 7.2. Prakiraan Inflasi Hasil SKDU Dan Laju Inflasi IHC Tahunan Aktual (Yoy)**

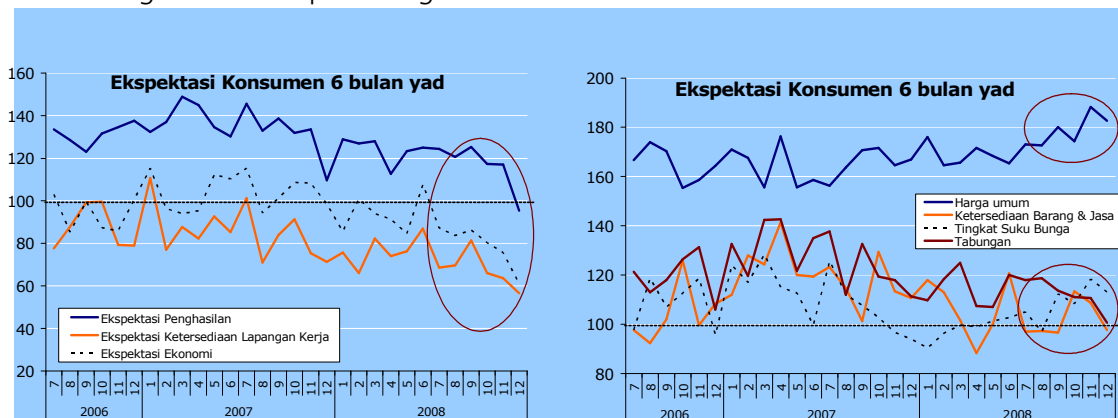


Sumber : SPE Bank Indonesia Semarang

**Grafik 7.3. Prakiraan Inflasi Hasil Survei Konsumen Dan Laju Inflasi IHC Aktual (Yoy)**

Terkait dengan hal itu, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Bank Indonesia dan pemerintah adalah mengelola ekspektasi masyarakat agar ke arah yang lebih positif. Berdasarkan Survei Konsumen yang dilakukan oleh KBI Semarang, ekspektasi masyarakat kota Semarang dalam 6 bulan ke depan menunjukkan pesimisme yang meningkat, terlihat dari hal-hal sbb. (lihat Grafik 7.4.) :

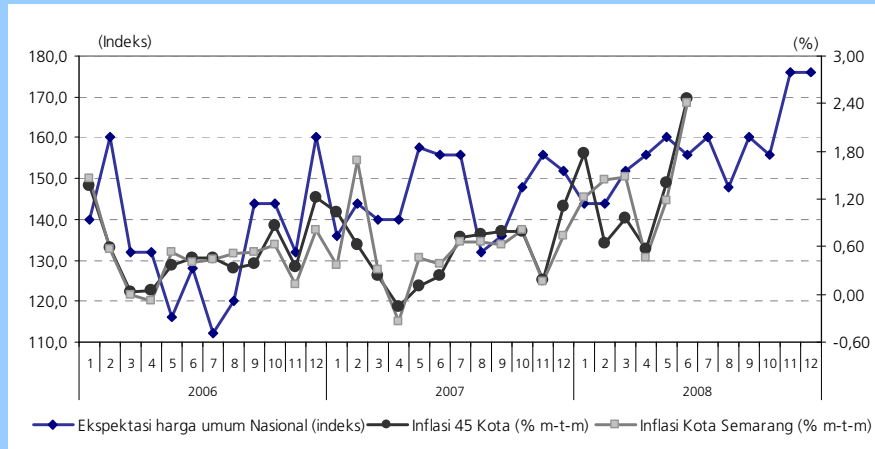
- Menurunnya ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi secara umum, penghasilan, dan ketersediaan lapangan kerja.
- Naiknya ekspektasi masyarakat bahwa harga secara umum akan mengalami peningkatan cukup signifikan hingga akhir tahun.
- Ekspektasi masyarakat mengenai ketersediaan barang dan jasa semakin menurun.
- Ekspektasi masyarakat terhadap tingkat suku bunga yang cenderung meningkat, sedangkan terhadap tabungan menurun.



**GRAFIK 7.4. EKSPEKTASI MASYARAKAT ENAM BULAN KE DEPAN BERDASARKAN SURVEI KONSUMEN**



Berdasarkan Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan oleh KBI Semarang, mayoritas responden memperkirakan harga secara umum pada 3 bulan dan 6 bulan mendatang akan meningkat. Secara *net balance*, indeks ekspektasi harga pada Juni 2008 untuk 3 dan 6 bulan mendatang rata-rata berada pada level 180 pada Juni 2008. Hal itu menunjukkan ekspektasi responden terhadap kenaikan harga secara umum semakin menguat (lihat Grafik 7.5)



**GRAFIK 7.5.**  
**EKSPEKTASI PEDADANG UNTUK ENAM BULAN KE DEPAN**  
**BERDASARKAN SURVEI PENJUALAN ECERAN**

Berdasarkan hasil estimasi dan berbagai survei tersebut di atas yang menghitung ekspektasi masyarakat, pengusaha dan pedagang, laju inflasi Jawa Tengah pada triwulan III-2008 diperkirakan akan berada dalam kisaran 10,5%-11,5% (yoy). Angka laju inflasi tersebut diperkirakan akan sedikit meningkat hingga akhir tahun 2008 dalam kisaran 11-12%. Tabel 5.1. menunjukkan angka perkiraan laju inflasi triwulan III-2008 dan akhir tahun 2008 menurut estimasi KBI Semarang.

**TABEL 7.1.**  
**ESTIMASI LAJU INFLASI JAWA TENGAH HINGGA AKHIR TAHUN 2008**  
**MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA (YOY, PERSEN)**

NO	KELOMPOK BARANG & JASA	2006	2007	I-08	II-08*)	III-08*)	2008*)
1	Bahan Makanan	13.93	9.87	13.36	19-20	20-21	19-20
2	Mkn Jadi, Minuman, Rokok & Temb.	6.58	7.93	10.69	10-11	11-12	11-12
3	Perumh., Air, Listrik, Gas & Bhn Bakar	3.52	4.72	5.34	7-8	8-9	8-9
4	Sandang	5.81	7.11	9.69	8-9	11-12	9-10
5	Kesehatan	1.70	3.30	5.50	6-7	5-6	4-5
6	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	10.79	7.42	7.31	8-9	7-8	8-9
7	Transpor, Komunikasi & Jasa Keu.	1.28	1.13	1.18	11-12	11-12	11-12
<b>UMUM</b>		<b>6.50</b>	<b>6.60</b>	<b>6.24</b>	<b>9.01</b>	<b>10.5-11.5</b>	<b>11-12</b>

Sumber: BPS, diolah

Keterangan: \*) merupakan estimasi KBI Semarang



Halaman Ini sengaja dikosongkan  
*(This page is intentionally blank)*

## BOKS:

### HASIL SURVEY PERSEPSI PASAR REGIONAL KBI SEMARANG PERIODE TRIWULAN II-2008

Survei Persepsi Pasar Regional Jawa Tengah mulai dilaksanakan sebagai *pilot project* pada triwulan III-2007 secara triwulanan. Jumlah responden sebanyak 36 responden yang terdiri dari para ekonom, pengamat/peneliti ekonomi, analis pasar uang/modal, praktisi perbankan serta akademisi di wilayah Jawa Tengah. Responden dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui mail, faksimili maupun e-mail. Hasil survei dioleh dengan metode *pooling* (persentase responden yang menjawab paling banyak).

Hasil Survei Persepsi Pasar Regional Jawa Tengah menyimpulkan secara umum kondisi ekonomi makro 2008 diperkirakan lebih buruk dibanding kondisi ekonomi makro 2007, dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1-6,0%, dan perkiraan inflasi yang meningkat (9,00%).

Pertumbuhan ekonomi di sektor industri pengolahan, diikuti oleh sektor perdagangan, dan sektor pertanian masih menjadi penyumbang utama. Adapun Inflasi diperkirakan meningkat melampaui 8,00% yaitu rata-rata berada pada level 9,00%. Inflasi yang terjadi diperkirakan terutama disebabkan oleh ekspektasi akan adanya kenaikan harga dan kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan, disamping faktor musimam. Sumber inflasi pada 2008 diperkirakan berasal dari kelompok bahan makanan, diikuti oleh kelompok perumahan dan bahan bakar dan kelompok makanan jadi.

**Tabel 1**  
**Perkiraan Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Jawa Tengah 2008**

No.	Indikator Ekonomi	Realisasi *)	Perkiraan 2008	
			2007	Hasil Survei Triwulan I-2008
1.	Pertumbuhan Ekonomi (y-o-y)	5,54%	5,1% - 6,0%	5,1% - 6,0%
2.	Inflasi (y-o-y)	6,24%	6,1% - 7,0%	Rata-rata 9,0%
3.	Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (y-o-y)	10,02%	15,1% - 22,5%	7,6% - 15,0%
4.	Pertumbuhan Impor Nonmigas (y-o-y)	26,95%	7,6% - 15,0%	22,5% - 30,0%
5.	Tingkat pengangguran	8,10%	8,1% - 9,0%	9,1% - 10,0%
6.	Tingkat kemiskinan	0,34%	1,1% - 2,0%	1,1% - 2,0%

Keterangan:

\*) Angka sementara

Investasi/penanaman modal di Jawa Tengah pada 2008 diperkirakan akan mengalami penurunan. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh dampak adanya kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM yang akan mendorong kenaikan harga barang lain sehingga pasar menjadi lesu, realisasi investasi yang lemah karena menunggu kepastian politik dan

kesiapan infrastruktur, kondisi ekonomi global yang kurang mendukung, serta meningkatnya aksi demonstrasi. Namun demikian, perkembangan sektor riil khususnya UMKM masih diperkirakan meningkat melalui peran serta perbankan dengan pemberian kredit kepada UMKM di Jawa Tengah.

Ekspor barang Jawa Tengah pada 2008 diperkirakan meningkat pada kisaran 7,6%-15,0%, relatif melemah dibanding perkiraan pada survei triwulan I-2008 yang berada pada kisaran 15,1%-22,5%. Adapun impor barang pada 2008 diperkirakan berada pada kisaran 22,5% - 30,0%, meningkat dibanding perkiraan pada triwulan I-2008 yang berada pada kisaran 7,6%-15,0%.

Namun demikian, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang relatif terkendali tersebut, masih dibarengi oleh tingkat pengangguran yang diperkirakan berada pada kisaran 8,1%-9,0% dan tingkat kemiskinan yang berada pada kisaran 1,1%-2,0%.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 2008**

Perkembangan perekonomian di Jawa Tengah pada 2008 diharapkan mengalami peningkatan, meski diperkirakan akan menghadapi beberapa permasalahan domestik yang secara kuat menjadi faktor penghambat perkembangan tersebut, a.l.: tingkat pengangguran yang tinggi, prosedur/perizinan untuk melakukan investasi yang berbelit, kerusakan sosial, dan lemahnya penegakan hukum. Sedangkan secara eksternal, perekonomian dunia yang lesu dan tingginya tingkat suku bunga internasional diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi domestik.

Dari sisi politik, efek desentralisasi, kestabilan situasi keamanan dan politik, dan tekanan internasional dinilai masih akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di Jawa Tengah. Sedangkan konsistensi dan transparansi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dinilai masih relatif lemah.

### **Perkiraan Kondisi Ekonomi Makro 2009**

Kondisi ekonomi makro 2009, secara umum diperkirakan masih relatif sama dengan kondisi ekonomi pada 2008. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih tumbuh pada kisaran 5,1-6,0%. Sektor industri pengolahan diikuti sektor pertanian dan sektor perdagangan, masih diharapkan menjadi sektor ekonomi yang paling mendukung dalam pertumbuhan ekonomi 2009. Adapun tingkat inflasi diperkirakan pada kisaran 7,1-8,0%. Meskipun demikian terdapat beberapa responden yang memperkirakan inflasi 2009 akan berada pada level 9,43% (rata-rata) yang terutama disebabkan oleh adanya ekspektasi adanya kenaikan harga dan adanya kebijakan

pemerintah di bidang harga dan pendapatan. Kelompok bahan makanan dan kelompok perumahan diperkirakan menjadi penyumbang terbesar dalam inflasi 2009.

**Tabel 2**  
**Perkiraan Beberapa Faktor Penghambat Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah 2008 dan Kondisi Risiko Politik**

No.	Faktor Penghambat	Sangat Lemah	Lemah	Sedang	Kuat	Sangat Kuat
<b>FAKTOR DOMESTIK (INTERNAL)</b>						
1.	Tingginya laju inflasi				X	
2.	Tingginya tingkat suku bunga dalam negeri				X	
3.	Meningkatnya volatilitas nilai tukar Rupiah			X		
4.	Kondisi stimulus fiskal yang masih terbatas			X		
5.	Penurunan kapasitas produksi terpakai				X	
6.	Tingkat pengangguran yang tinggi					X
7.	Situasi perburuhan yang belum kondusif				X	
8.	Tingginya upah				X	
9.	Tingkat kemiskinan yang tinggi				X	
10.	Prosedur/perizinan untuk melakukan investasi yang berbelit					X
11.	Kerusuhan sosial (misal : penjarahan)					X
12.	Kondisi keamanan yang berkurang				X	
13.	Unjuk rasa yang bersifat anarkis				X	
14.	Korupsi			X		
15.	Konflik SARA				X	
16.	Lemahnya penegakan hukum					X
<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>						
1.	Perekonomian dunia yang lesu				X	
2.	Politik dunia yang tidak stabil dan ancaman perang			X		
3.	Tingginya tingkat suku bunga internasional				X	
4.	Wabah Penyakit			X		
<b>RISIKO POLITIK</b>						
1.	Dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah			X		
2.	Konsistensi kebijakan pemerintah		X			
3.	Transparansi dalam pelaksanaan kebijakan		X			
4.	Efek desentralisasi				X	
5.	Kestabilan situasi keamanan dan politik				X	
6.	Antisipasi terhadap tekanan internasional				X	

Tingkat pengangguran diperkirakan berada pada kisaran 9,1-10,0%, sedangkan tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 1,1-2,0%.

**Tabel 2**  
**Perkiraan Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Jawa Tengah 2009**

No.	Indikator Ekonomi	Perkiraan	
		Tahun 2008	Tahun 2009
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,1% - 6,0%	5,1% - 6,0%
2.	Inflasi	> 8,0%	7,1% - 8,0%
3.	Pertumbuhan Ekspor Barang	7,6% - 15,0%	-
4.	Pertumbuhan Impor Barang	22,5% - 30,0%	-
5.	Tingkat Pengangguran	9,1% - 10,0%	9,1% - 10,0%
6.	Tingkat Kemiskinan	1,1% - 2,0%	1,1% - 2,0%



Halaman Ini sengaja dikosongkan  
*(This page is intentionally blank)*

## Lampiran Data

**PERKEMBANGAN INDIKATOR PERBANKAN  
DI PROVINSI JAWA TENGAH (BANK UMUM & BPR)**

INDIKATOR USAHA	2007			2008		PERT. DES-07 (%)	
	JUN	SEP	DES	MAR	JUN	yoy	qtq
<b>1. Total Aset</b>	<b>86,483</b>	<b>92,551</b>	<b>93.197</b>	<b>94.342</b>	<b>99.100</b>	<b>14,58</b>	<b>5,04</b>
<b>2. DPK</b>	<b>69,553</b>	<b>72,106</b>	<b>74.845</b>	<b>74.783</b>	<b>78.761</b>	<b>13,23</b>	<b>5,31</b>
a. Giro	12,526	13,373	12.304	12.772	12.971	3,55	1,55
b. Tabungan	29,041	30,730	35.072	33.938	36.219	24,71	6,72
c. Deposito	27,986	28,003	27.469	28.073	29.571	5,66	5,33
<b>3. Kredit</b>	<b>56,214</b>	<b>59,808</b>	<b>62.333</b>	<b>64.040</b>	<b>71.397</b>	<b>27,00</b>	<b>11,48</b>
<b>4. LDR (%)</b>	<b>80.82</b>	<b>82.94</b>	<b>83,28</b>	<b>85,63</b>	<b>90,65</b>	-	-
<b>5. NPLs (%)</b>	<b>5.73</b>	<b>4.96</b>	<b>3,73</b>	<b>4,13</b>	<b>2,80</b>	-	-

Sumber : LBU, Bank Indonesia

**PERKEMBANGAN ASET BANK UMUM DI JAWA TENGAH**

KETERANGAN	2007			2008		PERT. JUN-08 (%)	
	JUN	SEP	DES	MAR	JUN	yoy	qtq
<b>Menurut Kelompok Bank</b>							
1. Bank Pemerintah	45,178	48,975	47.492	47.198	49.579	9.74	5.04
2. Bank Swasta	33,036	34,879	36.634	37.745	39.812	20.51	5.47
3. Bank Asing	2,229	2,374	2,295	2.474	2.431	9.06	-1.73
<b>Jumlah</b>	<b>80,443</b>	<b>86,228</b>	<b>86,421</b>	<b>87.417</b>	<b>91.822</b>	<b>14.14</b>	<b>5.03</b>
<b>Menurut Wilayah Kerja KBI</b>							
1. KBI Semarang	57,501	62,041	60.606	61.683	64.108	11.49	3.93
2. KBI Solo	15,688	16,674	18.030	17.782	19.277	22.87	8.40
3. KBI Purwokerto	7,254	7,513	7.785	7.952	8.437	16.30	6.09

Sumber : LBU, Bank Indonesia



### PERKEMBANGAN DANA PIHAK KETIGA BANK UMUM DI JAWA TENGAH

DPK	2007			2008		PERT. JUN-08 (%)	
	JUN	SEP	DES	MAR	JUN		
<b>1. Bank Pemerintah</b>	<b>35,837</b>	<b>37,637</b>	<b>38.520</b>	<b>37.969</b>	<b>39.655</b>	<b>10.65</b>	<b>4.44</b>
- Giro	7,525	8,357	7.318	7.278	7.309	-2.87	0.43
- Tabungan	17,066	18,009	20.854	19.835	21.520	26.10	8.49
- Deposito	11,246	11,271	10.348	10.856	10.827	-3.73	-0.27
<b>2. Bank Swst</b>	<b>27,302</b>	<b>27,845</b>	<b>29.526</b>	<b>29.807</b>	<b>31.886</b>	<b>16.79</b>	<b>6.97</b>
- Giro	4,293	4,405	4.435	4.920	5.253	22.35	6.76
- Tabungan	10,169	10,797	12.038	11.858	12.191	19.88	2.80
- Deposito	12,839	12,644	13.053	13.029	14.443	12.49	10.85
<b>3. Bank Asing</b>	<b>2,133</b>	<b>2,165</b>	<b>2.053</b>	<b>2.110</b>	<b>2.165</b>	<b>1.51</b>	<b>2.61</b>
- Giro	708	612	551	574	410	-42.15	-28.65
- Tabungan	233	239	233	279	451	93.51	61.61
- Deposito	1,192	1,314	1.269	1.257	1.305	9.45	3.79
<b>4. TOTAL DPK</b>	<b>65,271</b>	<b>67,647</b>	<b>70.099</b>	<b>69.886</b>	<b>73.706</b>	<b>12.92</b>	<b>5.47</b>
- Giro	12,526	13,373	12.304	12.772	12.971	3.55	1.56
- Tabungan	27,468	29,045	33.125	31.971	34.161	24.37	6.85
- Deposito	25,277	25,229	24.670	25.143	26.574	5.13	5.69
<b>5. Suku Bunga Dana (%)</b>							
- Giro	1.27	1.28	1,32	1,23	1.36	-	-
- Tabungan	2.76	2.62	2,58	2,46	3.10	-	-
- Deposito (1 bulan)	6.52	5.95	5,87	5,49	6.57	-	-

Sumber : LBU, Bank Indonesia

### PERKEMBANGAN KREDIT BANK UMUM DI JAWA TENGAH

PENYALURAN KREDIT	2007			2008		PERTJUN-08 (%)	
	JUN	SEP	DES	MAR	JUN	yoy	qtq
1. Menurut Jenis Penggunaan	51,306	54,515	57.017	58.475	65.406	27.48	11.85
- Modal Kerja	29,126	30,924	32.275	32.745	36.732	26.12	12.18
- Investasi	4,214	4,405	4.489	4.517	4.987	18.34	10.40
- Konsumsi	17,966	19,186	20.253	21.213	23.687	31.84	11.66
2. Menurut Kelompok Bank	51,305	54,515	57.017	58.475	65.406	27.49	11.85
- Bank Pemerintah	29,725	31,016	32.040	32.520	37.282	25.42	14.64
- Bank Swasta Nasional	20,929	22,604	24.138	24.934	27.099	29.48	8.68
- Bank Asing	651	896	839	1.021	1.025	57.50	0.43
3. Menurut Sektor Ekonomi	51,306	54,515	57.017	58.475	65.406	27.48	11.86
- Pertan. & Srna Pertanian	2,083	2,088	2.132	1.996	2.067	-0.75	3.58
- Pertambangan	68	64	71	73	65	-3.76	10.35
- Perindustrian	10,062	10,497	11.030	11.070	12.479	24.02	12.73
- Listrik, Gas dan Air	9	10	10	12	13	47.29	10.47
- Konstruksi	872	1,053	969	852	1.205	38.24	41.49
- Perdag., Hotel & Restrn	16,706	17,703	18.805	19.345	21.254	27.22	9.87
- Pengangk. & Komunik.	539	568	594	621	685	27.06	10.28
- Jasa-jasa	2,664	2,950	2.781	2.906	3.366	26.36	15.84
- Lain-lain	18,303	19,582	20.625	21.599	24.270	32.60	12.37
4. LDR (%) Jawa Tengah	78.60	80.59	81,34	83,67	88.74	-	-
- KBI Semarang	77.50	80.35	79,94	82,56	87.29	-	-
- KBI Solo	83.96	82.99	87,41	89,59	95.30	-	-
- KBI Purwokerto	75.10	77.12	78,04	78,95	84.96	-	-
5. Suku bunga kredit							
- Modal Kerja	21.74	21.55	21,61	22,55	21.63	-	-
- Investasi	20.72	20.67	20,34	18,41	20.57	-	-
- Konsumsi	15.10	14.65	14,18	13,75	15.47	-	-

Sumber : Bank Indonesia

### PERKEMBANGAN KUALITAS KREDIT BANK UMUM DI JAWA TENGAH

KOLEKTIBILITAS KREDIT	2007			2008	
	JUN	SEP	DES	MAR	JUN
<b>NPL (Nominal; Rp Milyar)</b>	2,565	2,297	1,712	1,951	2,001
<b>NPL (%)</b>	5.00	4.21	3,00	3,34	3.06
<b>NPL per kelompok bank (%)</b>					
- Bank pemerintah	6.51	5.27	3,53	4,04	3.56
- Bank Swasta	2.95	2.88	2,30	2,44	2.32
- Bank Asing	1.87	1.49	3,28	3,06	1.19
<b>NPL kredit per jenis penggunaan (%)</b>					
- Modal Kerja	6.46	5.69	4,11	4,56	4.22
- Investasi	6.82	4.97	2,61	3,76	3.38
- Konsumsi	2.21	1.66	1,33	1,35	1.19
<b>NPL kredit per sektor ekonomi (%)</b>					
- Pertanian	3.02	3.12	2,22	3,06	3.67
- Pertambangan	1.83	0.88	0,68	0,72	1.03
- Industri	11.50	8.98	4,76	5,70	5.03
- Listrik, Gas	7.52	6.72	6,65	5,45	3.54
- Konstruksi	4.71	5.63	3,94	6,09	5.12
- Perdagangan, Hotel, Restoran	4.94	4.58	3,89	4,11	3.94
- Angkutan, Komunikasi	3.96	4.75	3,88	3,80	3.61
- Jasa Dunia Usaha	1.55	1.93	2,37	3,13	2.31
- Jasa Sosial Masyarakat	3.03	2.94	2,55	2,55	1.99
- Lain-2	2.21	1.68	1,35	1,39	1.22

Sumber : LBU, Bank Indonesia

### PDRB SEKTORAL HARGA KONSTAN JAWA TENGAH

SEKTOR	2007				2008	
	Tw.I	Tw.II	Tw. III	Tw. IV	Tw.I	Tw.II
1. PERTANIAN	8,931,298.08	8,478,557.90	8,042,278.39	6,412,313.56	8,624,885.78	8,977,759.26
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	436,419.43	447,443.87	452,136.80	449,078.92	442,803.31	456,548.70
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	12,091,644.28	12,618,912.29	12,835,375.08	13,324,854.04	13,240,977.75	13,290,392.00
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	323,074.73	333,794.31	340,878.78	343,097.34	340,359.66	344,429.00
5. BANGUNAN	2,175,714.91	2,200,953.21	2,308,139.63	2,370,921.03	2,294,340.28	2,333,802.93
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	8,337,144.82	8,364,657.40	8,527,746.68	8,668,465.02	8,792,424.07	8,847,185.24
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	1,960,098.72	1,997,462.20	2,008,847.74	2,086,188.38	2,099,331.36	2,130,611.40
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & Js. Pers	1,364,255.51	1,421,919.73	1,470,530.25	1,511,867.72	1,520,979.40	1,538,567.11
9. JASA-JASA	3,861,780.37	4,020,299.23	4,173,003.72	4,424,274.39	4,294,201.32	4,374,129.04
<b>PDRB</b>	<b>39,481,430.84</b>	<b>39,884,000.14</b>	<b>40,158,937.08</b>	<b>39,591,060.40</b>	<b>41,650,302.93</b>	<b>42,293,424.68</b>

### PDRB PENGGUNAAN HARGA KONSTAN JAWA TENGAH

		2007**				2008	
		I	II	III	IV	I	II
1	<b>Konsumsi ( 2 + 3 )</b>	<b>29,981,788</b>	<b>30,915,438</b>	<b>31,365,102</b>	<b>32,165,050</b>	<b>31,927,422</b>	<b>32,866,907</b>
2	Rumah Tangga	25,578,223	25,900,061	26,120,313	26,571,035	26,876,235	27,232,712
	Lembaga Swasta Nirlaba	0	0	0			
3	Pemerintah	4,403,565	5,015,377	5,244,789	5,594,015	5,051,187	5,634,195
4	<b>Investasi ( 5 + 6 )</b>	<b>4,694,141</b>	<b>8,758,939</b>	<b>8,795,305</b>	<b>3,491,272</b>	<b>4,951,220</b>	<b>7,460,763</b>
5	Pembentukan Modal Tetap Domest	6,827,261	6,932,974	7,167,848	7,348,481	7,249,079	7,361,479
6	Perubahan stok	-2,133,120	1,825,965	1,627,458	-3,857,209	-2,297,860	99,283
	<i>Diskrepansi statistik 1)</i>						
	<b>Permintaan Domestik ( 1 + 4 )</b>	<b>34,675,929</b>	<b>39,674,376</b>	<b>40,160,407</b>	<b>35,656,323</b>	<b>36,878,642</b>	<b>40,327,670</b>
	<b>Ekspor Neto ( 7 - 8 )</b>	<b>4,805,501</b>	<b>212,217</b>	<b>-1,470</b>	<b>3,934,738</b>	<b>4,771,661</b>	<b>1,965,755</b>
7	Ekspor barang dan jasa	22,483,932	21,949,183	22,524,220	20,332,437	24,006,749	21,805,208
8	Dikurangi impor barang dan jasa	17,678,430	21,736,966	22,525,690	16,397,699	19,235,088	19,839,453
9	<b>PRODUK DOMESTIK BRUTO</b>	<b>39,481,431</b>	<b>39,886,593</b>	<b>40,158,937</b>	<b>39,591,060</b>	<b>41,650,303</b>	<b>42,293,425</b>

## Daftar Istilah

**administered price**

harga barang/jasa yang diatur oleh pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik.

**BI Rate**

suku bunga referensi kebijakan moneter dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur setiap bulannya.

**BI-RTGS**

Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement, yang merupakan suatu penyelesaian kewajiban bayar-membayar (*settlement*) yang dilakukan secara *on-line* atau seketika untuk setiap instruksi transfer dana.

**dana pihak ketiga (DPK)**

adalah simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka.

**financing to deposit ratio (FDR) atau loan to deposit ratio (LDR)**

rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, baik dalam rupiah dan valas. Terminologi FDR untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.

**fit for circulation**

merupakan kebijakan untuk menyediakan uang layak edar.

**inflasi IHK**

kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode, yang diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

**inflasi inti**

inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen *volatile foods* dan *administered prices*.

**inflow**

adalah uang yang diedarkan aliran masuk uang kartal ke Bank Indonesia.

**kredit**

adalah penyediaan uang atau tagihan yang sejenis, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :

(1) pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *note purchase agreement (NPA)*.

(2) pengambiln tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

**M1**

uang beredar dalam arti sempit, yaitu kewajiban sistem moneter yang terdiri dari uang kartal dan uang giral.

**M2**

uang beredar dalam arti luas, yaitu kewajiban sistem moneter yang terdiri dari M1 dan uang kuasi (tabungan dan deposito berjangka dalam rupiah dan valas pada bank umum).

**net inflow**

uang yang diedarkan *inflow* lebih besar dari *outflow*.

***non performing loans (NPL) atau nonperforming financing (NPF)***

kredit/pembiayaan bermasalah atau non-lancar yang terdiri dari kredit dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif. Terminologi NPL untuk bank konvensional, sedangkan NPF untuk bank syariah.

***outflow***

uang yang diedarkan aliran keluar uang kartal dari Bank Indonesia.

***pemberian tanda tidak berharga (PTTB)***

kegiatan pemusnahan uang bagi uang yang sudah tidak layak edar.

***pertumbuhan ekonomi***

perubahan nilai PDRB atas harga konstan dalam suatu periode tertentu (triwulanan atau tahunan).

***produk domestik regional bruto (PDRB)***

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dibedakan menjadi: (1) PDRB atas dasar harga berlaku yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, dan (2) PDRB atas dasar harga konstan yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar (saat ini digunakan tahun 1993).

***sertifikat bank indonesia (SBI)***

surat berharga atas unjuk yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang.

***uang giral***

uang yang terdiri atas rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan yang sudah jatuh waktu, yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam rupiah pada sistem moneter.

***uang kartal***

uang yang terdiri atas uang kertas dan uang logam yang berlaku, tidak termasuk uang kas pada KPN dan bank umum.

***uang kuasi***

uang yang terdiri atas simpanan berjangka dan tabungan penduduk pada bank umum, baik dalam rupiah maupun valuta asing.

***uang yang diedarkan (UYD)***

uang kartal yang berada di masyarakat ditambah dengan uang kartal yang berada di kas bank-bank. Atau pengertiannya sama dengan uang kartal di dalam konsep moneter.

***volatile foods***

komponen inflasi IHK yang mencakup beberapa bahan makanan yang harganya sangat fluktuatif.

